



UNIVERSITAS INDONESIA

**BIOETANOL DAN AKSES LAHAN: ETNOGRAFI
PENGUASAAN LAHAN PRODUKSI BIOETANOL
DI CIANJUR, JAWA BARAT**

TESIS

KURNIA NOVIANTI

1006797420

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
PROGRAM PASCA SARJANA
DEPOK, JUNI 2012**



UNIVERSITAS INDONESIA

**BIOETANOL DAN AKSES LAHAN: ETNOGRAFI
PENGUASAAN LAHAN PRODUKSI BIOETANOL
DI CIANJUR, JAWA BARAT**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister
dalam bidang Antropologi**

KURNIA NOVIANTI

1006797420

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
PROGRAM PASCA SARJANA
DEPOK, JUNI 2012**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
DEPARTEMEN ANTROPOLOGI
PROGRAM STUDI PASCASARJANA**

Gedung B (Prof. Dr. T.O Ihromi) Lt. 1 Kampus Baru UI, Depok 16424 Telp/Fax : (021) 78849022
E-mail: pascant@gmail.com

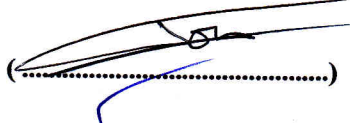


HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Kurnia Novianti
NPM : 1006797420
Program Studi : Antropologi
Judul Tesis : BIOETANOL dan AKSES LAHAN: Etnografi Penguasaan Lahan
Produksi Bioetanol Di Cianjur, Jawa Barat.

Tesis berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Antropologi pada Program Studi Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	DR. TONY RUDYANSJAH, MA	
PEMBIMBING	IWAN TJITRADAJA, Ph.D	
PENGUJI	PROF. DR. DRA. SULISTYOWATI SUWARNO, MSi	(.....)
PENGUJI	DR. DRS. SEMIARTO AJI PURWANTO	

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 18 Juni 2012

UCAPAN TERIMA KASIH

Tak ada hal selain ucap syukur yang tiada terkira kepada Allah SWT atas segala bentuk pertolongan yang Ia berikan selama penulis menjalani proses belajar di Program Pascasarjana Antropologi FISIP UI sejak tahun 2010 silam. Sesungguhnya penelitian tesis ini merupakan rangkaian dari proses mencari tahu dan memahami setiap persoalan dan gejala sosial melalui perspektif antropologi. Tentu saja selama proses tersebut penulis telah dibantu oleh banyak pihak, terutama staf pengajar di Program Pascasarjana Antropologi.

Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada Iwan Tjitradjaja, Ph. D. selaku pembimbing tesis dan pengajar yang telah begitu sabar, telaten, dan selalu memotivasi agar penulis dapat menyelesaikan tesis pada semester ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Semiarto Aji Purwanto dan Dr. Tony Rudjansjah selaku penguji yang juga banyak memberikan wawasan dan pengetahuan melalui beberapa mata kuliah yang penulis ikuti selama tiga semester ini. Terima kasih juga penulis tujukan kepada Sulistyowati Irianto, Ph. D selaku mantan Kepala Program Pascasarjana Antropologi Universitas Indonesia.

Terima kasih yang tulus juga penulis tujukan kepada Fadjar Ibnu Thufail, Ph. D yang selama proses penelitian bersedia menjadi pembimbing di LIPI. Selain itu, penulis juga berterima kasih kepada Suraya Abdulwahab Afiff, Ph. D yang bersedia membagi pengetahuan melalui diskusi, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Teman-teman angkatan 2010, khususnya yang mengikuti beberapa mata kuliah yang sama dengan penulis hingga semester 3, Johannes, Samanyek, Candra, Icha, Eki, dan Martin yang banyak memberikan kontribusi pengetahuan dan wawasan melalui diskusi dan *obrolan-obrolan* santai se usai perkuliahan. Juga kepada uni Sri Setyawati dan mbak Dwi Riani, terima kasih untuk semua masukan yang diberikan terkait dengan penulisan etnografi.

Proses perkuliahan ini juga mendapat dukungan dari Kementerian Riset dan Teknologi melalui Program Karyasiswa Ristek 2010, terutama Ibu Laila dan Pak Sandy sebagai pengelola, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas peluang yang diberikan. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada segenap pimpinan dan karyawan Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (PSDR LIPI), tempat penulis mengabdikan diri sebagai peneliti, atas motivasi untuk bersekolah lagi. Khusus bagi Ulil Amri, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu yang diberikan untuk memberikan masukan terhadap draft tesis dan kepada Ayu Nova

dan Erlita Tantri, penulis berterima kasih atas diskusi-diskusi yang memotivasi selama penelitian berlangsung.

Penelitian juga banyak mendapat kemudahan dari para informan yang sejak awal menerima penulis dengan tangan terbuka. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih setulus-tulusnya kepada Pak Heru (bukan nama sebenarnya) dan keluarga yang telah banyak membantu proses pengumpulan data dan memberikan fasilitas selama penulis berada di Cipanas. Terima kasih dan penghargaan yang besar juga penulis tujukan kepada Pak Asep (bukan nama sebenarnya) atas waktu dan kesabarannya selama penulis melakukan penelitian lapangan. Kepada pimpinan PT. EKM, Pak Adibrata, tak lupa penulis mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk mengeksplorasi data terkait dengan perkebunan singkong.

Tak terlupakan pihak-pihak yang telah banyak membantu keperluan administrasi penulis selama menjalani perkuliahan di Program Pascasarjana Antropologi, yaitu Mbak Wiwin, Mbak Tina, Mbak Watie, dan Pak Tomi. Selain itu, Ibu Made Surbaliati selaku Kepala Bidang Kepegawaian PSDR LIPI juga banyak membantu penulis mengurus hal-hal administratif. Untuk segala bantuan yang diberikan selama ini, penulis hanya bisa berterima kasih karena dengan dukungan tersebut proses ini tidak menemui kendala apapun. Semoga budi baik tersebut mendapat balasan kebaikan pula.

Last but not least, dukungan keluarga menjadi sumber motivasi terbesar bagi penulis selama ini. Teruntuk ananda tercinta Athaaya Luqmanul Abied, terima kasih telah menjadi inspirasi dan motivasi bagi Bunda. Terima kasih setulusnya juga penulis tujukan kepada Susanto, teman diskusi sekaligus teman hidup yang dengan begitu sabar mendengarkan setiap keluh kesah penulis selama ini. Tak terkecuali, orang tua dan adik-adik tersayang (Ria, Triana, Annisa), terima kasih untuk semua doa dan dukungan tulus yang telah diberikan.

Akhirnya penulis berharap tesis ini tidak hanya bermanfaat bagi penulis, tetapi juga bagi siapapun yang akan membacanya. Sesungguhnya ini merupakan bagian dari perjalanan panjang penulis untuk menghasilkan karya tulis-karya tulis yang berkualitas. Dengan demikian, penulis menyadari bahwa tesis ini memiliki banyak kelemahan sehingga segala masukan maupun kritik akan sangat bermanfaat bagi penulisan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Depok, Juni 2012

Kurnia Novianti

LEMBAR ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Kurnia Novianti

NPM : 1006797420

Tanda Tangan :



Tanggal : 12 Juni 2012

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kurnia Novianti
NPM : 1006797420
Program Studi : Pascasarjana
Departemen : Antropologi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“Bioetanol dan Akses Lahan: Etnografi Penguasaan Produksi Bioetanol di Cianjur, Jawa Barat”** beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/ formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : 12 Juni 2012

Yang menyatakan,



(Kurnia Novianti)

ABSTRAK

Nama : Kurnia Novianti
Program Studi : Pasca Sarjana Antropologi
Judul : Bioetanol dan Akses Lahan: Etnografi Penguasaan Lahan
Produksi Bioetanol di Cianjur, Jawa Barat

Isu energi terbarukan telah banyak dibahas dengan berbagai perspektif. Dari beberapa kajian tentang energi terbarukan, perhatian terhadap isu akses lahan masih minim. Penelitian ini mengangkat masalah akses lahan sebagai salah satu isu yang terkait erat dengan masalah penyediaan bahan baku bagi produksi energi terbarukan: bioetanol. Penelitian yang dilakukan di perkebunan singkong di Cianjur, Jawa Barat yang aksesnya dikuasai oleh PT. EKM menunjukkan bahwa akses terhadap lahan sangat penting untuk menjamin pasokan bahan baku bagi produksi bioetanol. Dengan demikian, isu akses menjadi penting dibahas mengingat jaminan pasokan bahan baku yang merupakan hulu dari proses produksi energi terbarukan tidak dapat diperoleh tanpa ketersediaan lahan yang memadai. Dalam penelitian ini, pendekatan akses dan aktor digunakan untuk memahami bagaimana akses “bekerja”. Temuan lapangan menunjukkan bahwa akses terhadap lahan di beberapa lokasi pengamatan melibatkan banyak aktor yang saling berelasi dalam bentuk kontestasi maupun negosiasi. Relasi sosial antaraktor tersebut sarat dengan relasi kuasa. Oleh karena itu, untuk memahami mengapa dan bagaimana pihak-pihak tertentu menjalin relasi satu dengan lainnya guna memperoleh kontrol atas sumber daya-sumber daya tersebut, penulis menggunakan metode etnografi dengan pengamatan dan wawancara mendalam.

Kata kunci: energi terbarukan, bioetanol, akses, aktor, relasi sosial, jejaring antaraktor

ABSTRACT

Name : Kurnia Novianti
Study Program: Graduated Program of Anthropology
Judul : Bio-ethanol and Land Access: Ethnography of Land Acquisition
for Bioethanol Production in Cianjur, West Java

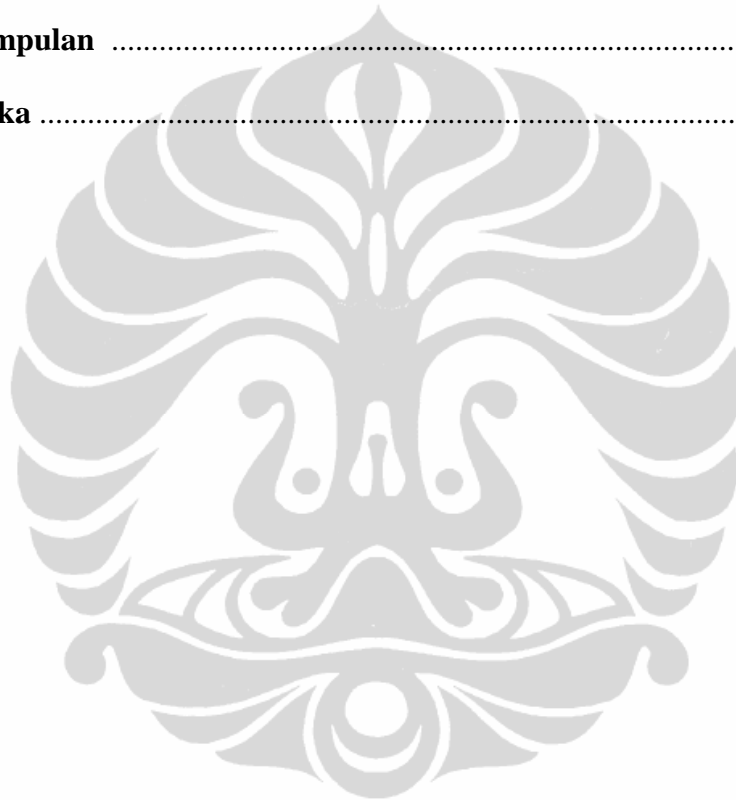
The issue of renewable energy has been discussed from various perspectives. Of the few studies on renewable energy, attention to the issue of access to land is still rare. This research focused on the issue of land access as one of the issues that closely related to the problem of providing raw materials for renewable energy production. Fieldwork made in cassava plantation in Cianjur, West Java, to which access land is controlled by PT. EKM, indicates that access to land is essential to ensure supply of raw materials for bio-ethanol production. Thus, issue of land access is important to discuss regarding that security of supply of raw material cannot be obtained without the availability of adequate land. In this research, access and actor-based approaches are utilized to understand how access "works". Some findings indicate that access to land on several observation sites involving many actors in the form of contestation and negotiation. Social relation among actors in this study is closely related to what is so called "power relation". Therefore, in order to understand why and how do certain parties get benefit from the resources, I use ethnographic method combined with observation, and in-depth interview.

Key words: renewable energy, bio-ethanol, access, actor, social relation, networking of actors

DAFTAR ISI

Halaman Judul	
Lembar Pengesahan	
Ucapan Terima kasih	
Lembar Orisinalitas	
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	
Abstrak	
Daftar Isi	
Daftar Gambar	
Daftar Grafik dan Tabel	
Bab I Pendahuluan	
I. 1. Latar Belakang	1
I. 2. Fokus Kajian	6
I. 3. Tinjauan Konseptual	7
I. 3. 1. Akses Lahan, Kepemilikan Lahan, dan Pendekatan Aktor	7
I. 3. 2. Relasi Sosial dan Jejaring Aktor	14
I. 4. Proses Penelitian	
I. 4. 1. Pendekatan Penelitian	20
I. 4. 2. Kerja Lapangan: Pengamatan dan Wawancara Mendalam	22
I. 4. 3. Analisis Data	25
I. 5. Sistematika Penulisan	27
Bab II PT. EKM dan Perkebunan Singkong	
II. 1. PT. EKM: Produsen Bioetanol	29
II. 2. Membuka <i>Kebon</i> Singkong: Jaminan Pasokan Bahan Baku	35
II. 2. 1. Lokasi Mariwati	35
II. 2. 2. Lokasi Kota Bunga	38
II. 2. 3. Lokasi Cikole	39
II. 2. 4. Lokasi Sampalan	40
II. 2. 5. Lokasi Barudawa 2 (Blok KUD)	52
Bab III Relasi Sosial dan Jejaring Para Aktor dalam Akses Lahan	
III. 1. Aktor-Aktor dalam Akses Lahan	60
III. 1. 1. PT. EKM	61
III. 1. 2. Pengelola Lahan di Sampalan dan Barudawa 2	64
III. 1. 3. Para Penggarap	66
III. 1. 4. Pemerintah Desa dan BPN Cianjur	69
III. 2. Kontestasi Aktor atas Lahan	71
III. 3. Negosiasi Para Aktor	81
III. 4. Jejaring yang Terjalin Diantara Para Aktor	88

Bab IV Mekanisme Akses pada Lahan Perkebunan Singkong	
IV. 1. Mekanisme Memperoleh Akses: Menyewa Lahan dari Pemilik, Pengelola, atau Penggarap	98
IV. 2. Mekanisme Mengontrol Akses	118
IV. 2. 1. Menempatkan Pengawas di <i>Kebon</i> Singkong	119
IV. 2. 2. Koordinasi antara Manajer dan Para Pengawas Lapangan	122
IV. 3. Mekanisme Memelihara Akses	124
IV. 3. 1. Menjaga Relasi dengan Pemilik dan Pengelola Lahan	124
IV. 3. 2. Merawat Singkong Secara Intensif	126
Bab VI Kesimpulan	129
Daftar Pustaka	132



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1.	Bibit singkong dan pupuk microba yang siap digunakan di lokasi Sampalan (milik Pak Iw).....	34
Gambar 2. 2.	Peta Perekonomian Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur.....	42
Gambar 2. 3.	Saat Pak Adibrata (Pimpinan PT. EKM) berkunjung ke lokasi Sampalan.....	48
Gambar 2. 4.	Pemandangan petak-petak lahan yang dikelola oleh penggarap.....	51
Gambar 2. 5.	Salah satu sisi lokasi Sampalan yang ditanami singkong oleh perusahaan.....	52
Gambar 2. 6.	Proses perawatan singkong di lokasi Barudawa 2.....	53
Gambar 2. 7.	Salah satu area di lokasi Barudawa 2 yang ditanami wortel oleh penggarap.....	55
Gambar 3. 1.	Pengawas sedang mengawasi salah satu kegiatan (penanaman dan pemupukan) yang sedang berlangsung di lokasi Sampalan.....	64
Gambar 3. 2.	Haji Saefuddin sedang menanam bibit tembakau di lahan garapannya.....	76
Gambar 3. 3.	Lahan di Blok Sabri (bagian dari Lokasi Sampalan) yang ditanami sayur-mayur oleh Pak Makmur.....	77
Gambar 3. 4.	Lahan garapan Pak Kumis yang sedang dinegosiasikan kompensasinya.....	78
Gambar 4. 1.	Salah satu titik penanaman di lokasi Sampalan.....	104
Gambar 4. 2.	Proses pembukaan lahan dengan menggunakan traktor...	110
Gambar 4. 3.	Salah satu lahan <i>gerung</i> yang menjadi target “pembukaan” lahan selanjutnya.....	122
Gambar 4. 4.	Perawatan singkong di lokasi sampalan yang dilakukan para ibu.....	126

DAFTAR TABEL DAN GRAFIK

Tabel 1. 1.	Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Kayu Provinsi Jawa Barat.....	1
Grafik 2. 1.	Pemanfaatan Lahan di Desa Sukanagalih.....	43
Grafik 2. 2.	Kepemilikan Lahan oleh Penduduk Desa Sukanagalih.....	44



BAB I PENDAHULUAN

I. 1. Latar Belakang

Singkong yang ditanam pada hamparan lahan dengan luas tertentu menjadi pemandangan yang biasa kita peroleh ketika berkunjung ke desa-desa di Indonesia. Namun kesan tersebut menjadi berbeda ketika penulis mengunjungi sebuah lokasi perkebunan singkong yang luasnya hingga puluhan hektar di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet. Desa ini menjadi salah satu lokasi penanaman singkong untuk tujuan investasi dengan nama Program Bahan Bakar Singkong atau BBS. Melalui iklan yang dimuat dalam sebuah majalah¹ sebuah perusahaan bernama PT. EKM menawarkan investasi yang menguntungkan, sehingga muncul pertanyaan dalam benak penulis, mengapa singkong kini menjadi komoditas yang bernilai tinggi?

Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2012 melaporkan bahwa produksi singkong atau ubi kayu (khusus di Jawa Barat) mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Tercatat sejak tahun 2007 hingga 2009, luas lahan dan hasil panen berbanding lurus, tetapi pada tahun 2010 dan 2011, luas lahan berkurang dibandingkan tahun sebelumnya namun hasil panen menunjukkan peningkatan (dalam tabel 1. 1). Data tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun kebutuhan masyarakat akan singkong terus meningkat.

Tabel 1. 1. Luas Panen, Produktivitas, dan Produksi Ubi Kayu Provinsi Jawa Barat

Tahun	Luas Panen (Ha)	Produktivitas (Ku/Ha)	Produksi (Ton)
2007	105.508	182,25	1.922.840
2008	109.354	186,08	2.034.854
2009	110.827	188,24	2.086.187
2010	105.023	191,81	2.014.402
2011	101.475	199,42	2.023.573

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2012

(http://www.bps.go.id/tmn_pgn.php?eng=0).

¹ Majalah Trubus edisi nomor 497 bulan April 2011/XLII.

Arifenie (2011) juga mengatakan bahwa naiknya permintaan singkong mampu mendorong kenaikan produksi. Berdasarkan perhitungan Masyarakat Singkong Indonesia (MSI), tahun depan produksi singkong basah diperkirakan akan naik 150% hingga 233%. Tahun 2011, produksi singkong basah ditargetkan sebesar 24 juta ton dan tahun depan (2012) produksi singkong basah diperkirakan mencapai 60 juta ton hingga 80 juta ton. Lebih lanjut Ketua I MSI, Suharyo Husen, menuturkan bahwa saat ini produktivitas rata-rata singkong hanya sekitar 20 ton per hektar (ha). Tahun depan, diharapkan produktivitas singkong bisa mencapai 50 ton per hektar. "Secara bertahap produktivitas bisa dinaikkan hingga 100 sampai 150 ton per hektar," ungkap Suharyo.²

Peningkatan tersebut tidak hanya disebabkan oleh naiknya permintaan akan bahan baku untuk membuat tepung singkong, tetapi juga bioetanol yang bahan bakunya juga dari singkong, seperti disebutkan oleh Rhomy Irawan, sekretaris Asosiasi Petani Singkong Indonesia (Aspesindo).³ Mengapa? Karena seiring dengan meningkatnya kebutuhan BBM yang semakin tinggi, bioetanol mulai diinovasikan menjadi bahan bakar alternatif untuk menggantikan keberadaan BBM yang sekarang ini semakin mahal.⁴

Bioetanol (C₂H₅OH) menurut penelitian yang dilakukan oleh Yuswanto (2010) adalah cairan biokimia dari proses fermentasi gula dari sumber karbohidrat dengan menggunakan bantuan mikroorganisme. Komarayati dan Gusmailina (2010) dalam penelitiannya juga menambahkan bahwa bioetanol merupakan salah satu *biofuel* yang hadir sebagai bahan bakal alternatif yang lebih ramah lingkungan dan sifatnya yang terbarukan karena diolah dari tumbuhan⁵ yang memiliki keunggulan dan mampu menurunkan emisi CO₂ hingga 18%.

² Lihat di <http://industri.kontan.co.id/news/impor-singkong-berkurang-produksi-singkong-mulai-digeber-1>. Diakses tanggal 26 September 2011.

³ Lihat di <http://industri.kontan.co.id/news/permintaan-singkong-naik-hampir-30-1>. Diakses tanggal 8 September 2011.

⁴ Lihat di <http://bisnisukm.com/bioetanol-singkong-menguntungkan-dan-ramah-lingkungan.html>. Diakses tanggal 6 Februari 2012.

⁵ Tumbuhan yang potensial untuk menghasilkan bioetanol antara lain tanaman yang memiliki kadar karbohidrat tinggi, seperti: tebu, nira, aren, sorgum, ubi kayu, jambu mete (limbah jambu mete), garut, batang pisang, ubi jalar, jagung, bonggol jagung, jerami dan bagas.

Bioetanol dapat diproduksi dari berbagai bahan baku yang banyak terdapat di Indonesia sehingga sangat potensial untuk diolah dan dikembangkan karena bahan bakunya sangat dikenal oleh masyarakat. Banyaknya variasi tumbuhan bahan baku tersebut memungkinkan masyarakat dapat menanam jenis tumbuhan yang sesuai dengan kondisi tanah di daerahnya. Salah satu tumbuhan yang mulai banyak digunakan untuk bahan baku bioetanol adalah ubi kayu atau singkong.

Tumbuhan ini memiliki kelebihan karena dapat tumbuh di tanah yang kurang subur, memiliki daya tahan yang tinggi terhadap penyakit, dan dapat diatur waktu panennya. Kendati demikian, singkong memiliki kekurangan seperti kandungan kadar pati yang hanya 30%, lebih rendah bila dibandingkan dengan jagung dan tebu yang kadar patinya masing-masing 70% dan 55%. Dengan demikian, bioetanol yang dihasilkan dari singkong lebih sedikit daripada jagung atau tebu (Komarayati dan Gusmailina, 2010).

Data Hasniawati (2010) menunjukkan bahwa di Indonesia saat ini telah berdiri 45 industri yang siap untuk mengolah singkong menjadi bioetanol. Perusahaan-perusahaan tersebut tersebar di 9 provinsi antara lain di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sumatera Barat, dan Sumatera Selatan.⁶ Hal ini membuktikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir singkong telah menarik perhatian banyak pihak (terutama swasta) dan menjadi komoditas bisnis. Di samping perusahaan-perusahaan bermodal besar, bioetanol juga menarik minat para wirausahawan kecil dan menengah di beberapa daerah penghasil singkong.

Salah satunya adalah Wien Iskandar, seorang wirausaha berusia 49 tahun. Wien menawarkan bioetanol produksinya kepada sopir angkutan kota. Hasilnya, para pemilik angkot di Sukabumi, Jawa Barat, kini rutin membeli bioetanol produksinya. Lima ratus liter bioetanol yang dihasilkan setiap hari diproduksi dalam 2 bentuk, yaitu dijual langsung dengan harga Rp8.000 - Rp10.000 per liter (sebanyak 400 liter) dan sisanya (100 liter), ia oplos dengan premium dan dijakakan Rp5.000 per liter. Porsi bioetanol hanya 10% alias E10. Campuran itu

⁶ Lihat di <http://industri.kontan.co.id/news/jepang-minati-bioetanol-dari-singkong-1>. Diakses tanggal 31 Mei 2010.

juga disebut gasohol (gasolin alkohol). Dari perniagaan bioetanol tersebut, alumnus Universitas Tarumanagara itu meraup omset Rp111 juta sebulan.⁷

Untuk memproduksi 1 liter bioetanol dibutuhkan 6,5 kg hingga 8 kg singkong (Hasniawati, 2010). Dengan menggunakan bibit singkong varietas unggul, Chairman Toba Group, Jenderal (Purn) Luhut B Pandjaitan, mengatakan bahwa singkong yang diolah tersebut menghasilkan Fuel Grade Ethanol (FGE) sebesar 99,5 persen. “Jika 90 persen premium dicampur 10 persen etanol, maka akan menghasilkan Pertamina Plus sehingga kami berharap produk ini akan menjadi energi alternatif pengganti BBM. Apalagi bahan bakunya sangat mudah ditemukan dan mudah tumbuh pada daerah kering,” terang Pandjaitan.⁸

Produksi tidak mungkin dilakukan tanpa penanaman. Inilah yang penulis amati di sebuah perusahaan bernama PT. EKM, yang sejak empat tahun terakhir (tahun 2008) mengembangkan usaha dengan menghasilkan beberapa produk energi terbarukan, termasuk diantaranya bioetanol. Untuk dapat memproduksi sebanyak sepuluh ribu liter setiap harinya, perusahaan mengandalkan panen singkong dari beberapa lokasi perkebunan, diantaranya di Cianjur (Kecamatan Cipanas dan Pacet). Lahan-lahan yang digunakan diakses dari pihak lain dengan cara menyewa, namun prosesnya tidak selalu sederhana karena untuk memperoleh akses tersebut, perusahaan harus berhadapan dengan pihak-pihak lain yang juga memiliki kepentingan terhadap lahan.

Fenomena inilah yang menarik minat penulis untuk mengkaji lebih jauh. Penelusuran terhadap hasil-hasil kajian tentang energi terbarukan menunjukkan bahwa isu tentang akses lahan masih sangat minim. Penelitian yang dilakukan oleh Stanley R dan Billman (2000: 7-8) tentang bioetanol misalnya, lebih memfokuskan pada manfaat yang dapat diperoleh dari produk energi terbarukan tersebut. Dalam artikel yang dipublikasikan jurnal *The Washington Quarterly*, kedua peneliti ini mengulas bahwa etanol digunakan sebagai bahan tambahan (hasil konversi ke dalam bahan tambahan lain yang disebut *ethyl tertiary-butyl ether*) yang digunakan untuk meningkatkan tingkat oktan dari bensin dan

⁷ Lihat di http://lampungbarat.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1193&Itemid=142. Diakses tanggal 4 Mei 2012.

⁸ Lihat di <http://singkonggajah.wordpress.com/2012/03/09/pabrik-bioetanol-berbahan-baku-singkong-diresmikan/>. Diakses tanggal 9 Maret 2012.

menghasilkan pembakaran yang lebih bersih sehingga tidak mengakibatkan polusi udara seperti penggunaan bahan bakar tidak terbarukan. Mereka kemudian menambahkan bahwa bahan baku yang digunakan untuk memproduksi bioetanol dapat ditekan dalam kurun waktu 2 dekade terakhir sehingga efisiensi biaya menjadi keunggulan dari produk ini.

Penelitian lain dilakukan oleh Wilkins (2002), yang hasilnya diterbitkan dalam buku berjudul *Technology Transfer for Renewable Energy: Overcoming Barriers in Developing Countries*. Wilkins tidak hanya membahas tentang kebutuhan negara-negara di dunia akan energi terbarukan (termasuk bioetanol) yang berasal dari berbagai sumber, tetapi juga menghubungkan antara energi terbarukan dengan isu-isu sosial, seperti gaya hidup, perempuan (jender), populasi, urbanisasi, dan kemiskinan. Ia juga memetakan potensi-potensi dan kendala-kendala yang dihadapi oleh negara-negara di berbagai kawasan (Amerika, Eropa, dan Asia) dalam mengembangkan energi terbarukan. Sementara teknologi diasumsikan sebagai salah satu aspek pendukung terciptanya energi terbarukan, disamping keterlibatan berbagai aktor seperti pemerintah, lembaga keuangan internasional, organisasi swasta, dan masyarakat dalam upaya pengembangannya.

Berbeda dengan peneliti-peneliti di atas yang optimis terhadap pemanfaatan energi terbarukan, Russi (2007) justru menyatakan bahwa negara-negara berkembang penghasil energi terbarukan, dalam hal ini *biofuel* (terutama dalam bentuk bioediesel) akan mengalami kerusakan lingkungan yang sangat serius. Mengapa demikian? Russi menganalisis bahwa pemanfaatan lahan berskala besar untuk memenuhi kebutuhan bioediesel yang tinggi akan mengakibatkan penggunaan pupuk dan pestisida dalam jumlah besar sehingga polusi, erosi tanah, berkurangnya keanekaragaman tumbuhan, dan menurunnya kualitas serta ketersediaan air, dipastikan akan terjadi.

Berdasarkan analisis tersebut, Russi (2007) berkesimpulan bahwa penanaman secara monokultur untuk bahan baku bioediesel bukanlah strategi yang disarankan bagi negara-negara berkembang. Menurutnya biodiesel bukan merupakan solusi atas permasalahan ketergantungan ekonomi dunia terhadap energi fosil (tidak terbarukan). Ide bahwa biodiesel merupakan solusi atas krisis energi, tidak hanya keliru tetapi juga berbahaya. Oleh karena itu, Russi

menawarkan satu solusi yang paling memungkinkan, yaitu memodifikasi pola-pola konsumsi kita (masyarakat) terhadap energi.

Pro dan kontra soal pengembangan energi terbarukan, khususnya bioetanol juga mewarnai diskusi para pihak yang berkepentingan (akademisi, pemerintah, swasta, dan masyarakat) di tanah air, namun penelitian ini tidak menyoroti hal tersebut. Penelitian lebih difokuskan pada isu akses lahan dalam konteks pengembangan energi terbarukan karena penulis mengamati bahwa akses terhadap lahan sangat erat terkait dengan upaya menjamin ketersediaan bahan baku bagi produksi energi terbarukan.

Produksi bioetanol yang masih dapat dilakukan oleh PT. EKM hingga saat ini dimungkinkan oleh ketersediaan bahan baku singkong yang mencukupi. Untuk menjamin pasokan bahan baku tersebut, perusahaan tidak hanya berupaya untuk memperoleh akses, tetapi juga mengendalikan dan memelihara aksesnya terhadap lahan. Oleh karena itu, untuk memahami mekanisme akses terhadap lahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan akses menurut Ribot dan Peluso (2003: 154) yang lebih khusus melihat pada isu tentang *siapa* (dan siapa yang tidak) yang memanfaatkan *apa*, dengan *cara-cara apa*, dan *kapan* (dengan kata lain dalam kondisi apa).

I. 2. Fokus Kajian

Akses yang dimiliki oleh para pihak (aktor) di lahan perkebunan singkong yang menghasilkan bioetanol di Cianjur menjadi fokus yang dikaji. Fenomena ini menjadi rumit karena tidak hanya melibatkan banyak aktor, tetapi juga berbagai kepentingan diantara mereka. Penelitian ini bermaksud untuk menjawab pertanyaan tentang akses lahan, para aktor yang terlibat dalam proses perolehan akses, dan relasi sosial yang terjalin diantara mereka. Tesis ini juga ingin menunjukkan bahwa masalah akses lahan merupakan bagian dari upaya pengembangan energi terbarukan di sebuah wilayah sehingga penting untuk dikaji secara antropologis. Untuk membantu mengarahkan penulisan supaya lebih terfokus, diajukan beberapa pertanyaan berikut.

1. Bagaimana perusahaan memperoleh dan menguasai akses lahan untuk dijadikan perkebunan singkong demi terpenuhinya target produksi bioetanol?
2. Siapa saja aktor yang terlibat dalam akses terhadap lahan-lahan yang dimanfaatkan sebagai sumber daya?
3. Bagaimana jejaring (*networking*) yang terbentuk diantara para aktor yang berperan dalam akses terhadap lahan-lahan yang diamati?

Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan mengantarkan penulis untuk mencapai pemahaman tentang akses yang dimanfaatkan oleh beberapa aktor sehingga mereka memperoleh keuntungan, memiliki hak, ataupun terbatas haknya dalam memanfaatkan sumber daya dan memetakan jejaring yang terbentuk diantara para aktor yang terlibat dalam akses terhadap lahan perkebunan yang menghasilkan bioetanol.

I. 3. Tinjauan Konseptual

I. 3. 1. Akses Lahan, Kepemilikan Lahan, dan Pendekatan Aktor

Sebagai sebuah konsep, Ribot dan Peluso (2003: 153) mengatakan bahwa “akses” lebih dari sekedar “hak untuk memperoleh keuntungan dari beberapa hal”. Akses merupakan “kemampuan untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu atau beberapa hal”. Merujuk pada definisi tersebut, akses lebih dilihat sebagai “ikatan yang terjalin dalam kekuasaan/*a bundle of powers*” sementara properti hanyalah “seikat hak-hak/*a bundle of rights*”. Dengan demikian, akses didefinisikan sebagai kemampuan untuk memperoleh keuntungan dari sesuatu, termasuk objek-objek/benda-benda, orang-orang, institusi-institusi, dan simbol-simbol. Ribot dan Peluso melalui tulisan ini membantu memetakan proses-proses dan hubungan-hubungan dinamis –menempatkan properti sebagai sekumpulan hubungan-hubungan akses diantara yang lain.

Kemampuan merujuk pada kekuasaan, di mana orang dapat mempengaruhi apa yang dilakukan (praktik) dan ide-ide orang lain dan kekuasaan selalu muncul dari, meskipun tidak selalu melekat pada orang. Akses menyangkut cara-cara atau alat-alat yang memungkinkan individu untuk mengambil

keuntungan dari sesuatu. Akses juga dilihat dalam pengertian yang lebih luas, seperti properti, *access relations* selalu berubah, tergantung pada posisi orang atau kelompok dan kekuasaan (*power*) di dalam hubungan-hubungan sosial yang bervariasi. Secara umum, orang memiliki kekuasaan lebih besar dalam beberapa hubungan tertentu daripada yang lain, atau di suatu masa historis dan bukan masa yang lain. Kondisi politik-ekonomi yang berbeda akan mengubah istilah-istilah akses sehingga akan mengubah individu atau kelompok dalam mengambil keuntungan terhadap sumber daya tertentu (Ribot dan Peluso, 2003: 154).

Istilah akses juga berhubungan erat dengan properti menurut Ribot (1998: 4) sebagai ‘*a right in the sense of an enforceable claim to some use or benefiting of something*’. Perbedaan krusial terletak pada istilah *ability* dan *rights*. Istilah hak berimplikasi pada klaim yang diakui berdasarkan dukungan masyarakat (baik melalui hukum, adat/*custom*, maupun *convention*). Bagaimanapun istilah “kemampuan” lebih luas daripada “hak”. Hak merupakan konsep yang bersifat menentukan (*prescriptive concept*) sedangkan kemampuan merupakan istilah yang menggambarkan (*descriptive term*).

Properti bersifat *de jure* sementara akses mencakup *de jure* dan *de facto* atau *extra-legal*. Mekanisme-mekanisme, struktur-struktur, dan hubungan-hubungan *extra-legal* melingkupi pemanfaatan sumber daya yang mencakup identitas sosial (status berdasarkan usia, jender, ataupun kebangsawanan), relasi-relasi sosial (pertemanan, keluarga, keturunan, ikatan historis antara individu dan kelompok yang seringkali berdasarkan identitas sosial), paksaan dan tipu daya, kekayaan materi (modal atau kemampuan finansial), atau kondisi fisik (lokasi) (Ribot, 1998: 4).

Aspek politik dan ekonomi dalam konsep akses yang diangkat Ribot dan Peluso (2003: 158-159) menjadi bukti ketika kita membedakan antara tindakan sosial ke dalam kendali akses dan pemeliharaan akses. *Access control* adalah kemampuan untuk menengahi/memediasi akses pihak lain. *Control* “...refers to the checking and direction of action, the function or power of directing and regulating free action”. *Maintenance of access requires expending resources or powers to keep a particular sort of resource access open*. Pemeliharaan dan kontrol menjadi saling melengkapi, keduanya merupakan posisi sosial yang secara

temporal terkristalisasi di sekitar makna sebuah akses. Keduanya merupakan hubungan-hubungan pokok diantara para aktor yang terlibat dalam penyisihan, pengelolaan, atau pemanfaatan sumber daya.

Ribot dan Peluso menambahkan bahwa pada saat yang bersamaan, makna-makna dan nilai-nilai sumber daya kemudian dikontestasikan oleh mereka yang mengendalikan dan memelihara akses. Ide tentang properti kemudian terdiri atas hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dapat dilihat sebagai dua hal yang berbeda secara paralel, di mana mengklaim hak-hak menjadi alat-alat untuk memperoleh *access control*, sementara eksekusi tugas atau kewajiban adalah bentuk dari *access maintenance* yang bertujuan untuk mempertahankan hak-hak tersebut. Dengan demikian, muncul konsep *gaining access*, yang disebutkan sebagai proses umum di mana akses ditentukan.

Untaian jejaring atau ikatan kekuasaan (*strand of webs and bundles of power*) kemudian menjadi alat-alat, proses-proses, dan hubungan-hubungan yang memungkinkan para aktor memperoleh, mengendalikan, dan memelihara akses terhadap sumber daya, yang kita sebut sebagai “mekanisme”. Mekanisme berdasarkan hak (*rights-based*) dan *illicit* dapat secara langsung memperoleh keuntungan-keuntungan. Sementara mekanisme-mekanisme struktural dan relasional dari akses termasuk atau akses yang diperkuat secara langsung melalui konfigurasi akses berdasarkan hak dan terlarang. Menurut Ribot dan Peluso (2003: 159-160) seseorang mungkin memiliki hak untuk mengambil manfaat dari tanah tetapi mungkin tidak mungkin melakukan itu tanpa memiliki akses terhadap tenaga kerja atau modal. Ini menjadi contoh dari memiliki properti (hak untuk memanfaatkan) tanpa akses (kemampuan untuk mengambil keuntungan).

Definisi tentang akses menurut Ribot (1998) serta Ribot dan Peluso (2003) memunculkan adanya aktor atau pelaku yang berhubungan langsung dengan lahan dan relasi sosial yang terjalin diantara para aktor tersebut. Ketika melakukan *access control* dan *maintenance*, keduanya memunculkan relasi-relasi yang pokok diantara para aktor yang terlibat dalam penyisihan, pengelolaan, atau pemanfaatan sumber daya. Pada saat yang bersamaan, makna-makna dan nilai-nilai sumber daya kemudian dikontestasikan oleh mereka yang mengendalikan dan memelihara akses.

Oleh sebab itu, penulis juga menggunakan pendekatan aktor yang digunakan oleh Mosse (2005: 5) untuk menjelaskan fenomena pembangunan⁹ di negara berkembang, salah satunya India. Ia mengaitkan antara konsep pembangunan dan wacana-wacana yang muncul (seperti kebijakan dan praktik-praktik yang dilakukan) dengan para aktor yang keberadaannya (dengan ide-ide, kepentingan-kepentingan, dan tujuan-tujuan mereka) tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk memelihara hubungan kekuasaan yang dimiliki “.....*development and its various discourse (that is policies and practices) have both institutional effects –maintaining relations of power- and ideological effects –depoliticisation*”.

Pendekatan etnografi baru yang ditawarkan oleh Mosse merupakan pendekatan dengan perspektif yang tidak tunggal/monolitik dalam melihat hubungan-hubungan dominasi, resistensi, dan hegemoni serta implikasi dari kesadaran yang keliru antara pihak yang dibangun dan yang membangun (2005: 6). Namun penelitian ini tidak menyoroti masalah pembangunan melainkan relasi sosial antaraktor yang terlibat dalam akses lahan di perkebunan singkong. Dari pengamatan dan penelusuran data terlihat bahwa dalam kasus yang diamati, masing-masing aktor memegang peran dalam menginterpretasikan hingga meluaskan ide, kepentingan, dan tujuannya sehingga muncul fragmentasi atau ketidaksepakatan di satu sisi dan kerja sama atau negosiasi di sisi lain.

Dalam analisisnya tentang *policy* dan *practice*, Mosse (2005: 35) menyebutkan adanya fleksibilitas tindakan dimana ketika digunakan untuk menarik minat dan dukungan, *project design* menjadi begitu rumit dan mengandung perspektif-perspektif yang kaku (*irreconcilable*) tetapi ketika *project design* digunakan untuk membujuk maka ia akan mengandung kesatuan, perpaduan, dan kesederhanaan. Fleksibilitas inilah yang memungkinkan para aktor yang memiliki kepentingan-kepentingan yang sama dapat “berkomunikasi” satu sama lain karena menginterpretasi dengan cara yang sama. Sementara aktor-

⁹ Mosse (2005: 2) menjelaskan bahwa dalam konteks pembangunan pertanian di India, kenyataan menunjukkan bahwa hal itu direncanakan oleh orang-orang Barat (Inggris) dan proses perencanaan *policy* yang akan digunakan dalam pembangunan dilakukan di Inggris dan bukan di negara yang akan dibangun. Namun lebih memprihatinkan lagi adalah dalam merencanakan *policy* tersebut, sama sekali tidak melibatkan warga masyarakat yang akan dibangun. Mereka diposisikan sebagai obyek dari pembangunan, yang dianggap bermasalah dan akan memperoleh penyelesaian masalah dari para ‘dewa’ pembangunan yaitu para konsultan asing yang terdiri dari orang-orang terpelajar yang memiliki segudang pengalaman dalam membangun sebuah masyarakat. Dari sini, muncul isu kekuasaan antara pihak perencana pembangunan dan masyarakat yang hanya menjadi obyek (pihak yang hanya pasif menerima).

aktor yang lain, akan menginterpretasikan dengan cara yang tidak sama dengan kelompok pertama tetapi memahami bahwa mereka memiliki satu tujuan yang sama.

Dari hubungan atau relasi yang dibangun para aktor melalui kolaborasi dan kompromi maupun fragmentasi dan perbedaan pendapat akan tergambar pemetaan yang begitu kompleks dan sarat dengan *power*. Seperti ungkapan Mosse (2005: 230) bahwa “*policy models are poor guides to understanding events and practices and effects of development actors, which are shaped by the relationships, interests, and cultures of specific organizational settings*”. Dalam hal ini, yang difokuskan adalah pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana para aktor membangun dan memelihara eksistensinya sehingga membentuk jejaring yang menghubungkan mereka dalam relasi sosial yang kompleks.

Sementara itu, isu lahan atau tanah telah menjadi perhatian para peneliti sejak era 1970-an. Ho (1970: 91) yang melakukan studi tentang *land ownership* dan prospek ekonomi pada masyarakat petani Malaysia menyebutkan bahwa tanah masih dianggap bentuk kekayaan yang terhormat bagi para petani yang tercerabut dari usaha ekonomi modern akibat kondisi yang terisolasi, pendidikan yang buruk, kurangnya teknik, dan persaingan etnis sehingga menjadikan tanah sebagai satu-satunya investasi tabungan yang produktif atau modal yang menguntungkan.

Penelitian tentang lahan juga dikaitkan dengan kondisi kemiskinan di pedesaan. Quan (2006: 57) menyebutkan bahwa pada masyarakat pedesaan di seluruh dunia tingkat kemiskinan terkait erat dengan tidak memiliki lahan dan akses memadai terhadap lahan. Hal ini ditandai dengan kasus-kasus ketimpangan akses pada lahan dan distribusi aset. Meskipun pertumbuhan (*growth*) dan pengurangan kemiskinan dapat terjadi pada keadaan yang timpang namun kesenjangan akses terhadap aset menghambat keseluruhan tingkat pertumbuhan dan justru memperburuk upaya pengentasan kemiskinan.

Quan (2006: 57) menambahkan bahwa salah satu tema dominan dari kebijakan pertanahan terakhir adalah bahwa hak properti memberikan dasar untuk investasi di tanah dan dengan demikian memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga memungkinkan pengurangan kemiskinan,

peningkatan akses dan jaminan keamanan pangan. Selain itu, akses lahan di daerah pedesaan memperkuat ketahanan pangan masyarakat miskin dan membuka peluang bagi kegiatan-kegiatan produktif.

Studi yang jauh lebih dulu dilakukan oleh Payer (1979: 293) juga membahas isu kepemilikan dan akses lahan yang dikaitkan dengan masalah kemiskinan masyarakat pedesaan di Dunia Ketiga. Ia menyebutkan bahwa jutaan orang yang memiliki bidang lahan pertanian yang sempit semakin terhimpit kemiskinan sehingga jauh dari hidup layak. Kebanyakan dari mereka lebih memilih bekerja sebagai penyewa lahan atau buruh yang menjual tenaga dengan harga murah setiap harinya. Strategi lain adalah menjual sebagian besar hasil pertaniannya kepada pemilik lahan. Dampak lanjutan dari ketiadaan lahan di desa adalah dorongan untuk mencari peluang di daerah perkotaan.

Masalah akses lahan juga menjadi penyebab konflik di Sub-Sahara Afrika menurut Huggins dan Pottier (2005: 383), yang mengkaji tentang kepemilikan dan reformasi lahan. Ia menyimpulkan bahwa akses lahan masyarakat miskin terbatas oleh proses-proses seperti pengalihan hak atas lahan dari sistem adat kepada segelintir kelompok (orang kaya), terjadinya proses fragmentasi, dan 'miniaturisasi' petak pertanian sebagai konsekuensi dari peningkatan populasi (di Rwanda dan Burundi), dan ketegangan antara sistem hukum adat dan negara. Temuan menarik lainnya menunjukkan bahwa cara-cara yang sewenang-wenang, tidak akuntabel, dan ilegal justru dilakukan oleh para agen negara sebagai pihak pengelola lahan di berbagai level pemerintahan.

Konflik antara masyarakat dan negara yang muncul karena masalah akses lahan juga telah dilakukan oleh Klatt (1972: 226-227). Ia menganalisis bahwa dalam masyarakat petani pribumi, kepemilikan lahan memisahkan pemilik dari penyewa dan buruh. Hubungan ini sangat potensial menjadi sumber konflik yang juga melibatkan para elit dan pihak-pihak yang memihak atau melawan kepentingan ekonomi tertentu, hak sosial, dan pusat-pusat kekuasaan. Konflik semacam ini tidak selalu dapat diselesaikan dengan cara pemerintah yang mereformasi kepemilikan lahan (*land tenure*) dan *land ownership*. Sementara penulisan Dale dkk (2006: 1) tentang akses lahan dan penyelesaian sengketa di Timor Leste juga mengindikasikan multi aktor yang berperan.

Sementara itu, penelitian Anton dan Warren (2003: 88-89) juga menunjukkan bahwa sejak era reformasi dimulai, telah terjadi kebangkitan dramatis berupa protes agraria di seluruh Indonesia. Ketika awal 1960-an, muncul kajian tentang petani dan sengketa lahan. Hal ini terkait dengan upaya penguasaan lahan perkebunan, pembangunan lapangan golf, dan pemanfaatan "tanah tidur" oleh para investor untuk tujuan spekulasi. Di Jawa Timur misalnya, menurut sumber Yayasan Lembaga Bantuan Hukum, ada lebih dari lima puluh tindakan petani yang melakukan *reclaiming* lahan yang disengketakan. Di Situbondo, ribuan kopi dan tanaman kakao hancur dan ditanami kembali dengan tanaman jagung dan kedelai oleh petani lokal di lahan-lahan yang telah disita (dijarah) oleh negara. Pada Jenggawah, sebuah perkebunan peninggalan Belanda dengan luas lebih dari tiga ribu hektar telah diambil alih oleh sebuah perusahaan tembakau perkebunan negara di bawah Hak Guna Usaha (HGU).

Di Sumatera Utara, dua ribu petani menuntut kembalinya 100.000 hektar lahan perkebunan yang dikuasai oleh perusahaan negara. Penjarahan atau perusakan tanaman perkebunan, seperti kopi di Jawa Barat, atau kakao dan gula tebu di Jawa Timur merupakan bentuk protes masyarakat lokal terhadap ketidakadilan negara. Penjarahan empat belas perkebunan milik negara yang kegiatan usahanya meliputi sekitar dua juta hektar lahan menyebabkan kerugian sebesar miliaran rupiah. Tindakan populer seperti itu juga berhubungan dengan upaya memenuhi kebutuhan subsisten setiap hari selama krisis. Sementara protes lainnya bertujuan untuk mendapatkan pembayaran tambahan untuk lahan yang sebelumnya diambil alih dengan harga yang tidak adil kompensasi (Anton dan Warren, 2003: 88-89).

Dari beberapa kajian tentang lahan yang telah dilakukan para peneliti menunjukkan bahwa lahan memiliki makna yang lebih dari sekedar tanah dengan luas tertentu. Lahan merupakan jaminan akan keamanan mereka karena itulah yang menjadi potensi regenerasi kehidupan, bukan sekedar "alat" untuk memperoleh keuntungan atau sumber daya hidrolik (Nash, 2001: 20). Lahan juga merupakan sumber utama makanan, pekerjaan, dan pendapatan di daerah pedesaan. Setiap tabungan, investasi pada lahan dan produktivitas, kesejahteraan keluarga, pendidikan anak, dan perbaikan kondisi hidup yang juga harus datang

dari pemanfaatan berkelanjutan lahan, melibatkan tanaman produksi dan bentuk lain dari ekstraksi alam (Ghimire, 1997: 420).

Dengan demikian, isu lahan tidak hanya menyangkut dimensi ekonomi (sumber kesejahteraan atau kemakmuran), tetapi juga dimensi sosial, budaya, politik, bahkan ideologi. Meskipun penelitian ini tidak memfokuskan pada masalah konflik atau sengketa pada lahan yang diamati namun isu tersebut menjadi bagian dalam pembahasannya, sementara isu akses dan kepemilikan lahan yang dibahas dalam penelitian ini terkait dengan isu pengembangan energi terbarukan, khususnya bioetanol.

I. 3. 2. Relasi Sosial dan Jejaring Aktor

Telah banyak penelitian antropologis tentang klaim atas sumber daya alam khususnya lahan. Dari penelusuran literatur yang dilakukan, perhatian para antropolog cukup besar pada isu lahan di area hutan. Peluso (1995) menjadi satu etnografer yang sangat baik menganalisis fenomena "*forest mapping*" yang dilakukan oleh banyak aktor, yaitu negara, perusahaan, masyarakat lokal. Dalam kompleksitas relasi sosial yang terjalin, Peluso juga menyebutkan adanya kontestasi kekuasaan diantara aktor-aktor tersebut.

Hasil penelitian Peluso (1995) menunjukkan bahwa banyak pihak merasa berhak untuk memanfaatkan dan mengelola hutan sehingga muncul klaim atas wilayah atau teritori tertentu. Meskipun diakui bahwa masyarakat sekitar hutan memiliki hak adat atas hutan, tetapi para perencana pengelolaan hutan hanya menitikberatkan pada hak-hak wilayah (*territorial rights*) masyarakat pada wilayah-wilayah tertentu yang merupakan "pertanian permanen" dan jenis-jenis tanaman hutan tertentu sehingga hak adat tidak diakui sebagai sebuah entitas wilayah (*territorial entities*). Sedangkan di sisi lain, negara mengklaim dirinya sebagai yang berhak mengeksploitasi hutan dengan cara apapun, termasuk melakukan konsesi dan menanam jenis-jenis pohon tertentu untuk kepentingannya. Kedaulatan ini dilegitimasi oleh peraturan-peraturan yang dibuat sehingga muncul pengalihan lahan dari hutan produksi menjadi konservasi, transmigrasi menjadi otoritas pemukiman, dan Departemen Pertanian.

Belum lagi klaim yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan HPH, yang berdasarkan data kuantitatif penulisan FAO tahun 1990, mengupayakan sekitar 43,3 juta hektar dari 57,9 juta hektar luas hutan tanpa mementingkan kondisi fisik hutan sehingga dapat dibayangkan apa yang terjadi setelah bertahun-tahun manajemen seperti ini diberlakukan. Sementara itu, pemerintah terus melakukan upaya untuk melegitimasi pemetaan yang dibuatnya dengan melibatkan para akademisi pertanian, pekerja publik, dan agrarian untuk menentukan area-area yang potensial terjadi erosi, hujan, dan longsor, yang diatur dalam Tata Guna Hutan Kesepakatan, tanpa menyebutkan adanya masyarakat yang tinggal di sekitar hutan (sebagai pihak yang seharusnya dinklusi) (Peluso, 1995).

Hasil penelitian lain yang menunjukkan tentang aktor-aktor di balik pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam adalah tulisan Tsing (1999). Secara khusus, ia mengaitkan pengelolaan sumber daya alam dan konflik seputar pengelolaan tersebut. Konflik yang muncul menurutnya adalah “budaya”, tidak hanya karena mempertentangkan perspektif, nilai-nilai, dan cara-cara hidup satu sama lain, tetapi juga menunjukkan “mobilisasi” dari posisi yang dimiliki seseorang, yang itu merupakan formulasi dan reformulasi dari masalah yang ada, kelompok-kelompok yang terlibat, dan bentuk-bentuk yang diinginkan dari representasi melalui argumen yang ada. Proses ini melibatkan cara-cara seseorang dan yang lainnya untuk mengetahui dan melakukan tindakan terhadap alam. Mobilisasi budaya, bagaimanapun tidak dibatasi oleh gerakan-gerakan transformatif kesadaran pribadi. Hal itu dapat melibatkan reaksi-reaksi defensif atau mempertahankan diri untuk *challenges imagined* sebagai paksaan sosial atau perubahan yang tidak diharapkan.

Kajian lainnya ditulis oleh Paulson dkk (2003). Dalam distribusi sumber daya yang asimetris dan beresiko dimungkinkan terbangunnya relasi sosial di mana terdapat kekuasaan dalam interaksi diantara hubungan tersebut dan proses yang melibatkan orang, tempat, dan sumber daya. Selain itu, Paulson dkk pun menyatakan bahwa politik berkaitan dengan lingkungan yang mekanismenya tampak melalui kekuasaan dan fenomena biofisik secara teori dan praktis. Oleh karena itu, mereka menggunakan model riset *multiscale* yang membahas fenomena dalam proses sosial baik secara lokal, regional, dan global. Sementara

metode riset dan praktis yang sensitif terhadap perbedaan hubungan dan kekuasaan diantara kelompok sosial menjadi rekomendasi yang dapat digunakan.

Dalam kajiannya tentang sengketa lahan, Biezeveld (2004: 137) pun menyebutkan adanya kepentingan dan cara yang berbeda dari para pihak yang menafsirkan adat dan hal ini menyebabkan status banyak lahan menjadi tidak jelas. Tanah komunal menjadi terancam (*insecure*) lepas dari masyarakat adat semenjak konsep tentang komunitas dan hak atas lahan mengalami perubahan. Hingga saat ini, sistem hukum Indonesia masih merupakan salah satu pluralisme hukum (*legal pluralism*) yang jelas dengan adat, hukum negara, hukum agama yang diakui oleh negara. Namun hak milik masih merupakan sumber ketidakamanan besar di negeri ini. Dengan UU Pokok Agraria Tahun 1960 dan Konstitusi Tahun 1945, pemerintah telah memberikan dirinya sendiri hak untuk mempertentangkan hak-hak desa terhadap sumber daya alam, termasuk lahan komunal dan sumber air atas nama kepentingan umum. Hal ini menimbulkan berbagai konflik di mana, hingga saat ini, suara dari penduduk desa diredam oleh para elit penguasa.

Sementara Zazali dan Oktavian (2008: 1) mengatakan bahwa konflik sumber daya alam terjadi bukan hanya karena benturan kepentingan para pihak dalam praktik di lapangan, melainkan juga dipicu oleh kebijakan negara yang memang belum mengakomodir secara serius klaim pengelolaan sumber daya alam secara adat atau tradisional oleh berbagai komunitas lokal yang hingga kini masih mewarisi tradisi penguasaan lahan secara turun temurun baik individual maupun komunal. Pola penguasaan dan pemilikan ini memang tidak sama dengan standar hukum pertanahan formal yang didasarkan atas sertifikat kepemilikan, akibatnya terjadi benturan serius hukum positif dengan hukum adat / turun-temurun / tradisional masyarakat dalam mengelola tanah hutan.

Begitu kompleksnya isu pemanfaatan dan pengelolaan lahan menunjukkan bahwa pemanfaatan lahan tidak hanya mencerminkan urgensi spasial dari fungsi masyarakat, tetapi juga kekuatan politik, diferensiasi kelas, struktur penguasaan, dan respon terhadap pengembangan teknologi (dalam kasus-kasus tertentu). Analisis lahan, kepemilikan, transmisi, dan penggunaannya dapat berfungsi sebagai peta relasi sosial dan ekonomi yang mencerminkan interaksi dan oposisi

faktor struktural dan spasial (McTaggart, 1982: 295). Hal ini pula yang muncul pada perkebunan singkong yang menjadi lokasi pengamatan. Fenomena kepemilikan dan akses terhadap lahan tersebut menjadi menarik karena sebelum mencuat wacana tentang energi terbarukan yang dapat dihasilkan dari tanaman, mungkin tidak terbersit di benak individu (pengusaha) untuk melakukan investasi pada singkong.

Studi Toulmin (2011: 16) yang mengaitkan antara isu produksi energi terbarukan dan investasi pada lahan pertanian menunjukkan bahwa investasi lahan dalam skala besar melibatkan sistem global terhadap kepentingan yang kompleks. Investasi bisa terjadi secara langsung maupun tidak, internasional dan domestik, produktif dan spekulatif, serta melibatkan perusahaan, publik, dan investasi petani. Pemain langsung termasuk perusahaan menjadi pihak yang mencari lahan untuk menanam pangan, pakan dan bahan bakar nabati sedangkan pemain tidak langsung seperti manajer dana pensiun, kelompok perumahan (*real estate*), dan modal keuangan, dapat mencari tanah sebagai aset tambahan dalam portofolio yang lebih luas.

Namun Klatt (1972: 228) dalam studi klasiknya mengingatkan bahwa tidak seperti hibah alam lainnya, lahan atau tanah hampir tidak bisa dihancurkan, tetapi hanya tersedia dalam batas yang cukup ketat yang ditentukan oleh alam. Benar bahwa lahan dinilai sangat luas di berbagai kondisi aktivitas manusia, tetapi penggunaannya dibatasi oleh keterbatasan iklim dan jarak. Dengan demikian, meskipun lahan pertanian di Kecamatan Cipanas dan Pacet, Kabupaten Cianjur, tergolong subur sehingga PT. EKM memanfaatkannya untuk berinvestasi menanam singkong, tetapi seperti diakui oleh para informan dalam penelitian bahwa upaya yang telah dilakukan dalam dua tahun terakhir, membutuhkan keseriusan terutama dalam pemeliharaan tanaman demi tercapainya produktivitas yang ditargetkan.

Meskipun lahan perkebunan singkong menjadi lokasi pengamatan dalam penelitian ini, tetapi penulis tidak memfokuskan pada aspek teknis investasi yang ditawarkan oleh PT. EKM melainkan pada isu akses dan kepemilikan lahan yang ditanami singkong tersebut. Seperti telah disebutkan bahwa penulis juga memperhatikan “gerak” para aktor yang saling berhubungan satu sama lain

sehingga membentuk relasi sosial. Untuk itu, penulis menggunakan perspektif yang ditawarkan Kottak (1999: 25) untuk mencari keterkaitan (dan persinggungan) antara fenomena yang terjadi di level lokal, nasional, internasional, bahkan global.

Perubahan dalam hal kepemilikan dan akses lahan di lokasi yang diamati pun tidak dapat dilepaskan dari kepentingan pihak-pihak luar. Penelitian Mafianos (2006: 73-74) menunjukkan bahwa pola kepemilikan lahan petani berubah setelah pembangunan fasilitas pariwisata Kota Bunga.¹⁰ Perubahan itu bervariasi, ada petani yang sebelum pembangunan fasilitas memiliki lahan luas, namun setelah pembangunan fasilitas pariwisata, petani tersebut tergolong menjadi petani yang memiliki lahan sedang, atau justru sebaliknya. Perubahan tersebut terjadi disebabkan beberapa faktor, salah satunya yaitu tingkat harga jual lahan. Tingkat harga jual lahan yang didapatkan petani bervariasi tergantung lokasi lahan, kegunaan lahan, masa penjualan, dan keahlian petani dalam hal tawar menawar harga jual lahan. Akibat perubahan pola tersebut, para petani yang seluruh lahannya terjual kemudian menjadi petani penggarap.

Penelitian yang melihat relasi sosial antara para aktor yang terlibat dalam masalah kepemilikan dan akses lahan perkebunan juga tidak bisa mengabaikan keberadaan para penggarap yang meskipun tidak memiliki legalitas dalam mengelola sebidang lahan (karena dimiliki oleh seseorang), tetapi pada kenyataannya memiliki akses terhadap lahan tersebut. Akses tersebut diperolehnya dari pihak-pihak tertentu dengan kepentingan tertentu pula. Dengan demikian, isu akses dan kepemilikan lahan tidak mungkin hanya mengamati komunitas tunggal atau “kebudayaan” yang diperlakukan sebagai entitas yang terisolasi dan unik sebagai unit analisisnya, tetapi pada hubungan (*linkages*) dan arus manusia, teknologi, *images*, informasi, dan dampak dari kekuatan dan status yang terdeferensiasi dalam dunia postmodernisme saat ini yang ditemukan pada entitas-entitas lokal, seperti yang dikatakan oleh Kottak (1999: 25)

World-systems sebagai konsep juga digunakan untuk menjelaskan kerumitan relasi sosial yang muncul dalam fenomena yang dikaji. Mauro (2009: 119-120) mengatakan bahwa premis utama dari perspektif ini adalah perubahan

¹⁰ Kawasan Pariwisata Kota Bunga berada di Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Penelitian untuk tesis juga dilakukan di lokasi pertanian di desa ini.

sosial dalam masyarakat tertentu tidak dapat dijelaskan melalui dinamika internal semata, tetapi dengan memahami bagaimana masyarakat saling berhubungan dengan pihak lain dalam mengubah cara dalam world-systems, sebagai bagian dari keseluruhan perubahan. Ini berarti bahwa skala (setidaknya sosial) itu tidak statis, namun dibentuk melalui jaringan relasi sosial (lihat Bridge, 2002: 372 dalam Mauro, 2009).

Kenyataannya, skala dari ekonomi dunia kapitalis khusus telah meningkat secara historis, tidak seperti world-system lainnya, untuk menutupi seluruh dunia fisik, sebagaimana disebutkan di atas. Skala besar yang sering disebut sebagai "global" telah diproduksi melalui ekspansi kapitalis. Akibatnya, penelitian world-systems memfokuskan pada efek-efek dari dinamika world-systems pada proses internal di masyarakat (subsistem) yang membentuk itu (pada akhirnya, semua aktor manusia di dalamnya) dan pengaruh perubahan dalam masyarakat dalam world-systems pada keseluruhan karakteristik dari world-systems itu sendiri (lihat Hall, 2000: 5-6 dalam Mauro, 2009).

Lebih lanjut, Mauro (2009: 119-120) menegaskan bahwa tanpa berupaya mereduksi fenomena sosial bagi proses skala makro, pendekatan world-systems mempertimbangkan dan berusaha untuk mengintegrasikan potensi semua skala yang memungkinkan dan aspek-aspek dari relasi sosial, budaya, politik, dan ekonomi (lihat Tomich, 1990; Wallerstein, 2000 dalam Mauro, 2009). Informasi historis memperhitungkan proses-proses world-systems sesuai dengan pemahaman tentang skala geografi manusia terbaru sebagai konstruksi sosial, sebagai produk dari relasi kekuasaan (lihat Marston, 2000 dalam Mauro, 2009).

“Pandangan antropologis dari the world-system” menurut Nash (1981: 393-413) dalam Forte (1998: 67) telah menaruh perhatian pada dampak dari institusi-institusi global dalam area-area *peripheral* dan *semiperipheral*, “*more than with the system itself*”. Nash juga mengatakan bahwa antropologi selalu memperhatikan lingkup dunia semenjak “perbatasan memajukan perdagangan Eropa dan koloni” menjadi stimulus dalam penelitiannya. Saat ini kepentingan (penelitian) antropologis di dunia dibedakan berdasarkan “paradigma dari integrasi manusia dan kebudayaan di dalam sistem kapitalis dunia”, sebuah pendekatan yang “dipupuk oleh Wallerstein”.

Namun yang tidak boleh dilupakan adalah catatan tentang kritik antropologi terhadap pendekatan tersebut, yaitu bahwa mereka tidak melibatkan penolakan terhadap paradigma world-systems melainkan modifikasi. Ada sebuah aktivitas “mengumpulkan *reservoir* dari studi-studi kasus” dalam antropologi, dikembangkan dalam konteks perubahan global, dalam kesadaran tentang “respon-respon dialektik dari kekuatan-kekuatan global yang membentuk kebudayaan-kebudayaan “tribes” dan “primitif”.” Seperti tugas yang diidentifikasi oleh Wolf (1994b: 10 dalam Forte, 1998), yaitu terutama pada kemiripan dan variabilitas pemahaman tentang kebangkitan ekonomi kapitalis dunia (Forte, 1998: 67).

Dengan demikian, keputusan perusahaan untuk menanam singkong di beberapa area lahan di sebuah kawasan juga tidak terlepas dari relasi antara pihak perusahaan dengan pihak-pihak lain di luar dirinya. Kebutuhan pasar akan bioetanol khususnya dan biofuel pada umumnya juga semakin besar sejalan dengan pertumbuhan industri di Indonesia. Namun pemanfaatan biofuel sebagai energi alternatif yang dianggap lebih berkelanjutan daripada bahan bakar fosil (*fossil fuels*) menjadi wacana yang kian menguat terutama ketika masyarakat di dunia global semakin resah akibat ketersediaan energi yang kian hari kian menipis. Memanfaatkan lahan menjadi salah satu pilihan yang rasional untuk mewujudkan pencapaian produksi bioetanol yang berkelanjutan. Perhatian pada isu akses dan kepemilikan lahan memberikan sebuah perspektif dalam kajian tentang pengembangan energi terbarukan khususnya bioetanol di Indonesia.

I. 4. Proses Penelitian

I. 4. 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan sebuah etnografi. Seperti disebutkan oleh Have (2004: 5-7) bahwa etnografi melibatkan pengamatan yang dekat dengan peristiwa yang aktual, situasi-situasi yang ‘alami’ dalam kehidupan manusia, dan upaya meminimalisasi dampak kehadiran penulis dalam tindakan-tindakan yang dilakukan subjek penulisannya. Etnografi juga sering disebut dengan ‘pengamatan partisipasi/*participant observation*’ atau ‘*fiedwork*’. Salah satu syarat yang penulis coba penuhi adalah melakukan penelitian lapangan untuk

mendapatkan data-data primer dari para informan, selain mengamati gejala secara langsung.

Dalam proses ‘mengenali’ konteks penulisan (tidak hanya kondisi fisik lokasi tetapi juga situasi, kondisi, dan segala hal yang terkait dengan proses penulisan lapangan), penulis pun merasa bahwa ini merupakan penelitian yang cukup menantang mengingat penelitian tentang akses pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam merupakan pengalaman yang baru. Meskipun secara geografis, lokasi penulisan dapat dicapai dalam waktu sekitar 2-3 jam dari Jakarta (Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur) tetapi suasana asing yang belum pernah penulis jumpai sebelumnya menyebabkan penulisan ini terasa penuh petualangan (*adventurous*)¹¹.

Namun yang penting dalam penelitian bukanlah pada sisi *adventurous* yang dirasakan, tetapi memaknai simbol yang ditemukan dengan melakukan interpretasi dari pandangan-pandangan masyarakat (emik). Langkah ini pula yang coba penulis jalani, yaitu dengan cara mencari informasi langsung dari para pelaku dalam konteks penelitian, yaitu aktor-aktor yang berperan dalam masalah kepemilikan dan akses lahan yang ditanami singkong untuk bioetanol maupun biokerosin, yaitu pemilik PT. EKM, manajer dan koordinator perkebunan (disebut juga koordinator lapangan), pemilik lahan, dan para penyewa lahan (petani penggarap). Dari penelusuran informasi dan pengamatan, penulis pun menemukan bahwa ada aktor lain yang juga berperan dalam memperumit masalah akses terhadap lahan, yaitu para *biong*.¹²

Dengan demikian, data yang dibutuhkan dalam penulisan adalah data tentang aktor-aktor yang terlibat, mekanisme dan kegiatan yang dilakukan oleh para aktor, pengetahuan dan makna dari pengetahuan yang dihasilkan, serta implikasi yang dimunculkan dari relasi antaraktor yang membentuk jejaring (*networking*). Pencarian data akan diarahkan pada pemetaan mengenai siapa saja

¹¹ Seperti digambarkan oleh Peacock (1986) bahwa dalam proses penelitian etnografi, banyak tantangan yang dirasakan oleh peneliti/etnografer terutama terkait dengan suasana dan situasi, orang-orang, dan kondisi yang asing yang bias jadi sama sekali berbeda dengan yang biasa dihadapi oleh etnografer yang bersangkutan. Hal inilah yang dikatakan oleh Peacock sebagai sisi “*adventurous*” bagi etnografer.

¹² Istilah lokal yang digunakan untuk menyebut makelar tanah, yaitu orang-orang yang memperjualbelikan tanah. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Pak Engkos (Januari dan Februari 2012) disebutkan bahwa keberadaan para *biong* ini berkontribusi memperumit relasi sosial antara pemilik lahan, penggarap, dan perusahaan (PT. EKM) yang mengupayakan produktivitas lahan.

individu maupun institusi yang terlibat dalam akses terhadap lahan, dan berbagai argumen serta perdebatan yang muncul terkait dengan proses yang diamati. Kolaborasi atau implikasi dari jejaring yang terbentuk dan berbagai mekanisme yang digunakan untuk menghasilkan pengetahuan dan bentuk-bentuk *influence*, juga menjadi bagian dari pemetaan yang dilakukan.

I. 4. 2. Kerja Lapangan: Pengamatan dan Wawancara Mendalam

Informasi tentang perkebunan singkong di lokasi Cipanas (Kabupaten Cianjur) diperoleh penulis dari seorang rekan di PSDR LIPI.¹³ Ketika itu, penulis sedang dalam proses mencari topik penulisan yang berhubungan dengan isu energi terbarukan. Rekan tersebut menginformasikan bahwa ada sebuah iklan yang dipasang pada Majalah Trubus tentang penawaran investasi pada perkebunan singkong untuk menghasilkan bioetanol. Informasi inilah yang menarik minat penulis untuk menelusuri keberadaan perkebunan tersebut.

Untuk dapat mencapai lokasi perkebunan, hal pertama yang dilakukan penulis adalah mencari informasi tentang nomor telepon pihak perusahaan (PT. EKM) sehingga penulis dapat mengetahui lokasi kantornya. Setelah berhasil menghubungi salah satu pihak perusahaan (sekretaris pimpinan) bernama Lia, penulis kemudian memperkenalkan diri sebagai mahasiswa pascasarjana antropologi UI yang sedang menyusun tesis dan beberapa hari kemudian penulis berhasil mendatangi kantor PT. EKM di Bogor. Dari Lia, penulis memperoleh dua nomor *handphone* yang dimiliki oleh manajer lapangan bernama Pak Heru¹⁴ dan seorang koordinator lapangan bernama Pak Asep.¹⁵ Selanjutnya penulis menghubungi Pak Heru dan memberitahukan rencana penulis untuk mendatangi lokasi perkebunan.

Sejak penelitian awal yang dilakukan pada bulan September 2011, penulis telah membangun hubungan dengan Pak Heru dan Pak Asep dengan mempertimbangkan bahwa keduanya adalah pihak-pihak yang setiap hari berada di lapangan sehingga mengetahui dengan baik kondisi di lapangan (perkebunan).

¹³ Pusat Penelitian Sumber Daya Regional, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia yaitu institusi tempat penulis bekerja.

¹⁴ Nama informan kunci disamarkan. Selanjutnya digunakan demikian.

¹⁵ Ibid.

Dengan demikian, keduanya menjadi informan kunci dalam penelitian. Selain itu, ada pula pihak-pihak yang terkait dengan masalah penulisan, yaitu pemilik lahan atau orang yang lahannya disewa oleh perusahaan (ada kerja sama), petani penggarap yang memanfaatkan lahan, makelar tanah (*biong*), dan tentu saja pimpinan PT. EKM. Di sisi lain, penulis juga membutuhkan informasi dari pihak pemerintah desa dan institusi yang membidangi masalah pertanahan (Badan Pertanahan Nasional/BPN Kabupaten Cianjur).

Untuk mendapatkan informasi yang langsung dan lengkap tersebut, penulis harus mempelajari tidak hanya teknis (metode) tetapi juga metodologi etnografi. *Doing fieldwork* merupakan serangkaian kegiatan dan praktik yang berdasar pada pencelupan (*immersion*) dan pengumpulan data di lapangan melalui investigasi yang luas dan lengkap (Castañeda, 2006). Dengan demikian, penelitian lapangan yang diteruskan pada bulan Januari hingga April 2012 dengan cara mendatangi lokasi dan menginap selama dua hingga tiga minggu kemudian kembali ke Jakarta untuk menelusuri literatur, dan kembali lagi ke lokasi untuk penelitian lapangan setelah seminggu setelahnya. Hal ini dilakukan secara reguler sehingga penulis memiliki cukup waktu untuk beradaptasi dengan *site* penulisan, termasuk membangun *rapport* yang baik dengan informan. Kesempatan untuk menggali informasi dapat diperoleh termasuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan proses yang menjadi fokus pengamatan.

Mempertimbangkan pada kondisi di dua lokasi perkebunan yaitu Barudawa 2 dan Sampalan (di Kecamatan Cipanas dan Pacet)¹⁶ yang menunjukkan bahwa masalah pada akses lahan oleh PT. EKM cukup rumit, maka penulis memfokuskan pengamatan di kedua lokasi tersebut. Pengamatan lebih intensif dilakukan setelah penulis memperoleh informasi tentang masalah akses dan kepemilikan lahan dari beberapa pihak (selain Pak Asep). Berdasarkan informasi yang penulis kumpulkan, dibandingkan dengan 4 lokasi lainnya (yang letaknya berbeda kecamatan), kedua lokasi ini paling “bergejolak” (meminjam istilah yang digunakan Pak Asep) karena isu akses dan kepemilikan lahan yang mengemuka cukup kompleks. Hal ini tentu tidak terlepas dari pengalaman Pak

¹⁶ Disebut KUD (Barudawa 2) karena menurut informasi yang diperoleh dari Pak Asep, lahan ini diklaim oleh sebuah organisasi yang menamakan dirinya sebagai KUD sedangkan Sampalan adalah lokasi yang letaknya bersebelahan dengan Barudawa 2 dan diklaim milik Pak Iw (seorang pengusaha yang tinggal di Jakarta).

Asep sebagai koordinator lapangan yang telah bergabung sejak awal PT. EKM mencetuskan program penanaman singkong.

Selama penelitian lapangan, dibutuhkan pula beberapa material tambahan yang berfungsi untuk mempermudah proses penyimpanan data wawancara seperti buku catatan, alat rekam (*recorder*), dan kamera digital. Hal ini berdasarkan pada kesadaran penulis sebagai manusia yang memiliki keterbatasan untuk mengingat segala peristiwa yang dialami sehingga alat-alat tersebut berguna untuk mengembalikan ingatan ketika menuliskan kembali catatan lapangan. Penulis pun mengingat apa yang dituliskan Peacock (1986) bahwa dalam observasi partisipasi, seorang penulis tidak dapat hanya *hang around* dan *get absorbed* melainkan harus merekam, menggambarkan, menganalisis, dan merumuskan formulasi sebuah kebudayaan yang ditelitinya.

Sebagai bagian dari metode etnografi, wawancara mendalam menjadi hal yang penting untuk “menangkap” segala bentuk ekspresi, emosi, termasuk di dalamnya pengetahuan yang tersimpan di benak informan. Selain itu, pengamatan terlibat (dengan mengikuti berbagai kegiatan) yang dilakukan bertujuan untuk memahami setiap sikap, perilaku, maupun simbol-simbol yang dimunculkan, yang melatarbelakangi setiap keputusan yang diambil. Dinamika hubungan antar aktor pun akan “terekam” apabila penulis melakukan pengamatan terlibat. Namun sumber data lain yang tidak kalah penting berperan dalam proses penulisan adalah pengumpulan dokumentasi dalam berbagai bentuk, seperti surat perjanjian atau kontrak, segala bentuk peraturan menyangkut bioetanol, ataupun gambar-gambar yang menunjukkan segala aktivitas yang dilakukan.

Setiap kejadian atau peristiwa penting untuk dicatat oleh penulis dalam *fieldnotes*. Ini pula yang menarik dari penulisan etnografi, bahwa seorang penulis tidak hanya dituntut untuk selalu jeli terhadap hal-hal yang rinci/detil tetapi juga harus mampu menuangkan hasil pengamatannya ke dalam sebuah deskripsi sehingga mampu “berbicara” dengan para pembaca etnografinya. Tidak hanya mampu menjelaskan, tetapi juga harus bisa bercerita. Seperti dikatakan oleh Wolf (2001) bahwa dalam proses itu, penulis membuat catatan rinci mengenai siapa yang melakukan atau mengucapkan apa, kapan, di mana, kepada siapa, dan dengan siapa. Namun yang ditekankan Wolf adalah sangat mungkin penulis tidak

cukup mengetahui sesuatu yang dilihat atau didengarnya hingga ia mulai menanyakan pertanyaan-pertanyaan bermakna.

Formulasi ini yang kemudian menjadi sebuah etnografi, yaitu sebagai hasil dari *fieldwork* yang dilakukan selama kurun waktu tertentu. Mirip dengan kegiatan yang dilakukan seorang reporter, seperti dikatakan Fetterman (1989) bahwa etnografer juga menginvestigasi sebuah peristiwa, mewawancarai orang-orang yang terkait dengan topik yang dibahas, mereview hasil rekaman yang dihasilkan, mempertemukan pertentangan-pertentangan diantara informan yang diwawancara, memfokuskan pada kepentingan-kepentingan dan organisasi-organisasi tertentu untuk dipahami, dan menuliskan hasilnya untuk perkembangan akademis. Oleh karena itu, setelah penelitian lapangan dilakukan, tugas penulis selanjutnya adalah menganalisis data-data yang diperolehnya dengan menggunakan kerangka pemikiran (berupa konsep, teori, dan hasil kajian terdahulu) yang sesuai dengan fokus penelitian sehingga menghasilkan sebuah narasi yang berisikan eksplanasi atas fenomena yang diteliti.

I. 4.3. Analisis Data

Setiap kejadian yang ditemukan di lapangan terkadang berbeda dengan apa yang dibayangkan sebelum penulis penelitian lapangan. Etnografi yang diawali dengan *encounter* kemudian diproses dengan interpretasi. Interpretasi ini mencakup nilai-nilai, ide-ide, dan pengalaman-pengalaman yang maknanya tidak langsung terlihat sehingga penulis harus mencari pola-pola dan prinsip-prinsip di balik makna tersebut. Melalui interpretasi, penulis dapat memformulasikan pola kebudayaan untuk memahami percakapan yang dilakukan. Dalam hal ini, kebudayaan bukanlah hal yang tetap/*a fixed thing*, tetapi merupakan formulasi yang dinegosiasikan, definisi yang senantiasa berubah yang dapat menjelaskan peristiwa dan keadaan, baik bagi aktor (pemilik kebudayaan) maupun penulis/etnografer (Peacock, 1986). Untuk memahami kebudayaan subyek penulisannya, penulis juga harus memiliki landasan teoritis dan paradigma yang jelas dalam menganalisis data-data yang diperolehnya.

Setelah memperoleh data lapangan dan mencatatnya dalam *fieldnotes*, penulis membutuhkan alat analisis yang tepat. Beberapa konsep kunci yang telah

penulis munculkan selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan kerangka teoritis yang relevan dengan masalah penulisan yang diajukan. Seperti halnya sebuah proses yang dijalani, penulisan etnografi ini juga dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut, yaitu dimulai dengan sebuah masalah (*problem*), teori atau model, rancangan penulisan, kumpulan teknik untuk memperoleh data spesifik, alat-alat analisis, dan gaya menulis yang khas. Penulis juga memulai penulisannya dengan *bias-bias* yang dapat berfungsi positif maupun negatif tentang masyarakat yang ditelitinya. *Bias* yang negatif dapat dihindari dengan triangulasi (tindakan yang mengonfirmasi pihak-pihak yang diwawancarai), kontekstualisasi, dan orientasi tanpa penilaian (*non-judgemental*) (Fetterman, 1989).

Pikiran yang terbuka juga memungkinkan penulis untuk mengeksplorasi data secara kaya, data yang tidak terekam tetapi bukan yang ada di luar rancangan penulisan yang telah disusun. Etnografi juga memungkinkan interpretasi yang bersifat multipel dan berdasarkan pandangan emik (bersumber dari informan/masyarakat yang diteliti). Etnografer dalam hal ini juga menjalankan peran selain sebagai pencerita atau *storyteller* dan ilmuwan karena etnografi memadukan antara ketrampilan menulis dan analisis ilmiah. Tulisan ini mengkombinasikan semua unsur yang diperlukan untuk menyusun sebuah etnografi, mulai dari teori atau model yang dijadikan gambaran etnografer sebelum memulai penulisan lapangan hingga alat analisis yang direkomendasikan untuk digunakan para etnografer (Fetterman, 1989). Dengan demikian, produk dari penulisan etnografi yang juga menjadi perhatian penulis adalah tulisan etnografi yang tidak hanya berisi narasi atau deskripsi tetapi juga eksplanasi yang menuntut kemampuan penulis untuk menganalisis masalah penulisan yang diajukan.

Tentu saja proses ini tidaklah mudah untuk dijalankan. Selain membutuhkan keterampilan penulis, etnografi juga membutuhkan waktu yang cukup (tentatif tergantung masalah penulisan yang diajukan) serta kesabaran dan ketelatenan dalam menulis. Untuk menghasilkan sebuah karya etnografi, Jackson (2008) mengingatkan bahwa etnografi berbeda dengan biografi. Dalam hal ini, ia mengkritik dikotomisasi yang dibuat sehingga ada yang khusus dan kolektif, individual dan kelompok, lokal dan global, dalam domain yang terpisah secara

ontologis. Masalahnya terletak pada *percepts* dan *concepts* –hubungan antara pengalaman empiris di satu sisi dan kemampuan penulis untuk menteorisasi, merasionalisasi, menaratifisasi, dan mengintepretasi, di sisi lain.

Secara metodologis, prinsip utamanya bukan pada relata –individu atau masyarakat- tetapi pada apa yang disebut Arendt sebagai “the subjective in-between” dan *the intermediate space* dari kepentingan dan interaksi manusia. Salah satu makna yang diangkat adalah kebudayaan bukanlah sesuatu yang bersifat siap-pakai (*ready-made*), komposisi kebiasaan yang ada di mana-mana, makna-makna, dan praktik-praktik yang ada di dalam individu atau di dalam lingkungan, tetapi sebagai *a potentialiaty*, aspek-aspek yang akan disadari dan dirasakan secara variatif dalam hubungan interaksi kita dengan orang lain, sebagaimana hubungan dengan lingkungan dan peristiwa sehari-hari yang kita temukan sendiri (Jackson, 2008).

Akhirnya, merujuk pada Blasco dan Wardle (2007) yang merangkum beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait dengan penulisan sebuah karya etnografi, yaitu pertama, menulis etnografi berarti melakukan penerjemahan dan dari perbandingan, dan peneliti memediasi atau menerjemahkan konteks-konteks atau arena yang beragam. Kedua, semua peneliti/etnografer menggunakan dirinya sendiri dan pengetahuan tentang masyarakatnya sebagai langkah awal untuk memahami dan merepresentasikan masyarakat lain. Ketiga, beberapa peneliti membuat perbandingan-perbandingan eksperensial dengan mengandalkan abstraksi dari representasi-representasi atau model-model.

I. 5. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri atas lima bab, mulai dari pendahuluan, konteks penelitian, pembahasan atau analisis, dan kesimpulan. Data-data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan penelusuran literatur, baik yang berasal dari artikel, buku, maupun berita-berita dari media elektronik dituliskan dalam bentuk narasi deskriptif. Berikut pembabakan dalam tesis ini.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, masalah kajian, tinjauan konseptual, proses penelitian, dan sistematika penulisan.

Beberapa konsep utama yang dibahas dalam pendahuluan adalah akses lahan, kepemilikan lahan, aktor, relasi sosial, dan jejaring aktor.

Bab II adalah konteks penelitian, yaitu deskripsi tentang perusahaan yang menjadi satuan analisis dan lokasi perkebunan singkong yang menjadi fokus dalam pengamatan. Bagian ini tidak hanya menceritakan tentang perusahaan dan produk energi terbarukan yang dihasilkan, tetapi juga menarasikan tentang lokasi-lokasi yang diakses oleh perusahaan untuk menghasilkan bahan baku. Dari lima lokasi yang ditanami singkong oleh perusahaan, pengamatan lebih difokukan pada lokasi Sampalan di Kecamatan Pacet dan Barudawa 2 di Kecamatan Cipanas.

Bab III menarasikan tentang bagaimana relasi sosial dan jejaring yang terjalin diantara para aktor yang terlibat dalam masalah akses lahan. Pembahasan diawali dengan deskripsi tentang aktor-aktor yang terlibat dalam masalah akses dan kepemilikan lahan di dua lokasi yang diamati. Setelah itu, penulis menarasikan tentang relasi sosial dan jejaring yang terjalin diantara para aktor. Relasi sosial tergambarkan melalui kontestasi dan negosiasi dalam aktivitas yang teramati selama penelitian lapangan. Dari relasi sosial tersebut, penulis mengamati bahwa para aktor terhubung satu sama lain sehingga membentuk jejaring (*networking*) dengan kepentingan yang terkait dengan akses lahan.

Bab IV membahas tentang mekanisme akses lahan oleh perusahaan. Bagian ini menarasikan dan menganalisis bagaimana PT. EKM memperoleh (*gaining*), mengendalikan (*controlling*), dan memelihara (*maintenaning*) akses terhadap lahan. Pada bagian ini penulis mendeskripsikan individu-individu (bagian dari perusahaan) yang berperan dalam upaya untuk memperoleh, mengendalikan, dan memelihara akses lahan di kedua lokasi yang diamati. Pada masing-masing subbab, penulis menguraikan strategi-strategi yang ditempuh dan pihak-pihak yang harus dihadapi oleh perusahaan dalam mekanisme tersebut.

Bab VI yaitu kesimpulan. Dalam bagian ini pertanyaan-pertanyaan penelitian terjawab dari uraian bab dua hingga lima.

BAB II

PT. EKM DAN PERKEBUNAN SINGKONG

Bagian awal bab ini mendeskripsikan tentang profil PT. EKM sebagai perusahaan yang menjadi sumber informasi dalam penelitian. Perusahaan ini menghasilkan produk-produk energi terbarukan dengan berbahan baku singkong. Sejak sekitar empat tahun (mulai 2008) yang lalu perusahaan tertarik untuk mengembangkan singkong menjadi bahan baku bioetanol, biokerosin, dan biodiesel. Visi untuk mewujudkan ketahanan energi masyarakat membawa perusahaan untuk melakukan eksplorasi dan kajian lebih serius terhadap potensi singkong. Seorang staf perusahaan yang penulis temui mengatakan bahwa penanaman yang dimulai di daerah Sukabumi kemudian memberikan bekal bagi perusahaan untuk mengembangkan usahanya di daerah-daerah yang lain, salah satunya di Cianjur (Kecamatan Cipanas dan Pacet) sejak tahun 2010 silam.

Kedatangan penulis pertama kali ke kantor PT. EKM pada bulan September 2011 di daerah Ciawi, Bogor menjadi awal untuk memperoleh informasi lebih banyak tentang perusahaan dan perkebunan singkong yang dimiliki perusahaan. Kantor PT. EKM agak berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain karena pegawai yang berada di kantor hanya berjumlah 3 orang dan semuanya adalah perempuan. Lia, seorang staf (sekretaris pimpinan) mengatakan bahwa ia dan kedua rekannya bertugas mengurus administrasi terkait dengan investasi singkong dan jati emas karena sebelum mengembangkan bioetanol dari singkong, perusahaan terlebih dahulu mengembangkan bisnis pohon jati. Berikut profil perusahaan yang penulis peroleh dari buku *company profile* dan wawancara dengan salah satu staf.

II. 1. PT. EKM: Produsen Bioetanol

Company Profile menyebutkan bahwa EKM adalah singkatan dari Energi Karya Madani yang dipimpin oleh Bapak Adibrata yang berlatar pendidikan sarjana Institut Pertanian Bogor (IPB). PT. EKM sendiri merupakan satu dari beberapa perusahaan yang berada di bawah Adibrata Foundation yang memiliki

visi sebagai Institusi Nirlaba yang memelopori Kerja-kerja Restorasi Kehidupan Warga Pasundan dengan bersumber pada Nilai-nilai Silih Asih, Silih Asah, dan Silih Asuh dengan berbasis pada Prakarsa dan Daya Cipta Masyarakat Arus Bawah. Salah satu misi yang diemban adalah memelopori pengembangan sumber energi alternatif dan terbarukan berbasis kemitraan bersama masyarakat secara profesional.

Perhatian untuk mengembangkan sumber energi terbarukan sendiri menurut Lia, dimulai dari pengalaman yang Pak Adi (panggilan Pak Adibrata) peroleh dari Surabaya sekitar enam tahun lalu. Ketika itu, menurutnya pengembangan etanol belum *booming* dan perusahaan pun masih kesulitan memasarkan produknya sampai Pak Adi melakukan penelitian dengan menggunakan singkong.

“Perusahaan udah jalan 6 tahun, bergerak di bidang etanol karena memang pangsa pasarnya awalnya bingung juga..pangsa pasarnya kemana..Pak Adi sendiri belajar dari daerah Surabaya (kalau ga salah). Itu bagian dari sana sedangkan etanol belum *booming* lah istilahnya, belum tahu kegunaannya untuk apa. Yang saya tahu siy dari molase, dari jagung, dari nira juga..pak Adi nemuin bisa pake singkong ternyata..walaupun grade-nya tidak sampai 99,9%. Cuma sampai 80% grade-nya karena singkong itu agak keras. Waktu dia difermentasi, dia agak keras. Walaupun pertama dia keluar 99% hasilnya tapi menyusut banget! Dalam 1 jam-2 jam dia pasti menyusut. Makanya bagaimana caranya pak Adi beli mesin destilasi yang ke-2 walaupun dalam seminggu dia pasti menyusut, jadi yang mau beli harus awal. Dari awal kita produksi, langsung diambil. Kecuali dari molase (limbah gula) tapi harga jualnya mahal, sekarang 2000 per liter, makanya sekarang tetap pakai singkong. pangsa pasarnya sendiri ke perusahaan parfum, farmasi juga karena kita sudah *food grade* (ada COA-nya juga) karena mungkin harganya murah..kita jual 11.000 per liter yang *grade* 99,9% dibanding harus beli alkohol di toko kimia, yang *grade* segitu harganya 20.000-30.000 per liter. Sudah punya kontrak sih dengan perusahaan parfum..rutin tiap minggu ambil sampai 5.000 liter. Etanol sendiri masih lancar sampai sekarang karena tiap bulan kita panen..di Cipanas karena dari investor sendiri mulai bulan ini sampai beberapa bulan ke depan masih akan panen. Selain ke pabrik, kita juga ada kerja sama dengan PT. Cassava yang ada di Sentul. Itu dia ngambil sendiri di kebun, per kilonya 1.000.” (wawancara tanggal 14 April 2012).

Untuk mewujudkan visinya, salah satu misi yang diemban perusahaan adalah memelopori pengembangan sumber energi alternatif dan terbarukan berbasis kemitraan bersama masyarakat secara profesional, kemudian diwujudkan dengan menghasilkan beberapa produk sebagai berikut.

1. Bioetanol.

Bioetanol adalah etanol yang diproduksi dengan cara fermentasi menggunakan bahan baku nabati. Bahan baku meliputi bahan baku sumber gula diantaranya adalah molases dan nira; bahan baku sumber pati yaitu ubi kayu, jagung serta ubi-ubian lain; serta bahan baku sumber serat (*lignoselulosa*) diantaranya tongkol jagung, sekam, dan sebagainya.

Bioetanol memiliki beberapa kegunaan bagi seluruh lapisan masyarakat, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun industri. Untuk rumah tangga, bioetanol dapat digunakan sebagai bahan bakar pengganti minyak kompor sedangkan industri dapat memanfaatkan bioetanol sebagai campuran bahan baku cat, pabrik farmasi, tisu, parfum, dan sebagainya.

Harga jual bioetanol dikategorikan sesuai dengan grade atau kadar etanolnya, yaitu untuk *grade* 60-70% harganya Rp. 7.500, *grade* 80-90% harganya Rp. 8.500, *grade* 90-95% harganya Rp. 9.500, *grade* 96% harganya Rp. 10.000, dan *grade* 99,9% dijual dengan harga Rp. 12.000 per liter.

2. Biokerosin.

Biokerosin adalah pengganti minyak tanah dan gas yang aman dan murah, dibuat dari bahan baku nabati yang sangat melimpah di Indonesia, dengan penggunaan kompor minyak tanah biasa dan kandungan gas metan yang lebih tinggi (setara dengan gas) sehingga lebih hemat dan aman karena bebas ledakan.

Biokerosin lebih hemat bila dibandingkan dengan minyak tanah dan gas karena penggunaan satu liter biokerosin dapat bertahan selama lima jam pemakaian. Selain itu, biokerosin juga anti meledak sehingga tingkat keamanannya lebih tinggi daripada gas. Biasanya digunakan oleh kalangan rumah tangga dan UKM. Keunggulan lainnya adalah nyala apinya berwarna biru dan tidak meninggalkan asap sehingga ramah lingkungan.

Harga jualnya pun lebih rendah dibandingkan dengan kerosin (minyak tanah) yaitu Rp. 6.500 per liter untuk wilayah-wilayah di sekitar Pulau Jawa.

Untuk pengembangan energi alternatif ini, PT. EKM membuka peluang kerja sama dengan berbagai pihak, baik pemerintah maupun swasta.

3. Biosolar.

Biosolar adalah bahan bakar solar yang merupakan hasil pengolahan dari tumbuh-tumbuhan yang diambil ekstraknya. Secara umum, biosolar lebih ramah lingkungan, pembakarannya bersih, biodegradable, mudah dikemas dan disimpan, dan merupakan bahan bakar yang dapat diperbaharui. Pemakaiannya pun lebih hemat dibandingkan solar biasa, yaitu dengan satu liter biosolar dapat menempuh jarak 10,14 km sementara solar biasa hanya dapat menempuh jarak 9,76 km.

Namun demikian, ada beberapa kelemahan biosolar selain beberapa keunggulannya, yaitu menggumpal bila suhu dingin dan harganya yang mencapai Rp. 7.500 per liter sehingga lebih mahal dibandingkan solar biasa.

4. Biodiesel.

Biodiesel merupakan bahan bakar yang terdiri dari campuran mono-alkyl ester dari rantai panjang asam lemak yang dipakai sebagai alternatif bagi bahan bakar mesin diesel dan terbuat dari sumber terbarui seperti minyak sayur atau lemak hewan. Beberapa keunggulan biodiesel yaitu:

- Dihasilkan dari sumber daya energi terbarukan dan ketersediaan bahan bakunya terjamin.
- *Cetane number* (bilangan yang menunjukkan ukuran baik tidaknya kualitas solar berdasarkan sifat kecepatan bakar dalam ruang bakar mesin) tinggi.
- Viskositas tinggi sehingga memiliki sifat pelumasan yang lebih baik daripada solar dan memperpanjang umur pakai mesin.
- Dapat diproduksi secara lokal.
- Memiliki kandungan sulfur yang rendah.
- Menurunkan tingkat opasiti asap.
- Menurunkan emisi gas buang.
- Pencampuran biodiesel dengan petroleum diesel dapat meningkatkan biodegradability petroleum diesel sampai 500%.

5. Kompor BBS (Bahan Bakar Singkong).

Kompor BBS diproduksi oleh PT. EKM guna melengkapi produk yang ada sebagai media penggunaan biokerosin pengganti minyak tanah. Kompor ini sangat mudah pengoperasiannya, sama dengan kompor minyak biasa, dengan tungku yang kuat dan api yang biru. Produk ini menjadi alternatif bagi masyarakat menengah ke bawah karena kecenderungan masyarakat yang masih takut menggunakan kompor gas. PT. EKM menawarkan harga Rp. 90.000 per unitnya.

Terkait dengan pengembangan energi terbarukan inilah, PT. EKM memilih menggunakan singkong sebagai bahan baku dengan dilandasi oleh beberapa pertimbangan berikut:

- Ubi kayu adalah tanaman yang sudah dikenal oleh para petani di Indonesia secara turun-temurun. Ubi kayu merupakan tanaman sumber karbohidrat ketiga setelah padi dan jagung. Dengan menggeser kegunaan ubi kayu menjadi bahan bakar nabati/BBN (dari sumber daya karbohidrat ke sumber daya hidrokarbon), diharapkan harga ubi kayu meningkat sehingga pendapatan petani meningkat.
- Ubi kayu telah tersebar di Indonesia dan ditanam di sentra-sentra produksi di 55 kabupaten dan 36 propinsi, tetapi produktivitasnya relatif rendah. Dengan program pengembangan BBN diharapkan tidak hanya tersedia lapangan pekerjaan, tetapi akan terjadi peningkatan teknologi dan agro industri di pedesaan.
- Harga ubi kayu setiap panen raya tiap tahunnya masih rendah sehingga dengan pembangunan pabrik-pabrik etanol skala pedesaan diharapkan harganya akan stabil.
- Ubi kayu akan menguatkan *security of supply* bahan bakar berbasis kemasyarakatan.
- Memperbesar basis sumber daya bahan bakar nabati karena ubi kayu adalah tanaman yang toleran terhadap tanah dan kesuburan rendah dan mampu berproduksi baik pada lingkungan suboptimal dibandingkan dengan tanaman lain.

Dengan demikian, singkong menjadi sumber daya utama bagi perusahaan. Untuk menghasilkan produktivitas yang ditargetkan, yaitu 120-250 ton per hektarnya, perusahaan melakukan upaya untuk memperoleh bibit unggul (yang berasal dari Thailand dan hasil penyilangan singkong lokal) sehingga umbi yang dihasilkan lebih besar dan panjang daripada singkong kebanyakan. Selain bibit, perusahaan juga memproduksi pupuk organik yang berasal dari limbah produksi bioetanol yang diekstrak kembali dengan bahan-bahan organik lainnya. Penggunaan bibit unggul dan pupuk organik diyakini dapat merangsang pertumbuhan singkong sehingga hasilnya optimal.

“(Bibit) itu dari Thailand. Kita juga mencelupkan bibit terlebih dahulu ke pupuk dan diberi pewarna makanan. Itu hasil stek dari singkong karet dan singkong lokal. Pembibitan juga di sini (di atas kantor EKM). Lumayan sih, bisa membantu masyarakat sekitar. Mereka dibayar Rp. 35.000 per hari untuk memotong bibit juga. (Kalau pupuk yang digunakan) itu mikroba atau M11. Itu limbah etanol dicampur molase yang sudah kotor-kotornya, sayuran yang sudah busuk (toge), dan tongkol yang kecil atau sisa-sisanya, lidah buaya..makanya kan bau banget! Ada juga gula merah dalam campurannya, tapi sekarang yang dibanyakin lidah buaya, untuk membesarkan singkong. Ini bisa juga untuk jati, harga jualnya Rp. 50.000/liter. Kalau beli bibit singkong dengan harga Rp. 1.000, dapat pupuk juga. Tinggal dikalikan saja untuk lahan seluas 1 hektar.” (wawancara dengan Lia tanggal 14 April 2012).



Gambar 2. 1. Bibit singkong dan pupuk *microba* yang siap digunakan di lokasi Sampalan (milik Pak Iw) (sumber: dokumentasi penelitian).

II. 2. Membuka *Kebon Singkong*: Jaminan Pasokan Bahan Baku

Untuk memperoleh bahan baku, perusahaan membutuhkan lahan untuk ditanami singkong. Kebutuhan produksi sebesar 10.000 liter setiap harinya harus dipenuhi melalui penanaman yang intensif di beberapa lokasi di Kabupaten Cianjur. Penulis melakukan penelusuran data mulai dari kantor PT. EKM kemudian ke lokasi-lokasi penanaman singkong di Kabupaten Cianjur, khususnya Kecamatan Cipanas dan Pacet. Informasi tentang letak beberapa lokasi tersebut penulis peroleh dari Lia dan ia pun memberikan nomor telepon seluler Pak Heru (manajer lapangan) dan Pak Asep (koordinator/pengawas lapangan). Segera setelah itu, penulis menghubungi Pak Heru meminta izin untuk berkunjung ke lokasi-lokasi penanaman singkong. Setelah bertanya tentang cara mencapai lokasi (dengan bus), penulis pergi menuju Cipanas. Berikut ini adalah narasi tentang 5 lokasi *kebon* singkong yang dikelola PT. EKM.

II. 2. 1. Lokasi Mariwati

Tanggal 7 September 2011 adalah pertama kalinya penulis melakukan penelitian lapangan awal di Cipanas. Setelah *janjian* dengan Pak Asep, penulis dijemput Pak Asep di pasar Cipanas (dekat Istana Cipanas) menuju kediaman Pak Heru yang jaraknya sekitar 300 meter dari sana. Di sana, penulis bertemu dengan beberapa orang (satu keluarga), yang menurut Pak Heru adalah calon investor PT. EKM. Pada pertemuan ini pula Pak Heru menceritakan bahwa PT. EKM berhasil mengakses (dan menguasai) lahan di beberapa lokasi, yaitu Mariwati, Kota Bunga, Cikole, Sampalan, dan Barudawa 2. Seluruh lahan berada di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Cipanas dan Pacet. Sebagai gambaran awal, seluruh lokasi berada di atas bukit tetapi masih bisa dijangkau dengan menggunakan kendaraan roda 4 maupun roda 2.

Setelah mendemonstrasikan tentang kompor biokerosin, Pak Heru kemudian mengajak penulis dan satu keluarga calon investor tadi pergi mengunjungi salah satu lokasi penanaman di Mariwati (Kecamatan Cipanas). Sebagai prosedur yang harus dijalankan oleh manajer dan pengawas lapangan ketika calon investor berkunjung adalah mengajaknya melihat langsung kegiatan yang sedang berlangsung di lokasi. Kunjungan untuk penelitian awal tersebut

memberikan pengalaman menarik karena tidak terbayangkan sebelumnya penulis mengunjungi lokasi penanaman singkong yang luasnya hektaran. Ketika mendekati lokasi penanaman (saat Pak Heru memarkir mobilnya di atas lokasi) terlihat “lautan” pohon singkong yang begitu rimbun. Menurut Pak Heru saat itu usia penanaman memasuki bulan ketiga.

Untuk mencapai lokasi Mariwati, penulis menumpang mobil Pak Heru. Jarak tempuh sekitar 15 kilometer dari Cipanas (kediaman rumah Pak Heru) membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit (apabila menggunakan kendaraan roda 4 lain seperti angkot, waktu tempuh bisa lebih lama). Waktu yang cukup lama tersebut disebabkan oleh kondisi jalan yang rusak. Di sepanjang jalan menuju lokasi (memasuki wilayah Mariwati), penulis mengamati banyak lahan-lahan yang tidak dikelola (ditumbuhi rumput-rumput liar) yang sangat luas. Menurut Pak Heru lahan-lahan “kosong” seperti itulah yang dicari oleh perusahaan namun tidak semua lahan “kosong” di lokasi ini dapat diakses oleh perusahaan dengan berbagai macam alasan.

Pak Heru mengatakan bahwa perusahaan berhasil memperoleh akses untuk menanam di lokasi ini setelah dirinya menemui Pak Go dan Pak Mu (anak buah Pak Ben (alm.), pemilik lahan) serta para penggarap sekitar pertengahan tahun 2010. Saat penulis menanyakan luas lahan yang berhasil diakses perusahaan, Pak Heru mengatakan bahwa lahan milik Pak Ben tersebut sekitar 8 hektar luasnya ditambah lahan-lahan milik para penggarap yang total luasnya mencapai 52 hektar.

Ketika itu, Pak Heru mengatakan bahwa PT. EKM sedang membutuhkan lahan untuk ditanami singkong sehingga melalui Pak Go dan Pak Mu, ia berkenalan dengan Pak Ben dan mengemukakan kepentingan perusahaan atas lahan miliknya. Pak Go dan Pak Mu sendiri adalah kolega Pak Heru yang sudah cukup lama dikenalnya. Sementara para penggarap juga berkontribusi dalam upaya penyediaan bahan baku bagi perusahaan karena menyewakan lahan-lahan mereka.

Lahan seluas kurang lebih 60 hektar (menurut informasi Pak Asep) yang berasal dari para penggarap dan Pak Ben disewakan kepada perusahaan melalui Pak Heru untuk ditanami singkong. Ketika itu, perjanjian untuk menyewa lahan

adalah selama satu musim atau satu tahun. Pak Ben maupun pihak penggarap membuka kemungkinan bagi perusahaan untuk memperpanjang penyewaan lahan apabila masih membutuhkan. Hal itu diakui oleh Pak Heru yang mengatakan bahwa perusahaan saat itu baru memulai usaha sehingga kemungkinan untuk berkembang sangat besar. Oleh karena itu, seiring dengan perkembangan bisnis PT. EKM, akses atas lahan di lokasi ini tetap dipertahankan.

Di lahan inilah, Pak Heru juga melakukan penyiangan bibit singkong dengan “mengawinkan” bibit singkong lokal dan singkong karet. Pak Heru mengakui bahwa ia dan beberapa anak buahnya selalu berusaha untuk memperoleh bibit singkong terbaik. Hasil perkawinan kedua jenis singkong tersebut kemudian ditanam di lokasi ini dan hasilnya sangat memuaskan. Oleh karena itu, meskipun perusahaan menggunakan bibit singkong yang berasal dari Thailand (seperti yang dijelaskan oleh staf perusahaan), namun bibit singkong yang menghasilkan singkong terbaiklah yang lebih banyak digunakan.

Pak Heru, seperti halnya Pak Asep, mengakui bahwa lokasi Mariwati merupakan lokasi pertama yang menunjukkan keberhasilan perusahaan melakukan penanaman di kawasan Cipanas. Selain tanah yang sangat subur, lokasi inipun dekat dengan sumber air sehingga singkong dapat tumbuh dengan subur. Pak Heru mempercayakan Pak Jun, anak buahnya (yang setahun kemudian digantikan oleh Pak Roni), untuk menjadi pengawas di lokasi ini. Sebagai lokasi awal penanaman yang hasilnya cukup memuaskan, Mariwati menjadi lokasi yang diperkenalkan kepada para investor oleh perusahaan sehingga menjadi lokasi yang paling sering dikunjungi oleh investor.

Di lokasi ini dipekerjakan sekitar 35 orang petani yang merupakan masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi. Dari jumlah tersebut, 20 orang adalah laki-laki dan 15 orang perempuan. Dari lahan seluas 60 hektar tersebut, pembukaan lahan dilakukan secara bertahap. Setelah lahan dibersihkan dan diberi pupuk, bibitpun ditanam. Setelah penanaman dilakukan perawatan selama beberapa bulan oleh petani perempuan. Kegiatan ini berlangsung setiap hari (kecuali Jumat) dan diawasi oleh pengawas lapangan.

Semakin banyak investor yang mendatangi lokasi ini membuat Pak Heru merasa perlu membuat sebuah *saung* sederhana dari rotan. Dari saung tersebut,

investor atau pengunjung yang datang dapat menikmati pemandangan pohon singkong yang rimbun karena terawat dengan baik. Perusahaan menyadari bahwa perawatan yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan singkong yang sesuai dengan target, yaitu melebihi 120 ton per hektar.

II. 2. 2. Lokasi Kota Bunga

Keberhasilan Pak Heru memperoleh akses di Mariwati mendorongnya untuk memperluas lokasi penanaman agar hasil yang diperoleh semakin banyak. Sekitar satu bulan setelah penanaman di Mariwati, perusahaan (melalui Pak Heru) mencari lokasi lain yang dianggap potensial untuk ditanami singkong. Pencarian tersebut membawa Pak Heru ke Kota Bunga, sebuah lokasi lahan yang berada dekat dengan perumahan mewah Kota Bunga yang terletak di Kecamatan Pacet.

Tidak berbeda dengan Mariwati, lokasi ini pun berada di atas bukit. Jarak yang ditempuh penulis dari Cipanas (kediaman Pak Heru) sejauh kurang lebih 7 kilometer. Namun tidak seperti lokasi Mariwati, kondisi jalan menuju lokasi Kota Bunga cukup baik (tidak berbatu-batu). Lahannya pun sangat subur dan tidak hanya ditanami oleh sayur-mayur, tetapi juga berbagai jenis bunga oleh masyarakat setempat.

Menurut informasi dari para informan, lahan di lokasi tersebut merupakan lahan-lahan garapan masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Sebelum memperoleh akses untuk menanam singkong, Pak Heru mengumpulkan informasi tentang para pemilik lahan garapan dan kemungkinan mereka untuk menyewakan lahan-lahan garapannya tersebut. Secara bertahap Pak Heru menyewa sedikit demi sedikit lahan garapan di lokasi ini hingga luasnya mencapai 60 hektar. Untuk menyewa 1 hektar lahan garapan, perusahaan mengeluarkan biaya sebesar Rp. 1.500.000 semusim (satu tahun).

Ketika penulis melakukan pengamatan di lokasi ini, belum seluruhnya ditanami singkong. Sekitar 35 orang petani (laki-laki dan perempuan) dipekerjakan oleh perusahaan untuk membuka, menanam, dan merawat singkong. Selain Mariwati, lokasi ini juga mulai akhir tahun 2010 diperkenalkan kepada para investor karena letaknya yang sangat strategis dan tidak terlalu jauh dari Cipanas.

Secara umum menurut Pak Heru, tidak terlalu banyak kendala yang dirasakan ketika membuka dan menanam singkong di lokasi ini, meskipun Pak Heru mengakui bahwa dirinya lebih memilih untuk membeli lahan-lahan garapan, apabila memungkinkan, karena dapat lebih menjamin keberlangsungan penanaman daripada hanya menyewa lahan dari seorang pemilik atau penggarap lahan. Kendati demikian, perjanjian sewa-menyewa antara perusahaan (Pak Heru) dan para penggarap tetap memberikan peluang bagi perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya karena yang terpenting adalah tersedianya lahan untuk menjamin pasokan bahan baku yang dibutuhkan dalam produksi bioetanol.

Dalam kontrak sewa yang disepakati antara perusahaan dengan pihak penggarap maupun Pak Ben disebutkan bahwa lahan dapat diakses selama satu musim penanaman singkong (12 bulan). Setelah itu, kontrak harus diperpanjang apabila perusahaan masih membutuhkannya. Mengingat lokasi Mariwati dan Kota Bunga memiliki beberapa kelebihan, seperti letak yang strategis, lahan yang subur, maupun tersedianya sumber air, maka kontrak sewa untuk penanaman di kedua lokasi ini diperpanjang pada musim kedua tahun ini.

II. 2. 3. Lokasi Cikole

Permintaan bioetanol yang terus meningkat seiring dengan perkembangan bisnis perusahaan melatarbelakangi Pak Heru sebagai manajer lapangan mencari upaya untuk memperoleh akses lahan yang lebih luas lagi. Setelah di Mariwati dan Kota Bunga (kemudian Sampalan yang akan dinarasikan setelah ini), perhatian Pak Heru tertuju pada lahan di lokasi Cikole, Kecamatan Cipanas. Lahan yang sebagian besar masih termasuk lahan bekas perkebunan dan sebagian kecil dimanfaatkan untuk latihan menembak ini, menurut Pak Nana¹⁷ sebagai pengawas yang dipercayakan di lokasi ini, merupakan lahan yang sangat subur.

“Ya mungkin karena struktur tanahnya..dan di sana kan sudah dipelihara petani, jadi sudah ada dasar pupuknya..kalau lahan yang baru kan belum ada pupuknya, terus banyak rumputnya jadi jelek ke tanahnya, jadi kering dan unsur haranya berkurang.” (wawancara tanggal 26 Januari 2012).

¹⁷ Nama informan disamarkan. Selanjutnya digunakan demikian.

Cikole juga merupakan lokasi berbukit yang cukup terjal. Kemiringan lahan yang mencapai sekitar 45 derajat membuat kendaraan yang menuju lokasi (dari Cipanas ke lokasi ini sekitar 8 kilometer) harus diparkir sekitar 1 kilometer di bawahnya. Para pengunjung harus menaiki bukit dengan berjalan kaki. Bagi Pak Nana, hal tersebut dianggap sebagai konsekuensi tugas yang diberikan oleh atasannya. Dengan menggunakan motor, Pak Nana datang setiap hari pukul 07.00 pagi dan pulang pukul 16.00 WIB.

Di lokasi ini, menurut Pak Nana ada sekitar 50 orang petani yang bekerja untuk perusahaan. Mengingat luas lahan yang mencapai sekitar 100 hektar, petani yang dipekerjakan lebih banyak daripada di Mariwati dan Kota Bunga. Dari jumlah tersebut, sekitar 30 orang adalah petani laki-laki dan 20 orang adalah petani perempuan. Seperti halnya di Mariwati dan Kota Bunga, perusahaan hanya dimungkinkan untuk menyewa lahan dari beberapa orang penggarap (luas lahan yang disewakan beragam, namun rata-rata biaya sewa per hektarnya sama dengan kedua lokasi sebelumnya, yaitu Rp. 1.500.000 per musimnya).

Dengan demikian menurut Pak Heru, seluruh lahan yang diakses oleh perusahaan di ketiga lokasi ini diperoleh dari kontrak sewa dengan pemilik lahan dan para penggarap. Selain ketiga lokasi yang berhasil diakses oleh perusahaan tersebut, ada pula dua lokasi yang lahannya diakses oleh perusahaan, yang proses untuk memperoleh aksesnya lebih kompleks daripada ketiga lokasi itu sehingga menarik untuk dikaji lebih jauh. Selain itu dengan mempertimbangkan kemampuan dan keterbatasan waktu, peneliti memfokuskan pengamatan pada dua lokasi lain, yang dinarasikan berikut ini.

II. 2. 4. Lokasi Sampalan

Setelah mengumpulkan informasi awal, penulis memutuskan untuk melakukan pengamatan secara intensif di dua lokasi yang menjadi fokus penelitian, yaitu Sampalan dan Barudawa 2, yang dimulai pada bulan Januari 2012. Ketika datang ke kedua lokasi tersebut, penulis juga memperoleh pemandangan yang tidak biasa, bukan hanya karena jumlah pekerja yang mencapai 50 orang di masing-masing lokasi, tetapi juga kehadiran pengawas di sana.

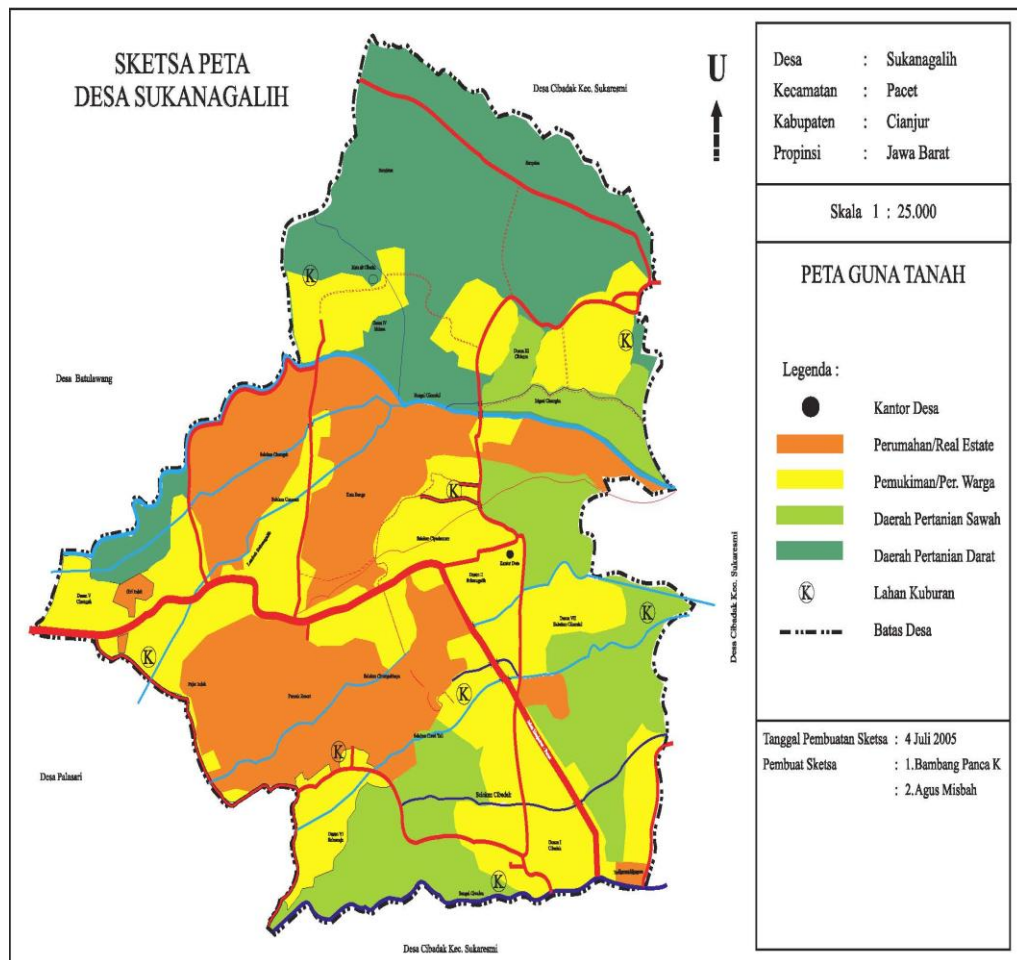
Di lokasi ini, penulis melihat adanya *saung* sederhana yang terbuat dari bambu yang digunakan oleh pengawas lapangan untuk mengawasi para pekerja (selain sebagai tempat berlindung para pekerja apabila hujan turun atau beristirahat sejenak). Meskipun selama proses pembukaan lahan dan penanaman, pengawas juga berkeliling dan mengawasi dari dekat.

Untuk memperoleh data administrasi tentang lokasi sampalan, penulis mendatangi kantor Desa Sukanagalih. Di sana penulis mewawancarai Pak H. Ujang yang menjabat sebagai sekretaris desa. Dari beliau, penulis memperoleh informasi bahwa lokasi sampalan seluruhnya berada di Desa Sukanagalih yang termasuk dalam wilayah administratif Kecamatan Pacet. Jarak yang harus ditempuh dari kantor desa menuju lokasi adalah sekitar 5 km dengan kondisi jalan yang masih tanah dan berbatu (karena berada di perbukitan). Kendati demikian, jalan tersebut dapat dilalui baik oleh kendaraan roda 2 maupun roda 4.

Sebelum mendeskripsikan lokasi yang menjadi fokus penelitian ini, penulis perlu menggambarkan Desa Sukanagalih secara umum untuk memberikan latar belakang kondisi lahan yang diamati. Dari Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan (Buku III), Desa Sukanagalih berbatasan dengan Desa Cibadak, Kecamatan Sukaresmi di sebelah utara, selatan, dan timur sementara sebelah baratnya berbatasan dengan Desa Batulawang, Kecamatan Cipanas. Desa Sukanagalih sendiri termasuk desa yang cukup tua di Kecamatan Pacet dan berdiri sejak tahun 1925 sedangkan Desa Batulawang adalah hasil pemekaran dari Desa Ciloto, seperti yang diutarakan oleh H. Ujang berikut ini.

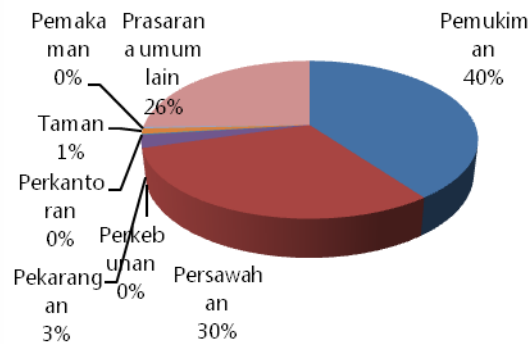
“...berdirinya Desa Sukanagalih sekitar tahun 1924 sudah ada Sukanagalih, sebelumnya Desa Cibulia. Setahun kemudian ganti nama jadi Desa Sukanagalih...sedangkan Desa Sukanagalih kan desa induk, sama-sama Ciloto..yang dimekarkan mah Desa Ciloto jadi Batulawang sekarang.” (wawancara tanggal 29 Februari 2012).

Secara topografis, bentangan wilayah di Desa Sukanagalih berupa dataran rendah dan (sebagian kecil) berbukit-bukit terutama pada area yang dimanfaatkan untuk pertanian darat. Kedua lokasi yang menjadi fokus pengamatan selama penelitian lapangan berlangsung merupakan lahan-lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian darat, khususnya perkebunan sayur-mayur, palawija, dan singkong oleh PT. EKM.



Gambar 2. 2. Peta Perekonomian Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur (sumber: dokumentasi penelitian).

Sementara untuk pemanfaatan wilayah desa, pihak desa tidak menggunakan istilah “perkebunan” melainkan “pertanian darat”. Berdasarkan peta di atas, konsep pertanian darat dibedakan dengan pertanian sawah karena jenis tanaman yang dihasilkannya pun berbeda. Pertanian sawah menghasilkan padi sedangkan pertanian darat menghasilkan sayur-mayur dan palawija (termasuk singkong). Sementara istilah “kebon” penulis peroleh dari para informan (Pak Heru, Pak Asep, dan pengawas yang lain) untuk menyebut lokasi yang ditanami singkong oleh PT. EKM. Berikut data mengenai luas wilayah di Desa Sukanagalih menurut penggunaannya yang penulis peroleh dari kantor desa.



Grafik 2. 1. Pemanfaatan Lahan di Desa Sukanagalih (sumber: Daftar Isian Potensi Desa dan Kelurahan tahun 2011).

Data yang penulis peroleh menunjukkan bahwa secara administratif, mayoritas lahan digunakan untuk pemukiman penduduk, diikuti oleh persawahan dan prasarana umum yang lain. Sementara lahan yang dimanfaatkan untuk pertanian darat (untuk menanam sayur-mayur palawija) justru tidak tercatat di dalamnya, padahal apabila membandingkan dengan peta tata guna lahan yang juga dikeluarkan oleh pihak desa, sangat jelas terlihat (berwarna biru toska) bahwa komposisi penggunaan lahan untuk pertanian darat cukup besar. Di lokasi Sampalan (sebelah utara peta) misalnya, penulis mengamati bahwa lahan seluas kurang lebih 96 hektar sebagian besar dimanfaatkan untuk pertanian darat oleh masyarakat sekitar.

Selanjutnya adalah data tentang jumlah penduduk. Dari sini penulis ingin menggambarkan kondisi masyarakat Desa Sukanagalih untuk kemudian menghubungkannya dengan masalah (ketiadaan) kepemilikan lahan yang menjadi pendorong banyaknya warga masyarakat yang menjadi penggarap. Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan (Buku IV) mencatat bahwa pada tahun 2011 penduduk berjumlah 19.191 jiwa dan terjadi penambahan jumlah penduduk dibandingkan tahun sebelumnya (2010) yang berjumlah 17.250 jiwa.

Dari jumlah tersebut tercatat kepala keluarga (KK) laki-laki sebanyak 4.503 jiwa dan jumlah kepala keluarga perempuan adalah 752 jiwa. Penduduk kemudian dikategorikan menjadi keluarga prasejahtera, keluarga sejahtera 1, keluarga sejahtera 2, keluarga sejahtera 3, dan keluarga sejahtera 3 plus. Kategori tersebut menurut Bapak Supena (Kaur Desa) dibuat dengan menggunakan

indikator pendapatan kepala keluarga menurut tingkat Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten.

Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan (Buku IV) tahun 2011 menunjukkan bahwa dari 5 kategori tersebut, keluarga sejahtera 1 jumlahnya terbanyak (1.831 KK) dibandingkan dengan kategori-kategori lainnya. Setelah itu, keluarga sejahtera 2 (1.557 KK) dan diikuti oleh keluarga sejahtera 3 (508 KK). Sementara kategori keluarga prasejahtera hanya sebanyak 487 KK dan terakhir adalah keluarga sejahtera 3. Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa secara umum kondisi perekonomian keluarga di desa ini cukup baik. Selain itu, selama penelitian lapangan berlangsung penulis pun mengamati bahwa sebagian besar rumah warga masyarakat desa sudah permanen (tembok) sehingga penulis berasumsi bahwa tingkat perekonomian warga cukup baik.

Kendati demikian, data tertulis tentang perkembangan desa menunjukkan bahwa dari sebanyak 1.087 keluarga petani, 875 diantaranya tidak memiliki lahan sama sekali. Sementara keluarga yang memiliki lahan dengan luas kurang dari 10 hektar sebanyak 187, dan yang memiliki lahan seluas 10-50 hektar adalah 27 keluarga. Dengan demikian, sebagian besar (80%) warga Desa Sukanagalih tidak memiliki lahan sehingga harus bekerja di lahan-lahan individu (milik orang lain) atau lahan berstatus milik negara.



Grafik 2. 2. Kepemilikan Lahan oleh Penduduk Desa Sukanagalih (sumber: Daftar Isian Tingkat Perkembangan Desa dan Kelurahan tahun 2011).

Data desa juga menyebutkan bahwa warga yang tidak memiliki lahan dan bekerja di lahan orang lain masuk dalam kategori buruh tani meskipun secara tertulis tidak dibedakan dengan kategori petani padahal kenyataan di lapangan, kedua kategori tersebut berbeda. “Petani” biasanya digunakan untuk menyebut mereka yang melakukan aktivitas pertanian di lahannya sendiri (memiliki lahan) sedangkan “buruh tani” adalah orang yang bekerja di lahan orang lain. Selama penelitian lapangan, penulis juga mengamati bahwa sebagian besar orang yang memanfaatkan lahan untuk pertanian darat adalah mereka yang tidak memiliki lahan (yang biasa disebut “penggarap”). Hal ini kemudian diperkuat dengan informasi dari Pak Supena (Kaur Desa) yang mengatakan bahwa sebagian besar petani di desa ini tidak memiliki lahan; dengan kata lain merupakan buruh tani yang bekerja dengan sistem *maro*¹⁸ atau sewa.

Warga yang tidak memiliki lahan akan berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara mengelola lahan milik orang lain. Lahan yang dikelola dapat berupa persawahan atau pertanian darat untuk berkebun. Terkait pengelolaan pertanian darat, seorang informan bernama Pak Makmur, menceritakan bahwa untuk mengelola lahan pertanian darat membutuhkan modal yang lebih besar daripada mengelola persawahan milik orang lain. Berdasarkan pengalamannya selama ini, Pak Makmur membutuhkan biaya untuk membersihkan lahan dari rerumputan liar yang tumbuh tinggi, membeli bibit, pupuk, dan obat hama. Semua itu dirasakan kurang sepadan dengan hasil panen, terutama sayuran, yang seringkali fluktuatif.

“Yaa..paling juga 3 bulan, ditinggal dulu untuk nyari modal lagi. Lagi nganggur, ada yang nyuruh, ditinggal aja..sudah dibersihin sampai *bala* lagi. Mending buruh aja, jadi kemakan..lebih cepet. Bayarannya harian Bu, sehari 30 ribu.” (wawancara dengan Pak Makmur tanggal 23 Februari 2012).

Kesulitan yang dirasakan warga masyarakat yang tidak memiliki lahan (*landless*) memang “terbantu” oleh tersedianya lahan-lahan “kosong”, baik yang

¹⁸ *Maro* adalah sistem bagi hasil antara petani dan pemilik lahan. Menurut Pak Supena (wawancara tanggal 26 April 2012) disebut sistem *maro* karena bagi hasil antara petani dan pemilik lahan adalah *saparo-saparo* (masing-masing mendapatkan setengah atau 50% bagian dari hasil panen yang diperoleh). Sementara Löffler (1996: 20) mendefinisikan bahwa “systim maro” adalah aturan dimana pemilik lahan menerima sejumlah uang yang telah ditentukan dari penyewa sebelum penyewaan dilakukan. Setelah panen tiba, pemilik lahan juga menerima sebagian (50%) dari hasil panen tersebut.

tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya atau lahan milik negara yang belum dikelola. Meskipun demikian, pengalaman bertani yang diceritakan informan tadi menunjukkan bahwa untuk mengelola lahan “kosong” dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Modal ini pun diakui sangat tergantung pada luas lahan dan jenis tanaman yang akan ditanami. Kondisi alam pun turut mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan panen. Hujan disertai angin kencang kemudian memporak-porandakan tanaman petani sehingga mereka lebih sering mengalami kerugian akibat gagal panen.

Berbeda dengan berkebun, seperti yang telah disebutkan oleh Makmur, menjadi buruh tani di sawah-sawah milik orang lain dinilai lebih cepat menghasilkan karena tidak perlu menunggu panen untuk mendapat bayaran. Lain halnya apabila ia menyewa sawah untuk dikelola. Ia harus mengeluarkan sejumlah uang sewa selama kurun waktu tertentu sesuai kesepakatan dengan pemilik lahan. Dengan sistem sewa, seluruh hasil panen menjadi hak pihak penyewa lahan karena ia mengeluarkan biaya untuk modalnya bertani. Sementara sistem *maro* berarti pemilik lahan yang mengeluarkan modal untuk kebutuhan bertani, tetapi hasil (panen) dibagi dua antara pemilik lahan dan buruh tani.

Apapun pilihan yang dapat diambil oleh warga masyarakat yang tidak memiliki lahan tetap membuat mereka selalu bergantung pada lahan-lahan orang lain. Masuknya para investor (yang kebanyakan orang Jakarta) yang datang menjadi salah satu penyebab warga masyarakat kehilangan lahan mereka. Tidak ada yang salah dalam proses tersebut karena kenyataannya tidak ada pihak yang memaksa warga untuk menjual lahannya, namun dampaknya kini justru orang-orang dari luar wilayah ini yang memiliki lahan. Berikut hasil wawancara penulis dengan Pak Supena yang menjabat sebagai Kaur (Urusan Pertanahan) Desa Sukanagalih.

“(Masyarakat di sini) garap aja. Mayoritas disini pemiliknya orang-orang Jakarta, ya paling-paling orang sini cuma garap atau neliti sedikit-dikit gitu. Ya udah lama..dulu kan ini Kota Bunga sama persawahan, cuma dijual jadi kota perumahan, villa-villa..kalo mulai pembebasan tahun 92 atau 93 lah..dulunya memang ada pembebasan tanah. Jadi orang-orang itu mudah ngejual..ya, punya masyarakat. Setelah sekian banyak lalu dibangun. Tanah milik itu..ada yang sertifikat ada yang sendiri. Kalo di masyarakat sih jarang dulu, kalo

sekarang sih udah sertifikat semua di Kota Bunga udah sertifikat semua.” (tanggal 29 Februari 2012).

Pemanfaatan lahan untuk pembangunan perumahan-perumahan mewah sebagai tempat peristirahatan menjadi sasaran pembangunan di wilayah ini. Kondisi alam yang sejuk dan pemandangan yang indah menjadi potensi yang dimanfaatkan oleh pihak investor. Selama penelitian lapangan, penulis mengamati bahwa jumlah rumah peristirahatan berbentuk vila, *resort*, bahkan hotel cukup banyak dan jaraknya berdekatan satu sama lain. Hal ini pun diakui oleh Pak Supena berdampak pada semakin tingginya harga tanah di wilayah ini namun yang paling dipenulisngkan adalah hampir seluruh warga masyarakat tidak lagi memiliki lahan.

“Justru dulu lahannya juga kan lahan Sukanagalih kan dijual..dari petani jadi wilayah Kota Bunga masih masuk wilayah Sukanagalih. Sebagian ada yang masuk Desa Batulawang ada yang Sukanagalih tapi paling luas Desa Sukanagalih. Sukanagalih itu udah jadi perumahan yang masuk Kota Bunga kurang lebih 200 hektar, lantas pengusaha *resort* kurang lebih 60 hektar, Galaxy (vila) ya sekitar 15 hektar, dan sisanya perumahan semua. (Masyarakat menjadi) buruh tani karena tanahnya dijual. Kadang-kadang ada yang dibikin bangunan, ada juga yang masih dibikin pertanian, jadi orang sini selaku penggarap.” (wawancara dengan Pak Supena tanggal 29 Februari 2012).

Selain potensi pariwisata, Desa Sukanagalih merupakan desa pertanian yang subur dan menjadi salah satu penghasil sayur-mayur, palawija, dan padi di Kecamatan Pacet. Dalam data tentang potensi pertanian, tercatat jumlah kepemilikan lahan pertanian yang ditanami tanaman pangan. Pada tahun 2011, hasil padi yang dihasilkan sebanyak 3 ton/hektar dari 95 hektar luas sawah yang ditanami. Sementara itu, jagung (palawija) mencapai hasil 5 ton/hektar dari 50 hektar yang ditanami. Lahan seluas 0,2 hektar yang ditanami ubi kayu menghasilkan 5 ton/hektar serta dan 4,5 ton/hektar ubi jalar dihasilkan dari lahan seluas 0,25 hektar. Disamping data-data tertulis tersebut, penulis pun mengamati di lahan-lahan Sampalan maupun Barudawa 2 ditanami berbagai macam sayur-mayur dataran tinggi seperti wortel, bawang daun, pokcoy, labu, dan sawi oleh para penggarap. Sayangnya, data tentang sayur-mayur yang dihasilkan dari kegiatan pertanian darat ini tidak tercatat dalam data administrasi desa.

Tanaman sayur-mayur pun menjadi pilihan banyak penggarap maupun pihak investor (pemilik modal) di wilayah ini. Seperti dikatakan oleh seorang penggarap bahwa menanam sayur sangat tergantung pada harga di pasaran. Meskipun begitu, iklim dan lahan yang subur menjadi alasan mereka (petani maupun penggarap) untuk menanam sayur-mayur dan beberapa jenis bunga-bunga. Dengan demikian, wilayah Cipanas dan sekitarnya terkenal sebagai penghasil sayur dan bunga.

“Yaa..sugan aja Bu. Kadang-kadang harga sayur lagi bagus, kadang-kadang turun banget, rugi banget. Minjem uang 1 juta dibawa ke kebon, begitu panen ga bisa balik. Kembalinya malah dari yang lain aja. Kalau nanam singkong belum pernah karena butuh modalnya besar. Tanahnya bagus untuk tumpang sari sayur apa aja. Mau pokcoy bisa, mau wortel bisa, mau labu, atau bawang juga bisa.”
(wawancara dengan Pak Makmur tanggal 23 Februari 2012).

Oleh karena itu, sampalan menjadi salah satu lokasi yang dimanfaatkan oleh masyarakat (sebagai penggarap) untuk pertanian darat. Keberadaan mereka jauh sebelum masuknya perusahaan ke lokasi tersebut membuat perusahaan mendapat tantangan yang cukup besar untuk memperoleh dan menguasai akses di sana. Paling tidak selama hampir dua tahun terakhir ini, Pak Asep harus menghadapi berbagai macam tuntutan (ganti rugi) dari para penggarap.



Gambar 2. 3. Saat Pak Adibrata (Pimpinan PT. EKM) berkunjung ke lokasi Sampalan (sumber: dokumentasi penelitian).

Kata “sampalan” sendiri menurut Pak Asep berarti tanah lapang yang menurut cerita dari para pendahulunya, digunakan sebagai tempat untuk hewan-hewan ternak seperti kerbau mencari makan. Para petani biasanya akan membawa

hewan-hewan ternak mereka ke tanah lapang tersebut menjelang sore hari. Status lahan di lokasi ini semula adalah milik warga masyarakat setempat yang semenjak tahun 1996 berubah menjadi milik seorang pengusaha (bernama Pak Iw) yang berdomisili di Jakarta.

Salah seorang informan yang menceritakan kepada penulis tentang peralihan kepemilikan lahan ini adalah Pak Makmur, yang ternyata adalah satu dari sejumlah warga masyarakat Desa Sukanagalih yang ketika awal kepemilikan lahan ikut memanfaatkannya. Pak Makmur mengatakan bahwa Pak Iw membeli lahan seluas 96 hektar di lokasi ini dari warga sekitar yang menjual lahan mereka karena berbagai macam alasan. Proses transaksi pun selesai hingga Pak Iw dinyatakan sebagai pemegang hak milik (dengan bukti sertifikat) atas lahan sejak tahun 1996.

Ketika awal kepemilikannya, lahan ini dimanfaatkan oleh Pak Iw untuk ditanami jagung. Sekitar 95 hektar lahan yang topografinya berbukit tersebut ditanami jenis palawija tersebut. Pak Makmur dan sejumlah warga sekitar diberikan kepercayaan untuk menanam jagung namun tidak berlangsung lama. Seperti yang dikisahkan Pak Makmur kepada penulis ketika mewawancarainya di lahan garapan milik Pak Iw.

“Dulu saya pernah kerja buat Pak Iw, pernah ditanam jagung semua..saya kan karyawannya, tapi bukan seperti pegawai. Sekitar 95 hektar waktu tahun 1999 ditanam jagung..orang sini disuruh nanam jagung..saya dapat 1 hektar. Dulu tiap orang sini dikasi 1 hektar..ada yang 2 hektar, gimana sanggupnya. Sebelum itu kosong. Cuma sepintas pak Iw juga..cuma semusim aja, mungkin rugi atau apa..” (wawancara tanggal 23 Februari 2012).

Berbeda dengan cerita Pak Makmur, versi pihak pemerintah desa menyatakan bahwa lahan ini dibeli Pak Iw pada tahun 2004 namun informasi lain yang diberikan oleh pemerintah desa memperkuat bukti kepemilikan atas lahan tersebut. Ketika itu, Pak Iw melalui perusahaan miliknya (PT. OG) segera mengurus segala dokumen berupa sertifikat hak milik dan menurut informasi pemerintah desa, lahan itu direncanakan untuk pembangunan perumahan mewah (*real estate*) sebagai investasi Pak Iw di wilayah ini.

“Ya menggarap aja daripada tanah nganggur. Tanah (Pak) Iw kan tanah sertifikat asli, jadi peruntukannya dia itu ya mau bohong kek mau benar kek urusan dia. Dia mengakunya akan membangun *real*

estate sebelum Kota Bunga nih Pak Iw udah ngebebasin. Kalo dia mau ngebangun, sejak dulu aja dibangun sama dia bebasin tanah 80 hektar. Bebasin ke masyarakat. Pake SPH bahkan sebelum SPH bikin akte dulu. Itu namanya surat pelepasan hak menjadi hak PT.” (wawancara dengan Sekdes Sukanagalih tanggal 29 Februari 2012).

Sementara Pak Makmur sendiri terlihat ragu ketika penulis tanyakan peruntukkan lahan ini oleh pemiliknya. Ia mengatakan bahwa yang ia tahu hanyalah sebelum ditanami jagung seluas puluhan hektar, lahan tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya. Begitupun setelah penanaman jagung selesai dalam satu musim, lahan kembali terbengkalai. Inilah yang menyebabkan lahan dimanfaatkan oleh banyak penggarap. Seperti diutarakan oleh Pak Makmur berikut.

“Yaa *gerung* (dipenuhi rumput-rumput liar akibat tidak dikelola sekian lama) lagi..terus masyarakat menggarap..tapi nggak semua menggarap. Daripada jadi pengangguran, mending menggarap tanah kosong aja.” (wawancara tanggal 23 Februari 2012).

Lahan itu dianggap terbengkalai oleh masyarakat dan menjadi peluang warga masyarakat yang tidak memiliki lahan untuk berkebun sayur-mayur. Seperti halnya Pak Makmur yang telah menjadi penggarap di lokasi ini sejak sekitar tahun 1996 atau 1997 dengan cara membersihkan (istilah yang digunakan oleh informan adalah “membuka”) lahan terlebih dahulu kemudian mulai meAsepm berbagai jenis sayur-mayur dengan cara tumpang sari (menanam bermacam jenis sayuran pada sebidang lahan).

Bagi Pak Makmur dan para penggarap lainnya, upaya ini tidak selalu mudah dilakukan mengingat modal yang harus mereka keluarkan cukup besar. Untuk membuka lahan seluas 3.000 sampai 4.000 meter persegi, Pak Makmur harus mengeluarkan uang sekitar Rp. 1.000.000,-. Pengeluaran itu belum termasuk membeli bibit sayur, pupuk, dan obat untuk hama sayuran.

“Besar modalnya..Bapak dulu menyuruh orang untuk membabat biayanya 100 ribu satu patok (sekitar 400 meter persegi). Jadi dapatnya berapa patok aja. Habis 1 juta untuk 4000 meter ini, borongan untuk 2 orang. Itu sejuta bersihin doang. Kalau nyangkut Bapak sendiri, yaa kalau udah kecapean baru nyuruh orang lain.” (wawancara tanggal 23 Februari 2012).

Untuk dapat menggarap lahan di lokasi ini, para penggarap tidak meminta ijin langsung kepada pemilik lahan karena menurut penuturan Pak Makmur, Pak Iw telah mempercayakan 3 orang warga Desa Sukanagalih untuk menjaga lahannya tersebut. Melalui salah seorang dari merekalah, para penggarap memperoleh ijin untuk menanam sayur-mayur selama mereka mampu. Hanya satu syarat yang diajukan oleh pemilik lahan, yaitu apabila suatu saat pemilik lahan ingin memanfaatkan lahan tersebut maka setiap penggarap tidak diperkenankan mengajukan ganti rugi.

Hingga hari ini, para penggarap telah memanfaatkan sekitar 10 atau 20 persen luas dari total luas lahan di lokasi sampalan milik Pak Iw. Perkiraan ini penulis peroleh dari keterangan Pak Asep (pengawas lapangan) yang telah bertugas selama 2 tahun terakhir ini. Tidak sedikit pula dari mereka yang membangun gubuk kecil sambil menggarap lahannya. Ketika pengamatan di lapangan, penulis sempat mengambil gambar lahan yang dikelola oleh para penggarap dari kejauhan.



Gambar 2. 4. Pemandangan petak-petak lahan yang dikelola oleh penggarap (sumber: dokumentasi penelitian).

Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan rencana awal pemilik lahan menjadi peluang bagi warga masyarakat untuk menggarap di lokasi ini. Sebagai penggarap yang telah meminta ijin kepada “orang kepercayaan” pemilik lahan, orang seperti Pak Makmur dapat mengakses lahan yang bukan miliknya untuk mengambil keuntungan dari lahan tersebut. Inilah gambaran kondisi lahan dan

akses terhadapnya di lokasi pertama yang penulis amati. Selanjutnya penulis akan mendeskripsikan kondisi lahan di lokasi Barudawa 2, atau yang biasa disebut warga sekitar dengan lokasi KUD.



Gambar 2. 5. Salah satu sisi lokasi Sampalan yang ditanami singkong oleh perusahaan (sumber: dokumentasi penelitian).

II. 2. 5. Lokasi Barudawa 2 (Blok KUD)

Ketika penulis menginjakkan kaki pertama kali di lokasi ini, penulis heran mengapa lokasi ini disebut dengan lokasi KUD? Paling tidak, sebutan itu penulis dengar dari Pak Asep, yang ketika itu menemani penulis melihat-lihat tanaman singkong milik PT. EKM yang tertanam di lokasi ini. Pak Asep menyebutkan luas lahan Barudawa 2 sekitar 115 hektar dengan topografi yang berbukit dan curam. Hanya sebagian lokasinya berada di desa Sukanagalih dan sebagian lagi menjadi bagian administratif Desa Batulawang yang termasuk ke dalam wilayah administratif Kecamatan Cipanas.



Gambar 2. 6. Proses perawatan singkong di lokasi Barudawa 2 (sumber: dokumentasi penelitian).

Jarak antara lokasi sampalan dan barudawa 2 sekitar 3 km dan dipisahkan oleh sebuah gapura bertuliskan nama sebuah yayasan (dengan singkatan MR). Untuk mencapai ke lokasi ini, penulis biasa menumpang motor Pak Asep ketika ia harus melakukan koordinasi dengan Pak Joko¹⁹, pengawas lapangan yang ditugaskan di lokasi ini. Kondisi jalan yang masih tanah (bukan aspal) dan berbatu membuat penulis selalu merasa was-was setiap kali melewati jalan ini. Berikut bangunan yang menjadi penanda batas antara kedua lokasi.

Untuk mengetahui sejarah singkat lokasi ini, penulis mendatangi Pak Robi, sekretaris KUD. Ia menceritakan kepada penulis bahwa lokasi Barudawa itu terbagi menjadi 2 sehingga dinamakan Barudawa 1 dan Barudawa 2. Khusus lokasi yang menjadi pengamatan penulis di lapangan yaitu Barudawa 2, Pak Robi mengatakan bahwa sebelum dikelola oleh warga masyarakat (penggarap) seperti yang sekarang terlihat, lokasi tersebut adalah lahan berstatus Hak Guna Usaha (HGU) yang dikelola oleh mantan pengusaha besar jaman Orde Baru.

Lahan yang berstatus HGU tersebut dimanfaatkan oleh sang pengusaha untuk perkebunan teh. Ia pun membangun pabrik pengolahan teh di sekitar lokasi tersebut. Luas lahan yang disewa dari negara itupun sangat luas, yaitu sekitar 1.200 hektar. Sementara kontrak yang ditandatangani oleh pihak pengusaha baru berakhir pada tahun 2022. Sayangnya hingga kini hanya sebagian kecil saja yang

¹⁹ Nama informan disamarkan. Selanjutnya digunakan demikian.

masih dimanfaatkan untuk perkebunan teh. Seperti yang dikisahkan oleh Pak Robi.

“Kalau bicara yang masih aktif untuk perkebunan hanya sekitar 15 atau 20 persen..kurang lebih 120 hektar, kan HGU nya totalitas 1.200 hektar. Kemarin ada kegiatan lagi tetapi nggak jalan.” (wawancara tanggal 18 April 2012).

Di sisi lain, lahan seluas 80 hektar (dari total luas 210 hektar yang menjadi bagian dari lahan berstatus HGU tersebut) di lokasi ini juga dimanfaatkan oleh sang pengusaha untuk membangun peternakan ayam terbesar se-Asia Tenggara. Mulailah ia membangun kandang ayam ratusan unit, lengkap dengan fasilitas pelengkap yang dibutuhkan. Pembangunan kandang ayam sendiri dilakukan sekitar tahun 1988. Dengan memanfaatkan tenaga-tenaga profesional di bidang peternakan hewan, sang pengusaha meluaskan usahanya tersebut. Selain itu, menurut Pak Robi, ketika itu dibentuk pula sebuah institusi yang ditujukan sebagai wadah usaha yang diberi nama KUD Batulawang Keluarga Bahagia.

“Selain itu, untuk sentral peternakan ayam, terbesar se-Asia Tenggara. Jalan sih sekitar 3 sampai 4 tahun. Setelah itu, KUD kan dibentuk dan didistribusikan dari berbagai tempat, dari berbagai elemen..ada dari TNI, karyawannya Pak Pro (sang pengusaha), pemerintah (bupati termasuk kepala desa). Dulu KUD di sini kayak miniaturnya Indonesia.” (wawancara dengan Pak Robi tanggal 18 April 2012).

Sejak berdirinya koperasi bentukan sang pengusaha dan orang-orang kepercayaannya di lokasi tersebut, nama KUD menjadi identik dengan nama lokasi di mana institusi itu berada. Hingga kini, masyarakat pun terbiasa menyebut lokasi Barudawa dengan sebutan lokasi KUD. Kendati berfungsi sebagai wadah untuk mengembangkan usaha dan memajukan perekonomian para anggotanya, institusi inipun dibentuk terkait dengan pengelolaan lahan oleh para anggotanya ketika itu.

“Karena KUD kan punya *basic* yah..punya historis mengenai 4 blok lahan yang ini, Cikujang, terus Batu Tumpang, Cinangka..itu Lembah Duwur. Itu siy sebelumnya anggap saja yang punya HGU terperosok lah..terus SPH-nya belum lepas..kepada institusi, baru wacana..kan pada waktu itu mau jadi hak milik oleh pihak Pak Pro karena dulu kan kandang ayam ada 400 unit. Di dalamnya ada bangunan rumah tipe 21, kandang lengkap, dan anggota atau

peternak diberikan janji dalam kurun 5 tahun itu menjadi hak milik. *Draft* perjanjiannya sudah ada, jadi sambil berjalan, pihak Pak Pro sebagai “bapak angkatnya” akan mengurus status tanahnya. Tetapi mungkin karena peternakannya bangkrut..kami sebagai pihak peternakan (yang dijanjikan) merasa tertipu juga oleh pihak Pak Pro. Janji-janji yang diberikan..sekian tahun bisa beli mobil, tapi hasilnya ditinggalkan..kalau tidak cari sendiri. Makanya kami di sini bagaimanapun bertahan.” (wawancara dengan Pak Robi tanggal 18 April 2012).

Oleh karena itu, anggota KUD yang kini berada di bawah kepemimpinan yang baru, merasa berhak mengklaim lahan-lahan yang berada di beberapa lokasi tersebut, termasuk lokasi Barudawa 2 yang sejak 2 tahun lalu ditanami singkong oleh PT. EKM. Pak Robi mengaku bahwa sejak ditinggalkan oleh sang pengusaha pemegang HGU, lahan-lahan di lokasi “penguasaan” KUD dimanfaatkan pula oleh warga masyarakat yang ingin menggarap lahan. Kendati demikian, tidak semua penggarap dianggap “legal” oleh pihak KUD karena menurut Pak Robi hanya penggarap yang merupakan anggota KUD yang “berhak” untuk menggarap.



Gambar 2. 7. Salah satu area di lokasi Barudawa 2 yang ditanami wortel oleh penggarap (sumber: dokumentasi penelitian).

Kondisi menjadi semakin rumit ketika muncul pemilik lain yang mengklaim bahwa lahan seluas 66 hektar yang berada di lokasi Barudawa 2 adalah miliknya. Untuk menelusuri informasi tentang keberadaan sebuah yayasan, yang menurut cerita Pak Asep telah mengeluarkan sekian miliar untuk membeli lahan tersebut, penulis mendatangi salah seorang pegawai yang tinggal di salah

satu rumah sederhana yang dibangun oleh yayasan. Bersama dengan istrinya, Mas Supri telah tinggal selama kurang lebih 15 tahun di lokasi ini.

Mas Supri menyatakan bahwa yayasan memiliki dasar yang kuat untuk mengklaim lahan ini. Sejak transaksi jual-beli lahan yang terjadi antara pihak yayasan dan salah seorang kerabat dekat sang pengusaha pemilik HGU di lokasi ini, sekitar tahun 1995, yayasan memegang Akta Jual Beli (AJB) sebagai bukti sah kepemilikan lahan. Dengan berpegang pada dokumen tersebut, hingga saat ini pihak yayasan pun masih mempertahankan lahan dengan cara menanam tanaman keras berupa kayu sengon dan membangun beberapa tempat tinggal bagi para karyawan –termasuk Mas Supri– yang ditugaskan menjaga dan mengelola lahan.

Sebagai karyawan, Mas Supri memilih untuk tidak terlalu ikut campur masalah klaim yayasan atas lahan tersebut. Ia mengatakan bahwa yang terpenting baginya hanyalah bertani khususnya menanam cabai besar, yaitu paprika. Namun ketika penulis menanyakan soal kehadiran para penggarap di lokasi yang diklaim oleh yayasan, Mas Supri terlihat tidak menyetujui kehadiran mereka terlebih ketika mereka melakukan jual-beli lahan garapan seperti yang banyak terjadi di wilayah ini.

“Yang digarap sekitar 15 hektaran. Biasanya gini..misalnya saya menggarap di satu titik kemudian saya bosan terus penulis *over* alih garapan saya..begitu seterusnya (kemudian Pak Asep menjelaskan bahwa *over* alih garapan itu berarti mengganti rugi biaya pengolahan lahan dan bukan berarti membeli lahan). Penggarap juga nggak cuma orang lokal tetapi juga dari luar kabupaten..ada orang Garut, orang Cianjur yang jauh-jauh juga banyak.” (wawancara tanggal 25 Januari 2012).

Hal menarik juga penulis dapatkan ketika Pak Robi sebagai pihak yang sebenarnya “berseberangan” dengan pihak yayasan terkait masalah lahan, menyatakan bahwa para penggarap yang ia sebut “liar” adalah individu-individu yang tidak mendapat izin KUD maupun yayasan. Ia pun mengakui bahwa pihak yayasan memiliki alasan untuk mempertahankan lahan yang mereka klaim.

“Ya, kalau itu (masalah klaim lahan) mungkin dia (yayasan) ada dasarnya..beli dari salah seorang yang katanya dari masih keluarganya Pak Pro..adalah itu..tapi semenjak itu kalau dari proses hukumnya dari pengadilan Cianjur dulu, (pihak Pak Pro) menang dari pihak yayasan, terus (pihak yayasan) mengajukan banding di

Pengadilan Tinggi Jawa Barat, kalau nggak salah kalah sih..” (wawancara tanggal 18 April 2012).

Sementara itu, ketika penulis menanyakan kejelasan status lahan tersebut kepada pihak desa, Pak H. Ujang mengatakan bahwa Desa Sukanagalih tidak mengakui status HGU yang peruntukannya adalah perkebunan teh berskala besar. Awalnya ia mengatakan bahwa lahan untuk perkebunan tidak termasuk ke dalam wilayah Desa Sukanagalih, tetapi ketika melihat peta yang terpampang di kantor desa, lahan Barudawa 2 sebagian berada dalam wilayah administrasi desa ini. Di sisi lain, penjelasannya mengisyaratkan bahwa pihak yayasan adalah pihak yang lebih “berwewenang” dalam masalah kepemilikan lahan di lokasi tersebut.

“Sebenarnya dalam buku kami sejak dulu saya bekerja di sini atau kepala desa, pendahulu saya di Sukanagalih tidak ada perkebunan. Tidak ada tanah HGU. Itu intinya. Mangkanya anggaphlah seolah-olah kalau bahasa orang pertanian itu atau politiknya anggaphlah tanah tidak bertuan. Nah itu lah *diclaim*. Saya juga nggak tau lah karena saya bukan pemiliknya, saya pengamat di desa..kalau pihak desa pemerintah desa mah Bapak pemilik kebun teh yang mengurus bidang pertanaman sama dengan saya, sebetulnya kepanjangan tangan saya, sekretaris desa yang mengurus bidang pertanahan Pak Supena. Ya kalau ada kesulitan apa ke saya ke senior lah. Kalau nanya ke orang lain mah gak bakalan bisa jawab atuh nggak nyambung, kalo saya mah nyambung, karena saya pelaku utama saat itu..pengadilan itu kejaksanaan. Nah untuk ini, jadi sebenarnya berbicara dengan itu juga tidak ada artinya. Kalau status mah ya status kan yang menentukan bukti kepemilikan yang sah kan itu pengadilan. Walaupun sertifikat, masyarakat kalau belum ada bukti keputusan pengadilan bukan bukti kepemilikan yang mutlak. Ini sertifikat ya sah, tapi nggak mutlak kepemilikannya, yang menentukan ya pengadilan juga. Satu saat ada yang menggugat kan ahli warisnya tau siapa.” (wawancara tanggal 29 Februari 2012).

Informasi yang juga penulis peroleh dari pihak BPN tentang lahan di lokasi ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan persepsi pemerintah desa bahwa wilayah Desa Sukanagalih tidak ada yang diperuntukkan bagi perkebunan teh berskala besar (seperti klaim Pak Pro maupun KUD). Meskipun demikian, ketika penulis menanyakan tentang status kepemilikan oleh yayasan, pihak BPN pun meragukannya.

“Ya..karena kan memang kalau lahan dari dulu diperdebatkan itu..memang tidak dicantumkan karena Sukanagalih pemekarannya Batulawang..karena tidak berbunyi di situ..Sukanagalih (tidak) ada HGU, yang ada Batulawang. Di desa paling detil itu. (Kalau soal klaim sebuah yayasan di lokasi Barudawa 2) itu salah sebenarnya, Pak Pro-nya terlalu baik sebenarnya. Itu AJB “bodong”, maksudnya nggak bener..kalau HGU kan. Memang yang salah waktu itu camat atau PPAT yang mengeluarkan itu kan..aktanya. Kita di BPN melihat itu kan tanah HGU, ditembok begitu..kalau Sukanagalih nggak punya kita, berarti kan milik adat, nah gitu (versi pemerintah Desa Sukanagalih). Tapi kalau kita kan lihat peta..peta nggak berbohong kan..lahannya kan perbukitan begitu.” (wawancara dengan Pak Gundham tanggal 24 April 2012).

Hingga hari ini, baik pihak KUD maupun karyawan yayasan mengakui bahwa lahan yang mereka kelola masih dalam sengketa. Meskipun disayangkan oleh Pak Robi selaku pengurus KUD bahwa pihak Pak Pro yang memenangkan gugatan atas lahan tersebut, tidak juga mengambil tindakan nyata untuk mengelola lahan. Sementara di sisi lain, pihak yayasan tetap mempertahankan aset yang telah dibelinya dengan menggunakan uang jemaahnya. Hal itu juga dibenarkan oleh Pak Robi sebagai salah satu pengelola lahan yang masih bersengketa tersebut.

“Ya, itulah salahnya..semenjak dapat dari pengadilan, PK-nya ditolak. Ya, objek sengketanya dibiarkan begitu. Seharusnya pada saat itu pihak Pak Pro minta eksekusi aja kepada yayasan, akhirnya yayasan tetap..ya tanah-tanah di sana diklaim oleh yayasan, penggarap setempat nggak bisa..ya, tumpang tindih.” (wawancara tanggal 18 April 2012).

Masing-masing pihak mempertahankan argumennya, namun ketika membahas tentang keterkaitan antara lahan di lokasi ini dan PT. EKM, penulis memperoleh informasi dari Pak Asep bahwa ketika akan membuka lahan di lokasi yang dianggap potensial ini, pihak PT. EKM yang diwakili oleh Pak Heru terlebih dahulu mendatangi pihak KUD untuk melakukan kerja sama. Hal itu dilakukan setelah Pak Heru memperoleh informasi bahwa pihak yang mengelola lahan di lokasi Barudawa 2 tersebut adalah pihak KUD.

Sayangnya setelah dilakukan kontrak menyewa lahan dengan pihak KUD, muncul permasalahan. Datang keluhan (dan protes tepatnya) dari pihak yayasan ketika pihak PT. EKM semakin memperluas area penanaman singkong. Terjadilah

negosiasi baru antara pihak PT. EKM dan yayasan. Menurut Pak Asep, bagi perusahaan yang terpenting adalah mereka dapat menanam singkong di lahan-lahan yang “aman” sehingga dilakukanlah kontrak perjanjian yang baru antara PT. EKM dan yayasan. Sekalipun pihak perusahaan menderita kerugian karena telah melakukan kontrak dengan pihak KUD terlebih dahulu.

Dengan demikian, pernyataan Pak Asep tentang lahan yang “bergejolak” di lokasi Sampalan dan Barudawa 2 ini memiliki argumen yang cukup kuat. Deskripsi ini juga diharapkan mampu memperkuat argumen penulis untuk memilih kedua lokasi tersebut sebagai fokus dalam pengamatan. Terkait dengan konteks pembukaan lahan untuk penanaman singkong PT. EKM, perolehan lahan menjadi satu hal yang tidak mudah dan sederhana prosesnya sehingga pertanyaan yang diajukan penulis adalah “siapa saja pihak yang terlibat dalam masalah akses dan bagaimana mekanisme akses yang ditempuh oleh perusahaan (PT. EKM) untuk menjamin ketersediaan bahan baku singkong agar produksi bioetanol dapat dilakukan secara berkelanjutan?”. Pertanyaan ini akan terjawab melalui temuan-temuan penelitian yang penulis uraikan pada pembahasan dua bab berikut ini.

BAB III

RELASI SOSIAL DAN JEJARING PARA AKTOR

DALAM AKSES LAHAN

Sebelum membahas tentang mekanisme akses oleh perusahaan, bagian ini akan mendeskripsikan tentang relasi yang terjalin dan jejaring yang menghubungkan antara satu aktor dan aktor-aktor yang lain. Keberadaan para aktor dengan ide-ide, kepentingan-kepentingan, dan tujuan-tujuan mereka tidak dapat dilepaskan dari upaya untuk memelihara hubungan kekuasaan yang dimiliki. Untaian jejaring (*strand of webs*) dan *bundles of power* kemudian menjadi alat-alat, proses-proses, dan hubungan atau relasi-relasi di mana memungkinkan para aktor untuk memperoleh, mengendalikan, dan memelihara akses terhadap sumber daya.

III. 1. Aktor-aktor dalam Akses Lahan

Pada bagian awal bab ini penulis mendeskripsikan pihak-pihak yang penulis sebut sebagai “aktor”, yang terlibat dalam proses akses dan kepemilikan terhadap lahan di lokasi-lokasi yang menjadi fokus pengamatan. Melalui para aktor tersebut akan terlihat bagaimana beberapa orang atau individu mengendalikan akses terhadap sumber daya tertentu, sementara individu-individu lainnya harus mempertahankan akses mereka melalui pihak-pihak yang memiliki kendali (*control*). Analisis akses sangat membantu dalam memahami *mengapa* beberapa orang atau institusi memperoleh keuntungan dari sumber daya yang ada dan memiliki hak, sementara yang lain tidak memperoleh keuntungan atau memiliki hak terhadap sumber daya tersebut.

Aktor, baik individu maupun institusi, antara satu dan yang lain tidak selalu menunjukkan “suara” yang sama, namun pada saat yang berbeda mereka memunculkan tindakan yang sama demi tercapainya tujuan yang dikehendaki. Seperti Mosse (2005: 9) mengatakan bahwa meskipun terjadi fragmentasi dan ketidaksepakatan, para aktor secara konstan saling terikat (...*constantly engaged*)

dalam menciptakan keteraturan dan kesatuan (*order and unity*) melalui tindakan-tindakan politik (*political acts of composition*).

Dalam pengamatan yang penulis lakukan, aktor-aktor bermunculan dengan berbagai kepentingan. Untuk mempermudah pemaparan, penulis melakukan kategorisasi terhadap para aktor tersebut sehingga akan terlihat bagaimana kepentingan itu saling bertemu dan berkontestasi. Perkenalan yang penulis mulai dengan pihak perusahaan (PT. EKM) menjadi “pintu masuk” bagi penulis menuju “ruang-ruang” yang lain. Oleh karena itu, profil para aktor penulis mulai dari individu-individu yang menjadi bagian dari perusahaan.

III. 1. 1. PT. EKM

Kemampuan untuk mengambil keuntungan dari berbagai sumber daya dimediasikan oleh bermacam kendala yang dibentuk dari kerangka politik-ekonomi dan budaya di dalam akses di mana sumber daya tersebut diupayakan, yang disebut sebagai “mekanisme akses struktural dan relasional”. Blaikie menjelaskan bahwa identitas modal dan sosial mempengaruhi prioritas akses terhadap sumber daya. Blaikie dalam hal ini menganjurkan untuk mengeksplorasi bagaimana teknologi, modal, pasar, pengetahuan, otoritas, identitas sosial, dan hubungan-hubungan sosial dapat membentuk atau mempengaruhi akses (Ribot dan Peluso, 2003: 164-165).

Dalam kasus yang diamati, penulis melihat bahwa perusahaan memiliki akses terhadap beberapa kategori yang disebutkan di atas. Pak Adi misalnya, sebagai pimpinan perusahaan, ia memiliki akses terhadap pengetahuan, modal, teknologi, dan pasar sehingga mampu menghasilkan produk-produk energi terbarukan khususnya bioetanol. Selain itu, ia pun memiliki akses terhadap relasi-relasi sosial yang dimanfaatkannya untuk memperoleh akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnisnya, termasuk akses terhadap tenaga kerja dan kesempatan kerja (Ribot dan Peluso, 2003: 167).

Melalui perusahaan pula penulis mengenal Pak Heru dan Pak Asep, aktor-aktor yang mendukung perkembangan dan keberlanjutan produksi bioetanol dengan cara menjamin ketersediaan lahan di wilayah Kecamatan Cipanas dan Pacet. Pak Heru adalah orang yang dipercayakan perusahaan untuk memperoleh

lahan di wilayah ini. Informasi tentang keberadaan lahan-lahan yang potensial ia peroleh melalui relasi pertemanan atau kolega yang dimilikinya sehingga dalam 2 tahun ini, ia berhasil memperoleh akses untuk menanam singkong di 5 lokasi yaitu Mariwati, Cikole, Barudawa 2 (ketiganya berada di Kecamatan Cipanas), Kota Bunga, dan Sampalan (keduanya berada di Kecamatan Pacet).

Pak Heru diberikan wewenang sebagai manajer lapangan yang membawahi beberapa pengawas yang berjumlah 5 orang di wilayah tersebut. Sementara Pak Asep adalah pengawas atau koordinator perkebunan di lokasi Barudawa 2 sekaligus orang yang paling dipercaya oleh Pak Heru. Semula Pak Asep ditugaskan di lokasi Barudawa 2, tetapi sejak setahun terakhir ia dipindahkan ke lokasi Sampalan karena masalah akses lahan di lokasi cukup “bergejolak”. Kemampuannya memelihara akses di lokasi Barudawa 2 menjadi alasan Pak Heru mempercayakan Pak Asep untuk “memegang” lokasi ini.

Pak Asep merupakan informan kunci yang berusia 33 tahun berlatar belakang etnis Sunda, berasal dari sebuah kota di Jawa Barat, dan tinggal menetap di Cipanas sejak tahun 2000. Sekitar tahun 2008 ia menikah dan setahun yang lalu ia dan keluarganya pindah ke sebuah perumahan, bertetangga dengan Pak Heru dan Pak Joko (rekan-rekannya di BBS). Dengan bahasa Sunda yang dikuasainya, Pak Asep tidak menemui kesulitan untuk membangun hubungan dengan masyarakat (penggarap) di sekitar lokasi penanaman singkong.

Para pengawas lain yang menjadi informan adalah Pak Joko (lokasi Sampalan) dan Pak Nana (lokasi Cikole). Berbeda dengan Pak Asep, Pak Joko dan Pak Nana baru sekitar setahun terakhir bergabung dengan perusahaan (PT. EKM). Keduanya juga rekan atau teman Pak Heru sehingga ketika ada pergantian pengawas, Pak Heru menawarkan posisi tersebut kepada keduanya. Pak Joko berusia 32 tahun, berasal dari Jawa Tengah, dan bertugas menggantikan Pak Asep (yang dipindahkan ke lokasi sampakan). Sementara Pak Nana berusia 33 tahun, berasal dari salah satu kota di Jawa Barat, dan merupakan kawan dekat Pak Asep.

Seluruh koordinator atau pengawas lapangan bertugas untuk memastikan bahwa proses “pembukaan” lahan, penanaman, perawatan, hingga panen berjalan sesuai rencana (selama kurun waktu sekitar 12 bulan). Bersama para petani di lokasi lahan, mereka bekerja dari pukul 07.00 hingga 16.00 WIB setiap hari

kecuali hari Jumat. Para pengawas juga berkewajiban memberikan laporan harian kepada Pak Heru tentang kegiatan yang dilakukan di lokasi setiap harinya. Laporan tersebut akan direkap oleh Pak Heru untuk dilaporkan kepada pimpinan perusahaan.

“Masuk jam 7 pulang jam 4 (sore). Kalau masuknya jam 8, pulangnya jam 5. Mangkanya petani itu di absen, pagi di absen. Si Ahmad hadir, nggak ada coret, nanti gajinya cuma 5 hari. Dalam seminggu itu kan 6 hari, sabtu minggu senin selasa rabu kamis, setorkan absen ke saya. Absen ke saya, saya *pack* ke PT, dari PT transfer gaji ke saya. Gitu kan *sharing*-nya, teknisnya. Kalau petani itu 5 hari ya 5 hari kita bayar. Jum’at libur pak tidak ada aktivitas. Adapun kita aktifkan hari jum’at tersita waktu, 2 jam berharga sekali. Karena kalau hari jum’at jam 11 udah berhenti kerja, nanti masuk lagi jam 2, berapa jam udah tersita. Sekarang 2 jam kali 40 petani, satu petani satu cangkul, itu udah hampir berapa ratus meter kita tersita, PT dirugikan, kan seperti itu. Mangkanya benar sistem diliburkan hari jum’at. Mangkanya Ibu kaget tadi sehari bisa nyampe saya buka lahan 5-10 hektar sehari, dengan 9 unit traktor.” (wawancara dengan Pak Heru tanggal 7 September 2011).

Selain mengawasi kegiatan (bagian dari kendali akses) yang berlangsung di lokasi, pengawas juga bertanggung jawab untuk memelihara akses perusahaan di lokasi tempat mereka bertugas. Pemeliharaan akses dilakukan terkait dengan keberadaan pihak-pihak lain yang juga mengakses lahan, seperti para penggarap, pengelola (orang-orang kepercayaan pemilik lahan), atau pihak-pihak yang lain. Demi kelancaran tugas tersebut, pengawas dibantu oleh seorang mandor (H. Tatang) dan teknisi (Mang Paul). Haji Tatang menjadi mandor bagi para pekerja yang dibawanya dari Cianjur Selatan dan Mang Paul bertanggung jawab mengecek kesiapan traktor yang dibutuhkan.



Gambar 3. 1. Pengawas sedang mengawasi salah satu kegiatan (penanaman dan pemupukan) yang sedang berlangsung di lokasi sampalan (sumber: dokumentasi penelitian).

III. 1. 2. Pengelola Lahan di Lokasi Sampalan (Desa Sukanagalih) dan Barudawa 2 (Desa Batulawang)

Seperti telah disinggung sebelumnya bahwa lokasi Sampalan seluas kurang lebih 96 hektar dimiliki oleh seorang pengusaha asal Jakarta yang bernama Pak Iw. Lahan yang berbukit-bukit tersebut dipercayakan kepada beberapa warga masyarakat sekitar seperti Pak Panaheli (alm.), Pak Uud, Pak Komar (menantu Pak Panaheli), dan Pak Kohar. Disamping lahan untuk pertanian darat yang ditanami sayur-mayur dan palawija, Pak Iw juga memiliki lahan persawahan. Melalui orang-orang kepercayaan inilah Pak Iw menyerahkan wewenang untuk menjaga lahan miliknya tersebut. Menurut pengakuan Pak Komar, yang penulis wawancarai tanggal 25 Februari 2012, pemilik lahan mengizinkan masyarakat setempat untuk mengelola lahannya sehingga memungkinkan para penggarap untuk mengakses lahan tersebut.

“Ijin..memang dari dulu boleh sih, digararap boleh..ga digarap juga boleh. Ya, Pak Iw (yang kasih ijin)..yang penting nitip saja, jangan sampai hilang (lahannya).”

Berbeda dengan lokasi Sampalan yang status lahannya adalah milik individu (dengan Sertifikat Hak Milik), lahan di lokasi kedua (Barudawa 2) adalah lahan berstatus HGU. Ketika penulis menelusuri kejelasan status lahan tersebut dengan menanyakan kepada pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cianjur,

Pak Gundham (staf Bidang Penatagunaan Tanah dan Kawasan Tertentu) menegaskan kebenaran informasi yang penulis peroleh dari lapangan. Ia menambahkan bahwa lahan tersebut dikelola oleh sebuah perusahaan besar untuk membuka perkebunan teh dengan luas lebih dari seribu hektar. Ia juga sempat menyebutkan tentang keberadaan organisasi semacam koperasi yang mengelola lahan di lokasi ini.

Organisasi yang dimaksud adalah KUD yang berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa pihak merupakan organisasi yang dibentuk untuk mendukung kegiatan perusahaan yang dimiliki oleh Pak Pro. Salah seorang pengurus KUD yang berhasil penulis temui adalah Pak Robi, yang menjabat sebagai sekretaris KUD. Dari Pak Robi penulis memperoleh informasi bahwa lahan tersebut masih berstatus HGU hingga tahun 2022. Cakupannya pun luas hingga ke 3 desa, yaitu Desa Batulawang, Sukanagalih, dan Cibadak perbatasan dengan lokasi Sampalan milik Pak Iw. Sementara itu, pengelolaan lahan yang diserahkan kepada para pengurus KUD ketika awal pembentukannya adalah sebagai berikut.

“Kalau dulu dari Pak Pro dikasih satu paket 2.500 meter persegi kalau ke depan sini, kalau ke belakang sana 5.000 meter persegi kalau ga salah..kalau dulu sih kita bukan penggarap..paket sih itu. Dikasih rumah, kandang, termasuk itu..lahan 2.500 (meter persegi).”
(wawancara dengan Pak Robi tanggal 18 April 2012).

Dengan demikian, pihak pengurus KUD seperti Pak Robi memiliki akses terhadap lahan di lokasi ini. Kondisi lahan yang menurut Pak Robi kini lebih banyak tidak produktif ditanami teh (seperti peruntukkan awal), membuat sebagian besar lahan terancam terlantar. Untuk mengembalikan fungsinya sebagai lahan pertanian darat, pihak KUD memberikan ijin kepada warga masyarakat setempat yang ingin memanfaatkan lahan tersebut. Ia bahkan menyebut warga masyarakat yang menggarap tanpa seijin pihak (pengurus) KUD sebagai penggarap “liar”. Kategori ini yang menarik penulis cermati karena dengan cara tersebut, Pak Robi merasa dirinya lebih berhak untuk memanfaatkan lahan daripada pihak lain.

Selain pengurus KUD, penulis pun menemui pihak yayasan yang juga mengklaim lahan tersebut sebagai miliknya. Untuk itu, penulis diperkenalkan oleh

Pak Asep kepada Pak Sofyan, yang bertugas sebagai Kepala Rumah Tangga yang bertanggung jawab mengurus 13 kepala keluarga (yang merupakan anggota keluarga para pekerja) yang tinggal di beberapa rumah semi permanen yang dibangun yayasan. Para pekerja termasuk Mas Supri yang telah menetap di lokasi tersebut sejak tahun 2007 juga melakukan kegiatan pertanian, seperti cabai (paprika) dan sayur-mayur. Melalui wawancara yang berlangsung sekitar satu jam, Pak Sofyan menceritakan tentang awal keterlibatannya dalam yayasan dan klaim yayasan terhadap lahan di lokasi ini.

“Kalau saya disini dari tahun 2001, berarti sekarang 11 tahun. Ya betah nggak betah..yang namanya nyari duit mah. Nyari duit mah yang penting kita dapet gaji, kerjanya halal, intinya ya kita laksanakan. yang jelas sih sebelum saya sih sudah ada. Kalau nggak salah sih saya lihat dari surat-suratnya itu tahun '95, jadi sebelum saya kesini kan juga sudah ada beberapa pergantian pengurus-pengurus. Saya kesini juga kesini kan berawal dari petani. Nyangkul, ya bisa dikatakan dari awal dulu..kalau nggak salah di sini 66 atau 65 (hektar) totalnya punya yayasan. Yang jelas kita bekerja di lahan yayasan sesuai dengan surat-surat ya pernah saya lihat juga dari AJB nya juga ada semua, mangkanya sampe sekarang dilanjutkan terus kerja.” (wawancara dengan Pak Sofyan tanggal 28 Februari 2012).

Dengan berpegang pada AJB sebagai dokumen resmi kepemilikan lahan, Pak Sofyan dan para pegawai yayasan meyakini bahwa klaim mereka atas lahan yang menjadi bagian lahan berstatus HGU tersebut memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, ketika mereka (pihak yayasan) mengamati bahwa ada pihak lain (perusahaan) yang melakukan aktivitas penanaman singkong di salah satu titik lokasi yang diklaim, yayasan pun melakukan tindakan. Melalui Pak Sofyan sebagai kepala rumah tangga, teguran pun dilayangkan kepada pihak perusahaan sehingga kemudian perusahaan memilih melakukan negosiasi dengan mereka.

III. 1. 3. Para Penggarap

Berdasarkan cerita yang penulis peroleh dari Pak Asep, semenjak awal keterlibatannya dengan perusahaan, salah satu tantangan terbesarnya adalah menghadapi para penggarap, terutama mereka yang merasa “memiliki” lahan. Sekalipun secara hukum mereka tidak memiliki kekuatan karena tidak ada surat

perjanjian sewa-menyewa antara mereka dan pemilik lahan, namun kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa hal tersebut bukan penghalang bagi penggarap. Oleh karena itu, ketika perusahaan akan “membuka” lahan di lokasi yang sudah ditanami oleh penggarap, maka klaim itu muncul. Konsekuensi dari klaim tersebut adalah pengajuan kompensasi atau ganti rugi atas tenaga yang mereka keluarkan untuk mengelola lahan tersebut.

Selama pengamatan di lapangan, penulis berhasil menemui 3 orang penggarap, yaitu Pak Haji Saefuddin dan Pak Makmur di lokasi milik Pak Iw dan Pak Kumis di lokasi Barudawa 2. Penulis menemui Pak Haji Saefuddin saat ia menanam bibit tembakau di salah satu titik lokasi Sampalan. Ia mengaku baru 4 bulan menggarap di lahan ini dan mengetahui lokasi milik Pak Iw dari salah satu rekannya yang telah menggarap lebih lama. Untuk dapat menggarap lahan seluas 3.000 meter persegi di lokasi ini, ia meminta izin kepada salah seorang kepercayaan pemilik lahan dengan persyaratan.

“(Ijin) ka si Komar..kan begini..kalau mau menggarap ijinnya ke Komar. Kalau sama Pak Asep, Pak Haji nitip bako (tembakau), Pak Asep nanam singkong..nggak ganggu. (Masalah bagi hasil) ah itu paling..kalau dapat 1 juta, ngasih 100 (ribu) ke Pak Komar.. perjanjiannya dikasih ke Pak Komar kalau panen berhasil..(Informasi tentang lahan di lokasi Pak Iw) dari Pak Amat..dikasih ijin sama Pak Iw..daripada terlantar..boleh digarap.” (wawancara dengan Haji Saefuddin tanggal 20 Februari 2012).

Tidak berbeda dengan Pak Haji, penggarap lain bernama Pak Makmur yang penulis temui di lokasi ini juga mengatakan bahwa sejak kedatangannya yang pertama pada tahun 1996 atau 1997, Pak Iw sebagai pemilik lahan telah menyampaikan kepada orang-orang kepercayaannya untuk memberikan izin kepada para penggarap untuk mengelola lahan miliknya tersebut. Kendati demikian, tidak ada selembar surat berbentuk perjanjian (sewa-menyewa) yang dikeluarkan oleh pihak pemilik lahan sehingga kapanpun pemilik lahan menginginkan lahannya “dikembalikan”, maka penggarap tidak berhak menuntut ganti rugi.

Begitu pula dengan Pak Kumis, seorang penggarap yang biasa dipanggil dengan sebutan itu, telah memperoleh izin dari pihak yayasan sebelum ia menggarap di lokasi Barudawa 2. Menurutnya luas lahan yang ia garap sekitar

4.000 meter persegi itu adalah milik yayasan sehingga ia merasa harus meminta ijin kepada salah seorang pengurus yayasan yang tinggal di sekitar lokasi tersebut. Dengan demikian, ia dapat menanam sayur-mayur dan singkong di lahan tersebut tanpa khawatir disebut sebagai penggarap “liar”. Hingga kini ia telah menggarap selama kurang lebih 3 tahun di lokasi yang sama.

Para penggarap di lokasi Sampalan maupun Barudawa 2 yang penulis temui mengatakan bahwa meskipun tidak ada surat perjanjian antara pemilik lahan dan penggarap namun ijin yang diajukan secara lisan (sehingga diperoleh kesepakatan tentang luas garapan) sudah cukup bagi mereka untuk memperoleh “hak” atas pemanfaatan dan pengelolaan lahan. Ketika penulis mengkonfirmasi tentang status lahan garapan kepada Pak Gundham, ia mengatakan bahwa sebenarnya dalam lahan garapan pun ada “aturan mainnya” namun itu semua tergantung kesepakatan antara pemilik lahan dan penggarap. Ia pun menambahkan bahwa tidak semua lahan garapan memiliki surat perjanjian sehingga apabila dalam beberapa musim lahan tidak dikelola oleh penggarap awal, maka lahan itu bisa digarap oleh penggarap yang lain.

“Itu tergantung yang punya kebun. Itu ada surat ijin menggarap. Kalau dia mau mengeluarkan, gitu ya..ijin menggarap. Ya, kekuatannya antara kedua belah pihak aja. Biasanya yang menggarap itu pegawai perkebunan itu..atau ada perjanjian ya, antara penggarap dan pemiliknya. Kalau (aturan formil tertulis) nggak ada..perjanjian kedua pihak aja, kerja sama ya..nanti kalau hasilnya sekian, bagi hasilnya sekian..tapi nggak ada kekuatan hukum. Istilahnya garapan kan tanah negara digarap oleh masyarakat, digarap..terus nanti pemanfaatannya bisa setor ke desa, misalnya..sekarang bisa SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan)..walaupun tanah garapan, tanah negara bisa dibuatkan itu..kalau pajak kan yang penting pemanfaatan tanah..kalau itu sudah keluar, bukan berarti dia memiliki ya, bukan..bukan berarti hak, cuma..tanah garapan itu berarti tanah perorangan atau tanah milik negara.” (tanggal 24 April 2012).

Lahan garapan pun dapat di”perjual-belikan” antara seorang penggarap dan penggarap yang lain. Berbeda dengan konsep jual-beli lahan yang memiliki dokumen-dokumen resmi, jual-beli atau yang biasa disebut dengan over-alih garapan tidak menjadikan pihak pembeli memiliki lahan tersebut. Over-alih garapan merupakan konsep yang digunakan untuk memberikan kompensasi atau

penggantian kepada penggarap pertama yang telah mengeluarkan sejumlah biaya dan tenaga untuk mengelola sebidang tanah. Setelah over-alih itupun, sayur-mayur atau jenis tanaman apapun yang ditanam tetap menjadi milik penggarap yang menjual.

Munculnya bentuk-bentuk transaksi seperti itu menunjukkan bahwa seorang penggarap tidak hanya memiliki akses atau kemampuan untuk mengambil manfaat atau keuntungan atas sumber daya tertentu, tetapi juga memegang “legitimasi” untuk menentukan besarnya nilai dari sumber daya yang ia transaksikan (jual-beli). Dalam kasus yang diceritakan Pak Asep, seorang penggarap akan mengajukan harga untuk jenis sayuran tertentu, seperti wortel, cabai merah, dan kacang kapri. Terlebih ketika harga sayuran di pasar sedang tinggi. Sekalipun sayur-mayur tersebut tidak menjadi hak penggarap pembeli, tetapi “aturan” itu berlaku ketika seseorang “membeli” lahan garapan.

III. 1. 4. Pemerintah Desa dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Cianjur

Akses lahan dalam kasus yang penulis amati terkait dengan masalah kepemilikan lahan, terutama di lokasi Barudawa 2 yang diklaim oleh pihak pemilik HGU untuk perkebunan dan yayasan. Lokasi lahan yang merupakan perbatasan antara Desa Sukanagalih dan Batulawang inipun menjadi “rebutan” pihak-pihak yang berseteru. Klaim sebagai pemegang hak atas lahan bermunculan. Untuk memperoleh informasi yang lebih akurat, penulis mendatangi kantor Desa Sukanagalih dan mewawancarai Pak Haji Ujang yang menjabat sebagai Sekretaris Desa (sekdes). Ia pun membagi pengetahuannya tentang lahan tersebut kepada penulis.

“Mangkanya tadi masalah tanah perkebunan, di Desa Sukanagalih ini pernah tercatat semenjak saya bekerja disini, itu bukan tanah perkebunan yang di yayasan itu yang sekarang masih di gonjang-ganjing gitu. Itu udah kapasitas pengadilan sudah di Mahkamah Agung sekarang juga. Emang hasil MA kemarin yang interfensi dari PT. M mengaku kata BPN bahwa tanah termasuk HGU. Versi saya di desa itu tanah milik karena sepanjang saya kerja disini dengan Pak Supena (Kaur Desa) kan udah 40 tahun, nggak ada dari kepala desa yang lalu dalam statistik tercatatkan ini tanah HGU, HGB, dan tanah berhak-hakan kan istilahnya tertulis dalam buku C juga. Tanah HGU berapa meter.. Maaf ini menurut saya, kalau sejak berdirinya Desa

Sukanagalih sekitar tahun 1924 sudah ada Sukanagalih sebelumnya Desa Cibulia. Setahun kemudian ganti nama jadi Desa Sukanagalih. Tidak dan tidak pernah ada data yang mengatakan bahwa ini tanah perkebunan. Yang ada itu tanah kontrak Barudawa 2. Yang Barudawa 2 itu istilahnya dia mengasumsikan jadi yang ditanami teh itu orang pemikirannya syukur-syukur yang ditanami teh itu milik perkebunan, kan kebanyakan tapi hakim juga begitu percaya. Enggak pak (hakim)..Masyarakat kami itu dulu masyarakat kecil yang memiliki tanah karena anjuran pada tahun sekianlah sekitar 45-an, masyarakat kami itu memiliki tanah juga ditanami teh, jadi tidak ada teh milik perkebunan, kan gitu intinya. Saya ada alat bukti, buktinya masyarakat. Haji Muhiir tanam teh, Haji Sukandi tanam teh, Haji Mukhtar tanam teh.” (wawancara tanggal 29 Februari 2012).

Menyimak penuturan pak sekdes, penulis berkesimpulan bahwa pihak Desa Sukanagalih lebih mengakui konsep perkebunan yang dikelola oleh masyarakat. Di sisi lain ketika penulis menanyakan tentang status HGU yang diberikan kepada sebuah perusahaan yang dimiliki oleh Pak Pro kepada pihak BPN, Pak Gundham membenarkan informasi tersebut. Secara administratif lahan yang berada di 3 desa tersebut merupakan lahan berstatus HGU yang diberikan kepada sebuah perusahaan yang menanam teh di lokasi itu. Pak Gundham mengakui pihaknya masih memonitor peruntukkan lahan tersebut setelah mendapat informasi dan menyelidiki bahwa ada beberapa bagian lahan yang tidak lagi dimanfaatkan untuk perkebunan teh.

“(Lahan berstatus HGU) itu maksimal (ijinnya) 20 tahun, bisa diperpanjang dan kalau tidak diragap, itu bisa dikategorikan terlantar..kalau tidak sesuai peruntukannya. Itu juga melalui proses, pertama teguran kesatu, kedua, ketiga kita survey. Terus kalau HGU di sana..punya Pro yah? HGU-nya masih..untuk perkebunan, tapi sebagian digarap masyarakat itu. Memang ada sebagian dulu di koperasi yah, dipinjamkan atau apa gitu.” (wawancara dengan Pak Gundham tanggal 24 April 2012).

Sementara itu informasi dari pihak pengurus KUD justru mengindikasikan bahwa sebagian besar lahan yang semula produktif (dimanfaatkan untuk perkebunan) telah lama berubah. Lahan dibiarkan “kosong” sehingga membuka peluang bagi pihak lain untuk memanfaatkannya sebagai lahan garapan. Selain itu, kehadiran yayasan sebagai pemegang AJB atas lahan seluas sekitar 66 hektar ikut menambah kerumitan masalah kepemilikan lahan yang tumpang tindih ini.

Dalam penulisan ini, penulis tidak akan terlalu jauh memasuki “area hukum” status lahan di lokasi ini meskipun informasi ini penulis gunakan untuk menganalisis bagaimana masing-masing pihak saling mempertahankan aksesnya di lokasi tersebut.

Berbeda dengan lokasi Barudawa 2 yang cukup “bergejolak”, lokasi Sampalan milik Pak Iw memiliki status lahan yang “jelas”. Berdasarkan informasi Pak Sekdes Sukanagalih, pemilik lahan membelinya dari warga masyarakat setempat secara bertahap kemudian mengurus dokumen resmi berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama sebuah perusahaan yaitu PT. OG. Meski demikian, dari wawancara dengan beberapa informan, pihak pemilik lahan justru tidak mengakses lahan tetapi menyerahkan pengelolaannya kepada orang lain.

“(Lahan) Pak Iw mah tidak masalah itu tanah milik adat itu mah.. artinya milik adat itu milik perorangan namanya Pak Iw. Bukti pembelian yang sah ada pembelian aktenya sama sertifikatnya. Berbentuk PT kan udah ada namanya itu, PT. OG. (Selama ini masyarakat) ya menggarap aja daripada tanah nganggur.” (wawancara dengan Pak H. Ujang tanggal 29 Februari 2012).

Dengan demikian, pihak pemerintah desa mengakui adanya pemanfaatan dan pengelolaan lahan oleh warga masyarakat sekalipun di lokasi lahan berstatus hak milik seperti di sampalan. Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa sumber daya berupa lahan yang cukup luas “tersedia” bagi mereka yang ingin memanfaatkan dan mengelolanya. Sekalipun lahan tersebut milik seseorang namun orang lain dapat mengaksesnya dalam kurun waktu yang cukup lama (contohnya Pak Makmur yang telah menggarap lahan Pak Iw sejak tahun 1997). Ketika beberapa pihak mengakses lahan yang sama secara bersamaan, maka terjadilah bentrokan kepentingan, seperti yang akan penulis narasikan berikut ini.

III. 2. Kontestasi Aktor atas Lahan

Perspektif yang digunakan oleh masing-masing aktor dalam memaknai akses lahan di lokasi pengamatan menjadi menarik untuk dikaji. Sebagai bagian dari perusahaan, Pak Asep berkali-kali menyebutkan bahwa perusahaan (PT. EKM) hanya ingin menanam singkong dan bukan untuk menguasai lahan. Oleh karena itu, menurut pengalamannya sejak bergabung dengan perusahaan, Pak

Heru sebagai manajer perkebunan menugaskan kepada dirinya untuk “membebaskan” lahan dengan cara yang legal (sesuai prosedur hukum). Dengan kata lain, perusahaan menghindari tindak-tanduk kekerasan dengan pihak-pihak lain, termasuk para penggarap.

Namun ketika mengomentari soal keberadaan para penggarap di beberapa titik lokasi (terutama Sampalan dan Barudawa 2), Pak Asep menilai bahwa sebagian besar penggarap tidak mengantongi ijin untuk mengelola lahan langsung dari pemilik lahan. Di lokasi Sampalan khususnya, Pak Asep mengatakan bahwa hampir seluruh penggarap tidak meminta ijin langsung kepada Pak Iw sebagai pemilik lahan.

Senada dengan Pak Asep, Haji Tatang, orang yang juga dipercaya Pak Heru (yang membawa banyak petani dari wilayah Cianjur Selatan untuk bekerja di lahan singkong PT. EKM) juga berkomentar bahwa sekalipun tidak memiliki ijin secara formil dari pemilik lahan, para penggarap tetap mengakses lahan tersebut. Tidak hanya lahan pertanian darat, Haji Tatang juga membagi informasi tentang lahan-lahan persawahan milik Pak Iw yang disewakan kepada para penggarap.

“Ini tanah pribadi kan punya Pak Iw, sekarang udah dilimpahkan ke Pak Heru. Ada yang nanam tapi nggak bayar. Ini kalau nggak salah udah 23 tahun (punya Pak Iw) kan pajak harus dibayar. Pak Iw udah ketemu Pak Heru dan Pak Al (rekan Pak Heru).. ya Alhamdulillah Pak Iw kan tenang tanahnya sekarang udah ada yang nge-garap. Contoh sama Pak Heru, kan ada pajak sawahnya, kurang lebih ada 20 hektar nggak ada pemasukan.”(wawancara tanggal 28 Januari 2012).

Namun hal itu terjadi bukan tanpa alasan. Haji Tatang mengatakan bahwa lahan yang telah dibeli oleh Pak Iw tidak langsung dikelola atau dimanfaatkan. Lahan yang menurutnya direncanakan untuk membangun penginapan (villa) di atas bukit, hingga kini belum terlihat realisasinya, sementara lahan yang sangat luas itu dinilai tidak produktif oleh masyarakat setempat karena hanya ditumbuhi rumput-rumput liar. Pada pembahasan sebelumnya pun penulis mengutip pernyataan Pak Makmur sebagai penggarap yang pernah mengikuti kegiatan pengelolaan lahan di lokasi tersebut ketika awal kepemilikannya. Lahan yang

tidak dimanfaatkan secara maksimal tersebut kemudian diakses oleh para penggarap.

Di sisi lain, untuk menjaga aset (lahan) tersebut, Pak Iw membutuhkan orang lain. Ia kemudian menggunakan jasa beberapa orang warga setempat untuk “menjaga” lahan pertanian darat dan persawahannya. Salah seorang dari mereka, yaitu Pak Komar, yang berhasil penulis temui (dan wawancara tanggal 25 Februari 2012) mengaku bahwa setiap bulan ia memperoleh gaji dari Pak Iw, selain hasil panen dari para penggarap meskipun besarnya tidak pernah ia tentukan.

Terkait dengan keberadaan Pak Komar sebagai orang kepercayaan pemilik lahan, Pak Asep pernah bercerita bahwa ketika akan memperluas lahan yang “dibuka” di lokasi Sampalan (milik Pak Iw), Pak Asep mendapat *complaint* dari Pak Komar yang khawatir pembukaan lahan melebihi 25 hektar. Pak Komar beralasan bahwa ia memegang kontrak perjanjian yang mengatakan bahwa lahan yang ditanami singkong oleh perusahaan adalah 25 hektar. Kontrak tersebut ditandatangani oleh Pak Iw dan Pak Adi (pemilik perusahaan). Untuk menyampaikan keluhan tersebut, Pak Komar menemui Pak Asep di lokasi Sampalan sehingga suasana ketika itu agak tegang.

Menanggapi keluhan tersebut, Pak Asep mengatakan bahwa ketidaksetujuan (tepatnya upaya menghalangi) yang ditunjukkan oleh Pak Komar dilatarbelakangi oleh kekhawatiran atau ketakutan akan kehilangan sumber pemasukannya selama ini (karena mereka juga mendapat uang sewa atau bagi hasil dari panen para penggarap). Pak Asep bahkan tidak ragu-ragu mengatakan bahwa selama dipercayakan menjaga aset lahan Sampalan, Pak Komar dan rekan-rekannya hanya menerima “gaji buta”. Menurutnya, lahan yang harusnya dipelihara oleh mereka malah disewakan kepada para penggarap.

Sementara di sisi lain, Pak Komar (ketika penulis wawancarai beberapa hari yang lalu) mengatakan ketidaksetujuannya terhadap program singkong EKM karena ia dibekali surat kontrak antara Sampalan dan Pak Adi bahwa lahan yang ditanami singkong hanya seluas 25 hektar, tetapi kenyataannya Pak Asep (pihak EKM) semakin meluaskan penanaman singkong melampaui batas 25 hektar. Pak Komar sempat menunjukkan surat kontrak tersebut meskipun penulis tidak

ditawarkan untuk memfotocopy surat perjanjian tersebut, tetapi melihat pernyataan yang dituliskan di dalam surat kontrak tersebut, penulis mengasumsikan bahwa tindakan yang dimunculkan oleh Pak Komar juga dilatarbelakangi oleh interpretasinya terhadap surat kontrak yang diberikan oleh atasannya tersebut.

Oleh karena itu, ia mengaku sempat mendatangi pihak perusahaan (Pak Asep) untuk mengajukan keberatan terhadap upaya “pembukaan” lahan di lokasi yang dipercayakan olehnya. Ketika itu, ia pun beradu argumen dengan Pak Asep sebagai pengawas lapangan dan menunjukkan surat perjanjian yang dibuat oleh direktur perusahaan dan pemilik lahan (Pak Iw). Pada saat yang berbeda saat penulis menanyakan pertemuan tersebut kepada Pak Asep, ia membenarkan bahwa 2 orang kepercayaan Pak Iw telah menemuinya namun ia mengatakan bahwa ia tetap berpegang pada permintaan lisan yang diajukan oleh utusan Pak Iw yang bernama Pak Ib untuk menanam singkong di seluruh lokasi tersebut.

Kendati demikian, Pak Asep mengakui bahwa permintaan yang diajukan secara lisan oleh perwakilan Pak Iw kurang memiliki legitimasi yang kuat bagi perusahaan untuk melakukan tindakan (membuka lahan). Terlebih lagi ketika baru-baru ini ia mendapat informasi dari Pak Heru bahwa pihak Pak Iw mengajukan surat kontrak yang baru, yaitu penanaman pada lahannya seluas 30 hektar. Ini berarti bahwa penanaman singkong hanya dilakukan pada sekitar 30% bagian lahan. Meskipun surat perjanjian telah diajukan (Pak Asep mengatakan bahwa dirinya pernah melihat surat tersebut) namun perusahaan (melalui Pak Heru) belum menyetujuinya (belum ada tanda tangan).

Menurut Pak Asep, ketika mengajukan perjanjian yang baru, pihak Pak Iw beralasan bahwa dirinya *tidak sampai hati* mengusir para penggarap, terutama mereka yang sudah bertahun-tahun menggarap lahannya. Ia pun mengatakan bahwa tidak sedikit dari para penggarap yang telah membantunya sewaktu proses pembebasan lahan dari masyarakat dahulu. Upaya “balas jasa” yang dilakukan oleh pihak Pak Iw tidak pelak semakin membuat posisi tawar perusahaan (Pak Asep) terhadap para kepercayaan Pak Iw dan penggarap semakin sulit.

Selain para kepercayaan Pak Iw yang merasa “terancam” aksesnya atas lahan yang dipercayakan kepada mereka, ada pula penggarap yang merasakan hal

serupa. Informasi ini penulis peroleh dari Pak Asep yang menceritakan pengalamannya menghadapi seorang penggarap yang mengerahkan beberapa petani (orang suruhannya) untuk “membuka” lahan. Penggarap yang bernama Pak Engkus tersebut bahkan mengutus seorang preman lokal bernama Pak Djumali untuk menghadapi Pak Asep namun dengan tanpa takut Pak Asep menghadapi preman tersebut dan hasilnya mengecewakan Pak Engkus.

Berbeda dengan cerita tentang Pak Engkus, ada penggarap lain yang sempat penulis temui untuk mendapatkan informasi tentang sewa-menyewa lahan garapan di lokasi Pak Iw ini. Penggarap yang usianya di atas 65 tahun bernama Haji Saefuddin (Abah) ini, sedang menanam tembakau di salah satu blok lokasi milik Pak Iw. Saat penulis tanyakan bagaimana caranya memperoleh ijin untuk menggarap, ia mengatakan bahwa ia mendatangi salah seorang kepercayaan Pak Iw, yaitu Pak Komar. Tentang sistem sewanya, ia menyebutkan bahwa dirinya dan Pak Komar menyepakati bagi hasil, yang berarti pihak penggarap (dirinya) memberikan sejumlah uang kepada Pak Komar apabila panennya berhasil.

Ia menegaskan bahwa tidak ada keharusan untuk membagi hasil panen kepada Pak Komar apabila penggarap mengalami kerugian. Dari lahan seluas (kurang lebih) 3.000 meter persegi yang digarapnya, Haji Saefuddin tidak menyebutkan secara pasti nominal yang diberikan kepada Pak Komar setiap kali ia panen. Informasi lain yang ia berikan ketika penulis menanyakan apakah Pak Iw sendiri mengetahui dan memberikan ijin meskipun penggarap tidak pernah mendatanginya secara langsung, ia merasa yakin bahwa Pak Iw tidak pernah berkeberatan apabila ada masyarakat yang ingin menggarap di lahannya meskipun hasil panen yang ia bagi berikan kepada Pak Komar (mungkin) tidak dinikmati oleh sang pemilik lahan.



Gambar 3. 2. Haji Saefuddin sedang menanam bibit tembakau di lahan garapannya (sumber: dokumentasi penelitian).

Penggarap seperti Haji Saefuddin dan Pak Makmur memandang bahwa hal yang mereka lakukan tidak menyalahi aturan karena sebelum menggarap di lokasi Pak Iw, mereka mendatangi pihak yang dipercayakan oleh pemilik lahan sehingga meskipun tidak meminta ijin langsung kepada Pak Iw, orang seperti Pak Komar dapat mewakili legitimasi pemberian ijin tersebut. Pak Makmur sendiri cukup menyadari bahwa keberadaannya di lokasi tersebut hanyalah sebagai orang yang “menumpang” sehingga kapanpun lahan garapannya diminta kembali oleh pemilik lahan ataupun ada penggarap lain menggarap lahannya, ia tidak akan mempersoalkan.

“Yaa..saya mah cuma menggarap aja..kalau tanah ini dijual ke orang lain, ya udah aja.. kalau orang sini mah bukan petani besar, Bu. Orang-orang di sini mah ngga banyak ini itu..kalau ngga boleh, ya udah aja.. ini mah untuk sementara. kalau ada penggarap lain, yaa silakan aja..kalau ada tanaman Bapak, titip aja tanaman Bapak. kan bapak juga sama-sama numpang di sini.” (wawancara tanggal 23 Februari 2012).



Gambar 3. 3. Lahan di Blok Sabri (bagian dari Lokasi Sampalan) yang ditanami sayur-mayur oleh Pak Makmur (sumber: dokumentasi penelitian).

Pembicaraan dengan Pak Makmur sebenarnya menyisakan pertanyaan bagi penulis, benarkah penggarap tidak akan melakukan sesuatu apabila ada pihak lain juga mengakses lahan yang dikelolanya? Pengalaman Pak Joko dan Pak Asep selama bertugas di lokasi yang “bergejolak” memperlihatkan sisi yang berbeda. Menurut mereka tidak semua penggarap menyadari bahwa lahan yang mereka kelola bukanlah miliknya sehingga apabila ada pihak lain yang mengakses lahan tersebut, mereka justru bersikap seolah-olah lahan itu milik mereka, misalnya dengan cara menanam tanaman kayu secara diam-diam (tindakan ini dianggap berindikasi menguasai lahan).

Salah satu contohnya adalah yang dilakukan oleh Pak Lili, seorang penggarap yang diketahui menanam pohon sengon di lokasi Barudawa 2 (lahan yang diklaim oleh yayasan). Dengan alasan penghijauan, Pak Lili menanam sengon secara sembunyi-sembunyi ketika Pak Joko (pengawas) pulang sore hari. Menurut informasi yang diterima Pak Joko maupun Pak Asep, penggarap ini menyuruh istri dan anaknya untuk menanam bibit sengon di salah satu blok lokasi tersebut. Ketika membahas temuan tersebut, kedua pengawas sepakat mengatakan bahwa kegiatan menanam tanaman keras (seperti kayu sengon) mengindikasikan kepentingan seseorang untuk menguasai lahan (kayunya baru bisa dipanen setelah 4-5 tahun). Berdasarkan tindakan yang dilakukan penggarap tersebut, keduanya menduga bahwa penggarap (seperti Pak Lili) mempunyai kepentingan untuk melakukan bisnis jual-beli kayu sengon di atas lahan milik orang lain.

Merasa berhak mengelola lahan dan menerima ganti rugi atas hasil kerja dan biaya yang dikeluarkan juga ditunjukkan oleh penggarap bernama Pak Kumis. Ketika penulis dan Pak Asep sedang mengamati kegiatan yang dilakukan para petani di lokasi Sampalan, tiba-tiba Pak Asep dihampiri oleh seorang penggarap yang dipanggil “Pak Kumis” oleh Pak Asep. Ia mengatakan bahwa sebelum bertemu dengan Pak Asep, ia telah menemui Pak Joko namun ketika ia mengajukan sejumlah uang kompensasi (karena lahan garapannya akan ditanami singkong oleh Pak Suranto), maka ia memutuskan untuk menemui Pak Asep.

Tidak lama kemudian, kami pergi ke lahan garapan yang ia ceritakan. Ia mengatakan bahwa luas lahan garapannya adalah 6.000 meter persegi. Sesaat setelah kami tiba di sana, Pak Joko pun datang dan dengan setengah berbisik, ia mengajak Pak Asep berdiskusi. Ketika itu, penulis mencoba mengikuti pembicaraan mereka (dalam bahasa Sunda) dan mengamati bahwa kelihatan Pak Kumis mencoba meyakinkan kedua pengawas bahwa ia sudah menghabiskan banyak biaya untuk membersihkan lahan hingga siap tanam seperti sekarang. Saat Pak Kumis menunjukkan lahan garapannya kepada Pak Asep, Pak Joko mengatakan kepada penulis bahwa yang dikatakan oleh penggarap tersebut tidak dapat dipercaya karena setelah ia cermati, luas lahan yang ia garap tidak seluas yang ia sebutkan.



Gambar 3. 4. Lahan garapan Pak Kumis yang sedang dinegosiasikan kompensasinya (sumber: dokumentasi penelitian).

Gugatan-gugatan yang diajukan oleh beberapa penggarap terkait dengan lahan yang mereka olah dan tanami merupakan cara yang dilakukan untuk menunjukkan kepada pihak lain bahwa mereka berhak atas sumber daya tersebut. Sekalipun mereka menyadari bahwa lahan tersebut tidak dapat mereka miliki, misalnya di lokasi sampalan yang dimiliki oleh seseorang, tetapi sejumlah materi telah dikeluarkan untuk memperoleh akses terhadap lahan. Pengamatan di kedua lokasi penelitian menunjukkan bahwa bentuk perjanjian berupa ucapan/lisan maupun tertulis antara pihak yang dipercaya sebagai pengelola (seperti orang-orang kepercayaan, KUD, atau pengurus yayasan) dan penggarap cukup memberikan legitimasi untuk mengakses lahan.

Oleh karena itu, lahan-lahan yang teramati sebagai lahan-lahan “kosong” atau tidak terawat seperti yang terlihat di kedua lokasi menjadi potensial “dimasuki” para penggarap. Ketika penulis meminta konfirmasi kepada pihak BPN, Pak Gundham memberikan klarifikasi bahwa terdapat kecenderungan lahan-lahan yang tidak dimanfaatkan oleh pemilik lahan atau lahan berstatus HGU menjadi lahan terlantar. Sekalipun proses untuk menyatakan bahwa lahan tersebut benar-benar terlantar, membutuhkan waktu yang cukup panjang karena BPN harus melakukan penyelidikan ke lapangan terlebih dahulu.

“(Lahan) yang statusnya adalah hak milik tetapi tidak dimanfaatkan indikasinya yah..indikasi terlantar. Itu juga harus disurvey dulu. Teguran pertama, kedua, ketiga..panjang prosesnya. Kadang-kadang alasan si pemilik lahan memang sengaja dibiarkan demikian supaya subur lagi, tapi kita kan lihat fisiknya, digarap oleh masyarakat atau tidak. Bisa juga disewa-sewakan, seperti di Cianjur Selatan. Kalau tanah HGU maksimal 20 tahun, bisa diperpanjang dan kalau tidak diragap, itu bisa dikategorikan terlantar.kalau tidak sesuai peruntukannya. Itu juga melalui proses, pertama teguran kesatu, kedua, ketiga kita survey.” (tanggal 24 April 2012).

Fenomena lahan garapan menjadi tidak terlepas dari persoalan pemanfaatan dan pengelolaan lahan di wilayah ini. Perubahan dalam pemanfaatan lahan menjadi faktor yang sangat mempengaruhi bentuk pemanfaatan lahan oleh masyarakat seperti yang teramati saat ini. Pak H. Dedi (bukan nama sebenarnya) mengungkapkan bahwa sejak sekitar awal tahun 1990-an, wilayah Cipanas dan sekitarnya mulai dilirik oleh para investor sehingga lahan yang semula

dimanfaatkan untuk pertanian dan dimiliki oleh warga masyarakat, kemudian beralih fungsi dan kepemilikan.

“Saya pernah dulu waktu 2004 apa 2005 gitu..2004 pernah kedatangan pak camat itu 10 camat ya seluruh Indonesia di luar Bali dan Jawa. Itu diskusi tentang kemajuan daerah. Jadi dulu kan disini di Sukanagalih ini kan 90 persen kan persawahan, kenapa jadi berubah begini kan. Ya berubah jadi perumahan dan sebagainya itu. Sehingga dulu tahun 1990 aja PBB Sukanagalih hanya 150 juta. Begitu tahun 2001-2002 sampai terakhir itu 2006 itu sampai 800 juta. Jadi naiknya jauh banget kan. Sumatra Barat saja waktu itu satu kabupaten itu 600 juta hanya satu desa Sukanagalih. Ini kalo gak salah satu Indonesia lah ya. Jawa Barat paling besar. iya sejak masuknya perumahan ini. Sukarsemi ini saja sebelah kecamatan itu hanya 600 juta satu kecamatan. (Harga tanah menjadi) tinggi. Apalagi di selatan ya. Di selatan itu paling di kecamatan itu 30 juta 50 juta, mangkanya di sini paling tinggi.” (tanggal 27 Februari 2012).

Lahan garapan dan kehadiran penggarap menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi perusahaan namun menghadapi para penggarap dengan berbagai macam tuntutan tidak lantas membuat Pak Asep maupun Pak Joko mengubah metode pendekatan (secara persuasif) terhadap mereka. Sekalipun ada saja penggarap yang bersikeras tidak bersedia “menyerahkan” lahan garapannya (seperti Pak Mamat), meskipun Pak Asep telah memperlihatkan dokumen-dokumen berupa peta yang menunjukkan batas-batas lahan milik Pak Iw yang diminta untuk ditanami singkong oleh PT. EKM, namun mendekati dan berbicara dengan penggarap tetap terus dilakukan demi melancarkan program perusahaan.

Selain Pak Mamat, ada pula penggarap lain yang hingga kini tetap bersikeras menolak untuk bekerja sama dengan perusahaan. Dari cerita Pak Asep, penggarap bernama Pak Wahyu tersebut mengaku sudah sekitar 3 tahun menggarap di lokasi sampalan dan menolak “memberikan” lahannya dengan alasan bahwa ia sudah diberikan hak langsung oleh Pak Iw untuk “memiliki” garapan tersebut. Menurut penjelasan Pak Wahyu kepada Pak Asep, ia pernah berjasa membantu Pak Iw dalam proses “pembebasan” lahan warga masyarakat desa (yang dimilikinya sekarang) sehingga Pak Iw dapat memiliki lahan itu. Sebagai tanda terima kasih, Pak Iw “memberikan” lahan seluas 6.000 meter

persegi untuk ia garap. Dengan demikian, ia mengatakan bahwa baru akan “pergi” apabila Pak Iw sendiri yang memintanya.

Interpretasi dan kepentingan yang berbeda-beda inilah yang turut mewarnai relasi sosial antara satu aktor dan aktor yang lain. Dengan mengikuti kegiatan para aktor, penulis mengamati bahwa masing-masing pihak akan terus mengupayakan eksistensinya dalam “pergulatan” yang terjadi. Lahan menjadi sumber daya yang semakin bernilai sehingga patut untuk dipertahankan. Dalam perspektif penggarap, ketiadaan lahan yang dimiliki bukan menjadi penghalang untuk bertahan hidup. Lahan-lahan “kosong” yang tidak dimanfaatkan menjadi peluang bagi penggarap untuk memperoleh manfaat (*benefit*) seperti yang banyak penulis temukan di lokasi pengamatan.

Cerita beberapa penggarap dan upaya-upaya yang mereka lakukan untuk mempertahankan aksesnya terhadap lahan sesungguhnya lebih rumit dari sekedar menentukan siapa yang berhak dan tidak. Relasi yang telah dibangun sedemikian rupa antara para penggarap, pengelola lahan (pengurus KUD maupun yayasan), pemilik lahan dan orang-orang kepercayaannya, dan perusahaan yang diwakili oleh para pengawas menunjukkan bahwa “*power*” melekat pada kemampuan mereka untuk memanfaatkan sumber daya. Ketika mereka dapat mengakses lahan untuk digarap, maka mereka merasa berhak atas lahan tersebut dan menggunakan “*power*”-nya untuk menggugat pihak lain yang ingin mengakses lahan tersebut.

III. 3. Negosiasi Para Aktor

Selain perbedaan pendapat, relasi antara para aktor juga diwarnai oleh negosiasi yang dilakukan oleh perusahaan ketika menghadapi aktor-aktor lain yang terkait dengan akses terhadap lahan. Selama mengikuti kegiatan di lokasi Sampalan dan Barudawa 2, penulis mencoba memahami mengapa perusahaan melakukan strategi negosiasi dengan pihak-pihak yang dihadapinya (terutama penggarap). Seperti pertemuan antara Pak Asep, Pak Joko, dan Pak Kumis yang sempat penulis ikuti, berlangsung selama lebih dari satu jam di lokasi Barudawa 2. Hingga beberapa saat kedua pihak saling mempertahankan argumentasinya.

Ketika itu Pak Asep dan Pak Joko mencoba untuk menawarkan pupuk sebagai kompensasi (sehingga tidak perlu memberikan sejumlah uang), tetapi Pak

Kumis bersikeras meminta kompensasi berupa uang dengan alasan ia telah menghabiskan biaya Rp. 500.000,- hanya untuk menyewa orang untuk mencangkul lahan yang ia garap. Setelah proses tawar-menawar, akhirnya Pak Kumis meminta kompensasi sebesar Rp. 350.000,- kepada kedua pengawas (itupun dengan mengeluh karena ia menderita kerugian sebesar Rp. 150.000).

“Saya kerjasama *ku mang* Kumis, *ayeuna* Pak Kumis ditumpang sari, saya pupuk *aya atuh* dua ribu karung. Pak Kumis *hayang* pupuk, ngomong ke saya. *Merah bata ulah mikir hela. Lamun* pupuk dasar ngomong *wae ditendeun diditu. Urang* kerjasama *lah jeung mang* Kumis. Karena saya *melak sampeu mereun*. Pak Kumis butuh pupuk Pak Kumis ngomong ke saya nanti saya beresin nya.” (percakapan antara Pak Asep dan Pak Kumis tanggal 22 Februari 2012).

Kedua pengawas (Pak Asep dan Pak Joko) mengatakan kepada Pak Kumis bahwa mereka (mewakili perusahaan) memiliki alasan untuk memintanya bekerja sama. Penulis mendengar bahwa Pak Asep sempat menyebut nama dua orang pengurus yayasan yang telah memberinya wewenang untuk mengusir penggarap yang tidak mau bekerja sama. Meskipun demikian, Pak Kumis tetap pada pendiriannya untuk meminta ganti rugi dari perusahaan.

“Ini *mah urang* kerja sama *wae* di Pak Kumis. Saya *kieu* Pak Kumis, saya *wanimuka ngalahan eta*, saya *engges* kerja sama dengan yayasan. Saya langsung ke pusat ke Pak Pu, lain lewat si Oji *mereun eta* Joni preman, *ente* saya *mah*. Jadi saya langsung ngomong *ka* Pak Pat, *ka* Pak Pu langsung. Silahkan pak, singkong di situ, tapi tolong kalau untuk penggarap yang bermasalah dulu. Saya bilang yang bermasalah yang mana pak. Saya liat di lokasi yayasan itu tidak ada yang bermasalah. Cuma ya permintaan si Sopyan itu..tolong lah katanya yang penggarap-penggarap dulu. Oke saya bilang. Nah di sini tugas saya, saya akan ngusir penggarap. Saya nggak akan jahat sama orang Pak. Intinya saya sama Pak Kumis ayo kita kerja sama. Saya nanam singkong proyek jarak 1 meteran. Pak Kumis di situ bisa nanam pokcoi, cabe, yang penting posisi saya singkong tertanam, gitu Pak.” (percakapan antara Pak Asep dan Pak Kumis tanggal 22 Februari 2012).

Ketika perjalanan pulang setelah pertemuan antara kedua pengawas dan Pak Kumis di lokasi Barudawa 2, Pak Asep mengatakan bahwa ia kurang setuju dengan sikap Pak Joko yang menurut pengakuan Pak Kumis agak keras terhadapnya. Pak Kumis mengadu kepada Pak Asep bahwa ia mendatanginya

karena Pak Joko menolak memberikan kompensasi sebesar yang ia ajukan. Menurut Pak Asep, ketika menghadapi penggarap seperti ini, yang harus dilakukan adalah mengajak mereka bekerja sama, seperti yang ia lakukan kepada Pak Haji Saefuddin dan Pak Makmur di lokasi Sampalan.

Pak Asep memilih untuk bernegosiasi dengan para penggarap karena ia menyadari bahwa penggarap adalah “orang-orang kecil” yang hanya ingin mencari makan dengan cara tersebut. Upaya negosiasi ini juga menurutnya lebih efektif untuk menyukkseskan proses pembukaan lahan agar kondusif. Meskipun kenyataannya tidak semua penggarap yang ia hadapi bersedia menerima tawarannya untuk bekerja sama, tetapi cara ini dinilainya paling baik dilakukan mengingat Program BBS membutuhkan ketersediaan bahan baku secara berkelanjutan. Keamanan (*security*) itu menurutnya hanya dapat diperoleh apabila lahan yang diakses perusahaan juga tidak bermasalah.

Konsep “bekerja sama” yang ditawarkan Pak Asep dan para pengawas lapangan lainnya adalah cara pihak EKM “menitipkan” tanaman singkong di antara tanaman sayuran yang ditanami penggarap. Menurut Pak Asep, cara ini tidak hanya bertujuan untuk menyukkseskan program penanaman singkong oleh perusahaan, tetapi juga menjaga tanaman yang dimiliki oleh penggarap. Sekalipun setelah usia 4 bulan, singkong akan tumbuh semakin tinggi sehingga penggarap tidak dimungkinkan untuk menanam lagi di lahan tersebut hingga waktu panen. Dengan kata lain, upaya ini merupakan “cara halus” untuk mengakses lahan selama satu musim (satu tahun). Para penggarap pun menyadari hal itu meskipun menurut Pak Asep, setelah singkong dipanen penggarap masih dimungkinkan untuk kembali menanam di lahan tersebut.

Pak Makmur dan Haji Saefuddin adalah 2 diantara beberapa penggarap yang bersedia bekerja sama dengan perusahaan. Kedua penggarap ini bahkan menawarkan untuk merawat tanaman singkong milik perusahaan. Menurut mereka, singkong-singkong yang telah ditanam di antara sayur-mayur mereka menjadi bagian dari kewajiban mereka sebagai penggarap. Sebagai imbalan, Pak Asep memberikan pupuk kepada Pak Makmur dan Haji Saefuddin.

“Kata Pak Asep, silakan menanam sayur..tumpang sari. Bapak (Makmur) punya tanaman labu, saya (Pak Asep) menanam singkong. Cuma kalau yang sudah dibersihin gini, yah dilanjutin aja

sampai singkong besar kan sayur udah dipanen. Jadi sama-sama..nggak melarang..” (wawancara dengan Pak Makmur tanggal 23 Februari 2012).

Pengalaman menjadi pengawas selama hampir 2 tahun memberikan banyak cerita bagi Pak Asep dan Pak Joko. Ketika berbincang dengan Mas Supri (pegawai yayasan) di rumahnya tanggal 25 Januari 2012, Pak Asep sempat berbagi kepada kami tentang tantangan yang ia hadapi ketika akan membuka lahan di lokasi Sampalan (milik Pak Iw). Ada pihak-pihak yang tidak menyukai langkah yang ia ambil. Ia mengatakan bahwa ia harus bentrok dengan masyarakat penggarap karena mereka menuntut ganti rugi. Program (BBS) sudah berjalan dan singkong harus ditanam. Masalah menjadi semakin rumit ketika *biong-biong* (para makelar tanah) memanas-manasi penggarap untuk meminta ganti rugi dengan alasan mereka (pengarap) sudah memiliki kontrak (menyewa lahan) dengan para *biong* ini.

Saat mendengar kata bentrok, penulis pun terkejut karena Pak Asep sejak awal mengatakan bahwa pihak perusahaan sangat menghindari “ribut-ribut” dengan penggarap, ternyata yang dimaksud bentrok oleh Pak Asep adalah adu argumen antara penggarap dan Pak Asep sebagai perwakilan perusahaan. Para penggarap bersikeras menuntut ganti rugi karena telah mengeluarkan biaya untuk menyewa dan membersihkan lahan, sementara perusahaan memandang penggarap adalah pihak yang menumpang di lahan orang sehingga tidak sepatutnya menuntut ganti rugi. Bagaimanapun ketika beradu argumen tadi, dilakukan strategi yang menurut Pak Asep saling menguntungkan, yaitu negosiasi. Dalam negosiasi inilah biasanya tuntutan para penggarap diakomodir namun nominalnya tidak sebesar yang diajukan sehingga masing-masing pihak tidak dirugikan.

Mengenai *biong*, Pak Asep tidak menjelaskan secara spesifik definisinya, ia hanya mengatakan bahwa ketika pertama kali ditugaskan untuk menjadi pengawas lapangan di lokasi Barudawa 2, ia mulai “berkenalan” dengan para *biong* ini. Menurutnya merekalah yang menjadi provokator di balik gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh penggarap. Pak Asep juga menceritakan kepada penulis tentang sepak terjang para *biong*, yang membawa para investor dari luar wilayah Cipanas (seperti Jakarta) untuk menanamkan investasinya pada lahan-

lahan yang mereka klaim sebagai garapan mereka. Ada beberapa dari *biong* yang melarikan diri setelah mendapatkan uang para investor sehingga Pak Asep mengatakan bahwa mereka adalah penipu.

Sebutan *biong* diberikan kepada mereka yang mengambil keuntungan dari sumber daya khususnya tanah atau lahan dengan cara menyewakannya kepada penggarap, seperti yang terjadi di lokasi Barudawa 2. Lahan yang luasnya lebih dari seribu hektar yang bertatus HGU tersebut sangat potensial dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mencari keuntungan. Menurut pengalaman Pak Asep, mereka berlindung di balik organisasi yang mengatasnamakan masyarakat sehingga seolah-olah kepentingan masyarakatlah yang mereka bela, padahal mereka hanya mengejar keuntungan bagi kelompoknya. Melalui para *biong* inilah warga masyarakat yang membutuhkan lahan garapan dapat memperolehnya dengan cara menyewa.

Persoalan lahan yang dihadapi perusahaan saat akan menanam singkong di 2 kecamatan ini berbeda dengan lokasi-lokasi yang lain. Untuk mempertahankan akses di lokasi sampalan dan Barudawa 2, perusahaan harus menghadapi banyak pihak selain pemilik lahan yang merasa aksesnya terhambat oleh kehadiran perusahaan di kedua lokasi tersebut. Seperti penggarap, yang menurut Pak Asep tidak memiliki kekuatan hukum untuk memanfaatkan dan mengelola lahan yang bukan miliknya, bahkan tidak sedikit yang membuka lahan tanpa seijin pemilik lahan dan mendirikan gubuk-gubuk kecil di lokasi garapannya.

“Kalau (penggarap) yang sadar hukum pasti mencari tahu punya siapa lahan ini dan menyadari kalau (ia) cuma menumpang atau menggarap. Begitu program (BBS) masuk, penggarap minta ganti rugi semua. Ditambah *biong-biong* yang punya kontrak dengan penggarap. Ada juga yang menanam (kayu) sengan, itu indikasinya menguasai lahan.” (tanggal 25 Januari 2012).

Cerita lain tentang strategi negosiasi yang dilakukan perusahaan dengan penggarap, penulis peroleh ketika penelitian lapangan tanggal 26 Januari 2012 saat Pak Nana, pengawas lapangan di lokasi Cikole, kebetulan berkunjung ke lokasi Sampalan yang diawasi oleh Pak Asep. Dari wawancara singkat yang penulis lakukan, Pak Nana mengungkapkan tentang negosiasi yang selama setahun terakhir ini ia lakukan terhadap penggarap. Seperti lokasi Sampalan dan

Barudawa 2, lokasi yang diawasinya pun banyak terdapat penggarap namun agak berbeda dengan lokasi Sampalan yang berstatus lahan hak milik individu, Cikole memiliki status lahan milik negara. Meskipun demikian, menghadapi penggarap juga memberikan tantangan tersendiri baginya.

Ia menceritakan kepada penulis bahwa strategi yang paling memungkinkan untuk memperoleh akses lahan adalah dengan cara menyewa lahan-lahan garapan tersebut. Ia mengakui bahwa dibutuhkan waktu yang tepat untuk mendekati para penggarap. Seperti telah penulis singgung di bagian sebelumnya bahwa kebanyakan penggarap akan menyewakan lahan garapannya apabila tidak memiliki modal untuk menggarap dan biasanya terjadi pada musim kemarau – setelah musim panen- sehingga ia memilih untuk menunggu.

Proses negosiasi yang ia lakukan dengan penggarap adalah dengan menawarkan mereka untuk melakukan tumpang sari, seperti yang dilakukan oleh Pak Asep dan Pak Joko di lokasi masing-masing, sehingga singkong dapat tertanam tanpa mengganggu pertumbuhan tanaman milik penggarap. Ketika penulis menanyakan berapa lama waktu yang ia butuhkan untuk melakukan pedekatan tersebut, ia mengatakan bahwa semua tergantung pada kemampuannya untuk meyakinkan penggarap. Namun kenyataannya, menurut Pak Nana, ketika membutuhkan uang, para penggarap lah yang mendatangnya untuk menyewakan lahan garapan mereka.

Sementara itu, terkait dengan keamanan aset (singkong) yang sedang diusahakan, Pak Asep sempat menceritakan kepada penulis tentang upaya Pak Heru (perusahaan) untuk membeli lahan-lahan garapan dari para penggarap namun biaya yang harus dikeluarkan tidak sedikit. Harga lahan garapan memang tergantung pada lokasi dan harga per meternya berkisar antara Rp. 2.000,- hingga Rp. 3.000,- sehingga dapat dibayangkan harga lahan garapan per hektar dapat mencapai Rp. 20.000.000 hingga Rp. 30.000.000.

Kendati demikian, menurut Pak Asep membeli garapan sebenarnya “lebih aman” daripada sekedar menyewa lahan dari seseorang. Pertimbangannya adalah kepemilikan lahan garapan yang sudah dibeli tidak terikat dengan waktu (seperti sistem penyewaan yang biasanya terbatas periodenya) dan sumber daya yang ada di sekitar lahan (misalnya singkong yang ditanam) tidak akan “diganggu” oleh

pihak lain. Di luar itu, Pak Asep menambahkan bahwa lahan-lahan garapan tersebut suatu saat dapat menjadi hak milik perusahaan sehingga dapat dijadikan investasi untuk kepentingan jangka panjang.

Selain itu, pihak BPN Cianjur juga mengatakan bahwa lahan garapan memang dimungkinkan untuk dimiliki sehingga apabila harga telah disepakati antara penggarap dan perusahaan, maka perusahaan akan segera membeli lahan-lahan garapan tersebut.

“(Lahan over-garapan) bisa jadi hak milik melalui pemberian hak dari tanah negara ke pemberian. Kalau luas bisa dari HGU..kalau HGU luas sih..tapi biasanya dari hak milik dulu ke HGU bisa, penurunan hak namanya..dari hak milik..perubahan hak lah pokoknya. Dari tanah negara..prosesnya aja, sertifikat mah sama. Kalau dari tanah negara namanya pemberian hak, kalau dari tanah adat namanya pengakuan hak atau konversi. Pertama, milik adat ke..(individu) diaku lah ya, minimal 20 tahun..dikuasai, bisa..menjadi hak milik. (Proses pengajuannya) didaftar ke kantor sini..harus melalui desa dulu. Ada over garap..di desa. Ya, desa mencatat kemudian diajukan ke BPN. Yang menggarap terakhir saja yang mengurus ke BPN. Di desa dicatat, baru terakhir pemberian hak dari tanah negara ke individu..yang mengeluarkan BPN.” (wawancara dengan Pak Gundham tanggal 24 April 2012).

Oleh karena itu, upaya negosiasi dengan penggarap seperti yang Pak Nana lakukan di lokasi Cikole merupakan cara perusahaan untuk memperoleh dan menguasai lahan. Ini pula yang menjadi tugas Pak Asep, Pak Joko, dan para pengawas lainnya di lokasi masing-masing. Selain bertanggung jawab mengawasi kegiatan yang berlangsung di lokasi, para pengawas juga berkewajiban untuk menjaga “stabilitas” lokasi tempat mereka bertugas. Stabilitas itu tidak hanya menjaga keamanan aset yang mereka tanam (dari pencurian) tetapi juga hubungan baik dengan pihak-pihak yang telah mengakses lahan sebelumnya, seperti para penggarap dan pengelola (orang-orang kepercayaan pemilik lahan, pengelola KUD, dan pengurus yayasan). Sekalipun tidak semua penggarap mudah untuk diajak bekerja sama, namun pendekatan dan negosiasi tetap menjadi strategi yang dilakukan.

Dengan demikian, negosiasi menjadi strategi pihak perusahaan untuk memperoleh aksesnya di lapangan, meskipun prosesnya tidak selalu berjalan mulus. Selama mengikuti aktivitas yang berlangsung selama beberapa waktu di 2

lokasi yang menjadi fokus penulisan, penulis mengamati bahwa masing-masing pihak saling mempertahankan kepentingan dengan caranya masing-masing. Ada yang memilih untuk bekerja sama (dengan perusahaan) namun tidak sedikit pula yang memilih untuk melakukan hal sebaliknya. Dalam hal ini, penulis melihat bahwa sekalipun tidak mengantongi ijin resmi (tertulis) untuk mengelola sebidang lahan, namun penggarap memiliki posisi tawar yang cukup baik ketika berhadapan dengan pihak perusahaan. Terbukti dari cerita Pak Asep yang membenarkan bahwa setiap penggarap berhasil memperoleh ganti rugi dari perusahaan (meskipun lahan yang digarap bukan milik mereka).

III. 4. Jejaring yang Terjalin Diantara Para Aktor

Setelah mendeskripsikan tentang aktivitas dalam relasi sosial para aktor, bagian ini akan menarasikan bagaimana segala aktivitas tersebut menghubungkan para aktor dalam bentuk jejaring (*strand of webs*). Dari hasil wawancara dengan Lia, staf PT. EKM, terungkap bahwa perusahaan mulai memproduksi bioetanol setelah pimpinan perusahaan (Pak Adi) berhubungan dengan pihak lain. Ketika itu, Lia mengatakan bahwa awalnya perusahaan merasa kebingungan mencari pasar untuk penjualan produknya, tetapi dengan kemajuan teknologi, segala informasi dapat diperoleh.

Latar belakang Pak Adi sebagai seorang akademisi dan politisi memberinya peluang untuk membangun relasi dengan berbagai kalangan. Dari pertemuannya dengan berbagai pihak tersebut, ia mengalami proses belajar sehingga tidak hanya memperoleh informasi tetapi juga berupaya mengembangkan pengetahuannya. Dengan mempelajari segala kemungkinan yang dapat dilakukan, ia kemudian mencoba untuk mengambil peluang memanfaatkan singkong sebagai bahan baku yang dapat menghasilkan bioetanol.

Penanaman singkong di daerah Sukabumi pada tahun pertama produksi diakui Lia kurang sukses bahkan menyebabkan perusahaan menderita kerugian namun seiring berjalannya waktu, perusahaan terus mempelajari strategi untuk meningkatkan produktivitas. Permintaan yang terus meningkat menjadi motivasi bagi perusahaan untuk terus melakukan ekspansi penanaman, terlebih setelah perusahaan mulai membuka kesempatan pihak luar untuk menanamkan modal

mereka pada sumber daya yang mereka kelola. Seperti disebutkan oleh Toulmin (2011: 16) bahwa produksi energi terbarukan mendorong pihak-pihak tertentu untuk melakukan investasi pada lahan pertanian. Ia menunjukkan bahwa investasi lahan dalam skala besar melibatkan sistem global terhadap kepentingan yang kompleks.

Menyadari bahwa upaya penanaman pada tahun pertama tidak mencapai target, perusahaan mencari strategi untuk memperbaiki kondisi tersebut. Berikut analisis pihak perusahaan terkait dengan penyebab kegagalan pada penanaman ditahun pertama.

“Iya, pernah gagal karena pupuk yang kurang bagus, bibitnya sih bagus..pupuknya belum pakai microba. Kita selalu pakai organik, nggak pernah pakai kimia, urea atau apa nggak pernah. (Sukabumi) kondisi tanah dan iklimnya mendukung, ditambah lagi daerahnya datar jadi tidak terlalu sulit.” (wawancara dengan Lia tanggal 14 April 2012).

Pada saat yang bersamaan dengan upaya perusahaan mencoba menemukan inovasi bibit dan pupuk yang lebih baik, perusahaan juga mencari peluang untuk melakukan ekspansi penanaman singkong. Jalinan perkenalan atau kolega membawa Pak Adi bertemu dengan Pak Heru, seorang pengusaha kayu dari Cipanas. Pertemuan itulah yang membuka peluang perusahaan untuk memperoleh akses untuk menanam singkong di daerah Cipanas dan sekitarnya setelah mempelajari bahwa kondisi tanah di daerah tersebut sangat potensial (dari segi kesuburan maupun luas lahan).

Pak Heru sendiri dikenal sebagai orang yang memiliki relasi yang cukup luas sebagai pengusaha kayu. Ia dapat memperoleh informasi tentang lahan di daerah tempat tinggalnya tersebut dengan mudah. Dengan memanfaatkan relasi itulah, Pak Heru diserahkan wewenang untuk mencari lahan di Cipanas.

“Setahu saya, pak Adi dikenalin sama temennya yang kenal pak Heru. Mungkin karena pak Heru yang megang semua..maksudnya megang yang punya tanah-tanah di situ (Cipanas) makanya disewakan per hektar per tahun. Intinya pak Heru yang “megang” daerah situ. Selain di Cipanas, EKM juga nanam di Tenjo (Tangerang), malah itu duluan, baru ke Cipanas..kebetulan Pak Heru kan orang (berasal dari) Tenjo sedangkan di Cipanas itu kan tempat tinggalnya pak Heru. Jadi kerja sama dengan pak Heru nggak cuma di Cipanas.” (wawancara dengan Lia tanggal 14 April 2012).

Selain relasi yang ia miliki dengan berbagai macam kalangan, Pak Heru juga memperoleh pengetahuan tentang singkong dan prospek bisnisnya dari pihak lain yang telah memulai mengembangkan investasi pada singkong. Pengetahuan ini pula yang terus ia kembangkan dengan melakukan percobaan untuk menghasilkan bibit singkong varietas unggul yang mampu menghasilkan produktivitas tinggi. Dengan kemampuannya itu, Pak Adi mengenalkan Pak Heru dengan beberapa koleganya yang juga tertarik pada penanaman singkong.

“Ya salah satu ada Pak Arifin..dia punya lahan, punya pabrik terbesar, kalo di Lampung punya lahan tiga ribu hektar. Saya mungkin lusa diajak ke Lampung, minta dicek tanahnya terus ditanamin singkong. Kemarin program tebu, ya kan ekspor impor ya bangkrut pak karena kan posnya lebih besar. Tapi singkong dia jadi. Mangkanya PT. UKM kontrak lagi tapi saya mau dikirim ke Lampung. Sanggup nggak, Pak Adi nanya lagi ke saya karena harus laporan lapangan kan, sanggup nggak Pak Heru, difasilitasi dan sebagainya, gitu untuk proyek penanaman tiga ribu hektar itu. Barusan saya *contact* dia lagi di gedung Dipo mau kontrak tiga ribu hektar itu. Jadi lahan punya Pak Arifin. Pak Arifin tersebut punya pabrik etanol. Jadi mau *sharing* nanti dimana saya nggak tau. Jadi lahan tidur tolong ditanamin bagaimana atuan mainnya, kayaknya seperti itu. Cuma Pak Adi tanya saya lagi, Pak Heru sanggup nggak? Mangkanya saya bilang ke Pak Adi, Pak jangan dulu main tanda tangan aja, tanya dulu orang lapangannya, kan gak mungkin pak dipraktekin nanam singkong, kan gitu, nanya dulu ke tim saya. Nah disitu lah fungsinya saya. Karena dari buka lahan sampai panen berhasil sampai 215 ton ya saya yang mengusahakan.” (wawancara dengan Pak Heru tanggal 7 September 2011).

Selama bekerja sama dengan PT. EKM, Pak Heru membuktikan bahwa dirinya mampu mencari lahan-lahan yang potensial untuk ditanami singkong. Lokasi pertama di Cipanas yang berhasil ia peroleh adalah Mariwati yang berada di Kecamatan Cipanas. Kemungkinan membuka lahan di lokasi tersebut terbuka setelah Pak Heru bertemu dengan Pak Go dan Pak Mun yang merupakan orang-orang kepercayaan Pak Ben (alm.) yang merupakan pemilik lahan. Setelah meyakinkan Pak Ben tentang investasi singkong yang sangat menjanjikan, Pak Heru berhasil memperoleh akses dengan cara menyewa lahan seluas (kurang lebih) 8 hektar. Akses diperluas dengan menyewa lahan beberapa penggarap hingga mencapai sekitar 52 hektar.

Sambil melakukan perawatan di lokasi Mariwati, Pak Heru melakukan ekspansi ke wilayah yang lain, yaitu Kota Bunga. Lokasi tersebut berbeda kecamatan dengan Mariwati, atau tepatnya merupakan wilayah administrasi Kecamatan Pacet. Konturnya berbukit dan dekat dengan perumahan mewah Kota Bunga. Pak Heru memperoleh akses juga dengan cara menyewa lahan-lahan garapan dari para penggarap. Luasnya kurang lebih sama dengan Mariwati, yaitu 60 hektar.

Namun seperti telah disinggung sebelumnya bahwa PT. EKM (Pak Heru) masih mencari kemungkinan untuk memiliki lahan di wilayah ini dengan cara membeli lahan-lahan garapan dari masyarakat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kepentingan berjangka panjang terkait dengan kepemilikan lahan. Meskipun hingga musim kedua penanaman di Cipanas dan Pacet, perusahaan masih menyewa lahan-lahan garapan karena belum menemui kesepakatan mengenai harga beli lahan-lahan garapan tersebut. Sementara Pak Heru sendiri mengakui bahwa upaya untuk menegosiasikan harga lahan tetap dilakukan.

Terkait dengan kemungkinan untuk membeli lahan garapan oleh perusahaan, seperti telah disebutkan sebelumnya (penjelasan Pak Gundham selaku pihak BPN) bahwa lahan garapan yang telah dibeli oleh seorang individu atau perusahaan dapat dijadikan lahan milik orang atau perusahaan tersebut. Adapun luas lahan dan waktu yang dibutuhkan untuk memprosesnya berdasarkan prosedur yang berlaku dijelaskan oleh Pak Gundham berikut ini.

“(Luas lahan yang bisa diproses untuk menjadi lahan berstatus hak milik) maksimal 2.000 meter di kabupaten. Kalau lebih dari 2.000 meter ngurusnya di Bandung. Kalau di sini 12 hektar hak milik, maksimal untuk lingkup kabupaten, tergantung jumlah penduduk dan luas wilayah. Prosesnya 4 bulanan lah, 100 hari..kalau tanah negara sih nggak sampai segitu, nggak ada penemuan..kalau tanah adat, ada penemuan..maksudnya ada yang komplek nggak..dalam 2 bulan. Kok tanah saya diginiin, dasarnya apa, kan ada C-nya, misalnya begitu..makanya diumumkan di desa, tempel yah. Kalau nggak ada ya dikeluarkan, dicetak. (Tanah adat itu) tanah biasa..masyarakat kuasai, itu kan girik..di buku C. Di desa itu ada buku C, itu milik adat..sebelum hak milik kan milik adat.” (wawancara tanggal 24 April 2012).

Setelah Mariwati dan Kota Bunga berhasil diakses dan dikuasai, Pak Heru “melirik” lahan-lahan “kosong” yang cukup luas di Barudawa 2, Kecamatan Cipanas. Seperti dua lokasi yang telah berhasil ditanami singkong, lokasi inipun sangat strategis. Untuk mengumpulkan informasi tentang status lahan tersebut, Pak Heru dibantu oleh beberapa orang rekannya termasuk Pak Asep (sudah penulis deskripsikan pada bab sebelumnya). Di lokasi inilah, Pak Heru dan rekan-rekannya bertemu dengan pihak pengelola lahan yang tergabung dalam sebuah organisasi bernama KUD. Seperti telah dinarasikan pula di bagian sebelumnya bahwa informasi awal yang Pak Heru dan rekan-rekannya dapatkan terkait status lahan di lokasi tersebut membawanya untuk “membuka” hubungan dengan pihak KUD karena mereka merupakan pihak yang dipercayakan oleh perusahaan perkebunan teh milik Pak Pro untuk mengelola lahan.

Melalui salah seorang anggota KUD bernama Haji Nandang, yang merupakan penggarap di lokasi Barudawa 2, Pak Heru dan beberapa rekannya bertemu dengan Pak Wawan dan Pak Robi (ketua dan sekretaris) untuk membicarakan perjanjian sewa-menyewa lahan. Pak Robi mengakui bahwa ketika itu seluruh lahan yang disewa PT. EKM merupakan lahan-lahan garapan sehingga perjanjian yang dibuat antara pihak KUD dan perusahaan juga melibatkan para penggarap yang jumlahnya lebih dari 10 orang. Oleh karena itu, KUD menurut Pak Robi hanya berperan sebagai fasilitator yang menghubungkan antara perusahaan dan penggarap (meskipun menurut pengakuan Pak Asep, tidak ada penggarap seperti yang dikatakan oleh Pak Robi bahkan Pak Asep sempat menyebut pihak pengelola KUD sebagai *biong* yang memanfaatkan lahan di wilayah tersebut).

Meskipun demikian, sebagaimana telah penulis deskripsikan pula bahwa kerja sama tersebut tidak berlangsung lama sehingga perusahaan perlu membangun relasi dengan pihak lain, yaitu yayasan yang juga mengklaim lahan tersebut. Relasi inilah yang dipertahankan hingga penulis melakukan penelitian lapangan. Pak Asep memberikan alasan bahwa keinginan pihak yayasan untuk “menyingkirkan” para penggarap secara perlahan-lahan menjadi faktor pendukung bagi perusahaan untuk menguasai lahan. Dengan ditanami singkong, menurut Pak

Asep, yayasan sebenarnya terbantu untuk “mengkondusifkan” lahan dari kehadiran para penggarap.

Kesamaan kepentingan itulah yang memperkuat kerja sama antara yayasan dan perusahaan. Meminjam analisis Mosse (2005: 230) yang melihat bahwa hubungan atau relasi yang dibangun para aktor melalui kolaborasi dan kompromi maupun fragmentasi dan perbedaan pendapat akan tergambar pemetaan yang begitu kompleks dan sarat dengan kekuasaan (*power*), maka relasi yang dibangun dan dipelihara oleh pengurus yayasan dan perusahaan penulis maknai sebagai kerja sama yang saling menguntungkan. Di satu sisi, yayasan “menggunakan” perusahaan untuk “menyingkirkan” para penggarap melalui program BBS-nya, dan di sisi lain perusahaan dapat mengakses dan menguasai lahan seluas 66 hektar di lokasi Barudawa 2 dengan cara menyewa dari yayasan.

Relasi dengan para investor sebagai pihak yang juga berkontribusi dalam upaya pengembangan produksi bioetanol ini juga dibangun oleh perusahaan melalui media cetak maupun elektronik. Dari beberapa investor tersebut, ada pula Pak Al yang merupakan kolega Pak Heru yang memberikan informasi tentang lahan-lahan yang potensial di wilayah Cipanas dan sekitarnya. Pak Al, seorang pengusaha yang telah lama berinvestasi di wilayah tersebut telah memiliki relasi dengan beberapa investor yang memiliki lahan di beberapa lokasi. Bersama Pak Al, Pak Heru menelusuri lokasi-lokasi di mana terdapat “lahan-lahan kosong” yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan bisnis perusahaan.

Setelah memperoleh akses di beberapa lokasi yang telah disebutkan, Pak Heru lalu mencoba kemungkinan untuk memperoleh akses di lokasi Cikole, Kecamatan Cipanas melalui informasi yang diberikan oleh Pak Al. Pencarian informasi lebih lanjut dilakukan untuk memastikan bahwa lahan di lokasi tersebut dapat diakses dan dikuasai. Seperti yang telah penulis deskripsikan pada bab sebelumnya, Pak Nana (pengawas lapangan) mengatakan bahwa perusahaan juga menghadapi para penggarap di lokasi tersebut.

Berbeda dengan Barudawa 2 yang diklaim beberapa pihak sehingga bersengketa, Cikole merupakan lahan berstatus milik negara. Banyaknya penggarap yang memanfaatkan lahan lebih banyak bersifat sementara, terutama ketika mereka memiliki modal dan musim penghujan. Sebaliknya, saat musim

kemarau, menurut pengalaman Pak Nana selama bekerja di lokasi tersebut, penggarap memilih untuk menyewakan lahan garapannya untuk mendapatkan modal lagi. Peluang inilah yang dimanfaatkan perusahaan untuk memperoleh akses untuk menanam singkong.

Relasi yang telah Pak Heru miliki dengan Pak Al juga kemudian membawanya bertemu dengan Pak Ib, yang merupakan rekan Pak Iw, pemilik lahan di lokasi sampalan, Kecamatan Pacet. Ketertarikan Pak Heru untuk mengekspansi perolehan dan penguasaan akses lahan di lokasi tersebut dilatarbelakangi oleh luasnya lahan yang dianggap kurang efektif dimanfaatkan oleh pemilik lahan. Selain itu, lokasi yang strategis dan dapat dilalui oleh kendaraan roda empat maupun dua, juga menjadi pertimbangan Pak Heru dan Pak Asep untuk “memprospeknya”. Bila dibandingkan dengan lokasi Mariwati, Kota Bunga, ataupun Cikole, perolehan lahan di lokasi Barudawa 2 dan Sampalan cukup berliku, tetapi dengan strategi yang dipilih (persuasi dan negosiasi) perusahaan membuktikan mampu memperoleh dan menguasai lahan.

Di kedua lokasi itu pula, sekalipun dinilai bergejolak, pihak perusahaan tetap meyakini bahwa program penanaman singkong yang mulai dilakukan sejak 2 tahun terakhir, secara tidak langsung membantu pemilik lahan untuk memfungsikan kembali lahan-lahan yang *gerung*. Tidak jauh berbeda dengan pihak yayasan yang menginginkan supaya perlahan-lahan penggarap tidak lagi memanfaatkan lahan yang mereka klaim, pihak Pak Iw (dan kelompoknya) juga demikian, meskipun diakui oleh Pak Ib bahwa hal itu sangat sulit dilakukan. Terlebih bila dikaitkan dengan peran para penggarap saat pembebasan lahan sehingga pihak Pak Iw seperti berutang budi kepada mereka.

Kendati demikian, dalam relasi yang terjalin antara perusahaan (melalui pengawas lapangan seperti Pak Asep) dan pihak yang diberikan kepercayaan oleh pemilik lahan (seperti Pak Komar dkk) di lokasi sampalan, penulis melihat bahwa perusahaan tetap memiliki *power* yang lebih besar daripada orang-orang kepercayaan Pak Iw tersebut. Sekalipun Pak Komar dan beberapa rekannya berhasil meyakinkan pihak Pak Iw untuk memperbaiki kontrak perjanjian dan memberikan akses pada lahan seluas 30 hektar miliknya, namun perusahaan tetap

bertahan pada pernyataan Pak Iw sebelumnya (membuka seluruh lahan untuk ditanami singkong).

Berdasarkan perhitungan Pak Asep, hingga kini perusahaan telah membuka lebih dari 20 hektar lahan milik Pak Iw. Ketika penelitian ini dilakukan, proses perawatan sedang berlangsung di lokasi tersebut, bersamaan dengan pembukaan lahan yang terus dilakukan. Relasi yang coba dibangun oleh perusahaan dengan para penggarap pun dimaksudkan untuk mengurangi resiko benturan dengan mereka. Sementara keluhan-keluhan yang pernah disampaikan oleh Pak Komar dan kawan-kawannya (sebagai orang-orang kepercayaan Pak Iw) tidak dianggap sebagai ancaman karena perusahaan hanya “berurusan” dengan Pak Iw sebagai pemilik lahan.

Ketika penulis bertemu dengan Pak Komar di gudang milik Pak Iw yang digunakan untuk menginap para pekerja dari Cianjur Selatan, terlihat bahwa Pak Komar sungkan untuk berhadapan langsung dengan Pak Asep. Saat itu, penulis mengamati bahwa Pak Komar sengaja menghindar saat ada Pak Asep. Baru setelah penulis memperkenalkan diri sebagai peneliti, Pak Komar bersedia berbagi pengalaman selama mengelola lahan milik Pak Iw. Selama percakapan berlangsung, cukup jelas terlihat ketidaksetujuan Pak Komar akan rencana Pak Iw memberikan akses kepada perusahaan dengan alasan hal itu menghambat para penggarap yang membutuhkan lahan untuk berkebun.

Dari uraian di atas, penulis mengamati bahwa masing-masing aktor saling berkolaborasi atau berkompromi untuk mencapai tujuannya. Sementara mereka yang berbeda kepentingan akan saling menghalangi dengan cara-cara tertentu. Strategi-strategi tersebut menunjukkan relasi yang sarat dengan kekuasaan, seperti yang penulis amati ketika perusahaan (Pak Asep) berhadapan dengan Pak Uud atau Pak Komar (kepercayaan Pak Iw). Menyadari bahwa mereka tidak bisa secara langsung menghadapi pihak perusahaan, maka Pak Komar dan rekan-rekannya berusaha untuk mempengaruhi Pak Iw. Upaya tersebut ternyata membawa hasil. Terbukti dari permintaan (perjanjian baru) yang diajukan oleh pihak Pak Iw kepada Pak Heru yang hanya mengizinkan 30 hektar lahan miliknya untuk ditanami singkong.

Melalui Pak Ib, Pak Iw menyampaikan kepada Pak Heru tentang permintaan orang-orang kepercayaannya untuk tetap mengizinkan para penggarap memanfaatkan lahan miliknya. Hal itupun direalisasikan dalam bentuk surat perjanjian, yang menurut Pak Asep, belum disetujui oleh Pak Heru sehingga belum menemui kesepakatan. Bagi Pak Heru (perusahaan) menanam lahan seluas 96 hektar tentu lebih bisa menjamin ketersediaan bahan baku daripada hanya menanam sepertiganya. Disamping itu, melalui Pak Ib pula Pak Heru mengetahui bahwa sebenarnya pemilik lahan menginginkan seluruh lahannya “terbebas” dari penggarap sehingga Pak Heru masih mempertahankan kepentingannya.

Pengamatan juga menunjukkan bahwa proses pembukaan lahan yang masih dilakukan oleh Pak Asep di lokasi sampalan menunjukkan bahwa Pak Heru (dalam hal ini perusahaan) memiliki *power* untuk melanjutkan program BBS di lokasi milik Pak Iw tersebut. Sekalipun Pak Asep tidak menyatakan secara eksplisit namun dari kegiatan yang terus dilakukan terlihat bahwa perusahaan mencoba memelihara aksesnya atas keseluruhan luas lahan yang ada. Dari hasil percakapan yang penulis lakukan dengan Pak Asep terungkap bahwa perusahaan masih akan membuka lahan disamping melakukan perawatan singkong.

Relasi yang dibangun dan dipertahankan oleh para aktor (sehingga menghubungkan mereka satu sama lain) menjadi strategi untuk memelihara akses atas lahan yang dimanfaatkan. Ribot (1998: 5) menyebutkan bahwa mekanisme-mekanisme, struktur-struktur, dan proses-proses yang mendukung akses mencakup *maintenance* dan *control*. *Maintenance* merupakan kegiatan meluaskan sumber daya atau *powers* untuk menjaga akses bagi dirinya dan orang lain sedangkan *control* terkait dengan kekuasaan terhadap pihak lain. Istilah-istilah ini dapat menggambarkan secara longgar orang atau kelompok dengan relasi-relasi yang berbeda terhadap produksi, pertukaran, dan konsumsi.

Dengan demikian, akses dapat hadir dengan atau tanpa *control*, atau melalui perpaduan antara *maintenance* dan *control*, tergantung pada tempat dan kekuasaan yang dimiliki oleh individu. Pendekatan akses -yang merupakan “*bundle of powers*”- memisahkan *bundle of powers* tersebut dan mekanisme-mekanisme yang mendukung mereka kepada untaian komponennya yang mereka bentuk tidak hanya kepemilikan atas sesuatu, tetapi juga keseluruhan aliran (*flow*)

dan distribusi atau manfaat-manfaat yang terasosiasi dengan seluruh lintasan hal-hal tersebut. *Maintenance* dan *control* menjadi aspek-aspek yang saling melengkapi dalam aktivitas-aktivitas yang berhubungan, yaitu tentang relasi-relasi antar aktor yang saling berhadapan terkait dengan peruntukan (*appropriation*) atau pemanfaatan (*use*).



BAB IV

MEKANISME AKSES PADA LAHAN PERKEBUNAN SINGKONG

Because people can be excluded from accessing or benefiting from land (for instance by fencing it, posting guards around it, or simply making it known through signs or public knowledge and associated sanctions that someone has claimed it), land is an excludable resource by this definition (Hall, Hirsch, and Li, 2011: 7).

Pada bagian ini dinarasikan bagaimana PT. EKM memperoleh, mengendalikan, dan memelihara akses lahan yang akan dan telah ditanami singkong. Lahan menjadi sumber daya terpenting dalam upaya pengembangan bioetanol. Seperti disebutkan dalam penelitian Murdiyatmo (2006: 6) bahwa salah satu kendala yang dihadapi oleh para investor atau pengusaha dalam memproduksi bioetanol adalah perolehan lahan (ekstensifikasi) untuk menanam bahan baku meskipun lahan tidak produktif banyak dijumpai di berbagai propinsi. Belum lagi perdebatan yang muncul di masyarakat bahwa singkong masih dimanfaatkan untuk bahan pangan sehingga terjadi persaingan antara bahan bakar (*fuel*) dan makanan (*food*). Untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut, PT. EKM mengupayakan produktivitas tinggi yang didukung oleh ketersediaan lahan untuk menjamin keamanan produksi.

IV. 1. Mekanisme Memperoleh Akses: Menyewa Lahan dari Pemilik, Pengelola, atau Penggarap

Percakapan antara penulis dan Pak Adi beserta rombongan anggota DPR ketika kunjungan ke lokasi sampalan pada tanggal 26 Januari 2012 merupakan kesempatan yang cukup langka. Mengingat jadwal Pak Adi yang begitu padat sehingga penulis sangat kesulitan untuk meminta waktunya (diwawancarai) maka pertemuan tersebut penulis manfaatkan untuk bertanya soal pengembangan bioetanol oleh perusahaan. Ketika itu, Pak Adi sepakat bahwa produksi tidak mungkin terjadi tanpa proses penanaman terlebih dahulu sehingga untuk dapat

menanam singkong, perusahaan membutuhkan lahan yang memadai. Tidak hanya secara fisik (kondisi lahan yang subur), tetapi juga keamanan (*security*) selama proses penanaman hingga pemanenan berlangsung karena waktu yang dibutuhkan cukup panjang, yaitu 9 hingga 12 bulan.

Terkait dengan tantangan maupun kendala yang dihadapi dalam pengembangan bioetanol, Pak Adi sendiri tidak menampikinya namun ia optimis bahwa target perusahaan untuk memproduksi 10.000 liter bioetanol per hari akan terus terpenuhi. Baginya yang terpenting adalah strategi yang tepat dalam pengembangannya, yaitu melalui produktivitas pertanian. Dalam beberapa tahun ke depan, ia menargetkan produktivitas semakin ditingkatkan karena seluruh wilayah Jawa Barat akan dijadikan lokasi penanaman singkong.

“(Target produksi) sepuluh ribu liter (per hari). Saya minta tolong..benar memang ada benturan antara produksi bioetanol dan ketersediaan pangan, tapi tolong bantu saya. Tidak benar itu karena ada produktivitas. Kami sudah membuktikan bahwa yang biasanya produksi 50 ton per hektar sekarang menjadi 250 ton per hektar, itu jauh sekali! Begini, dulu 10 hektar kan dapatnya 700 ton, sekarang 250 ton itu cuma dari 1 hektar. Jadi terjadi produktivitas pada luas lahan yang sama (hanya 1 hektar) tetapi hasil berlipat-lipat! Nah energi terbarukan bukan hanya isu kebutuhan tetapi kebutuhan dasar! Beda..kebutuhan belum tentu kebutuhan dasar. Kalau Indonesia terlambat 5 tahun saja, kita hanya akan jadi penonton! Saya juga bicara dalam ceramah-ceramah..masa kita mau jadi penonton terus? Menanam singkong itu pakai ilmu..yang penting produktivitas! Jawa Barat menjadi target penanaman singkong.”

Terkait dengan target yang ingin dicapai perusahaan terkait dengan penanaman di seluruh wilayah Jawa Barat, wawancara yang penulis lakukan dengan Lia (tanggal 14 April 2012) terungkap bahwa perusahaan pertama kali memulai penanaman di daerah Sukabumi, dilanjutkan ke daerah Tenjo (Tangerang), lalu ke Cipanas (Cianjur), dan baru-baru ini membuka lahan di daerah Suka Makmur (Jonggol). Total luas lahan yang telah dimanfaatkan di wilayah-wilayah tersebut sekitar 1.000 hektar. Perluasan lokasi penanaman itu dilakukan untuk menjaga keamanan tersedianya bahan baku.

“Etanol sendiri masih lancar sampai sekarang karena tiap bulan kita panen..di Cipanas karena dari investor sendiri mulai bulan ini sampai beberapa bulan ke depan masih akan panen. Selain ke pabrik, kita juga ada kerja sama dengan PT. Cassava yang ada di Sentul. Itu dia

ngambil sendiri di kebun, per kilonya 1.000. Perusahaan (yang menjadi konsumen) itu memproduksi makanan, mulai dari kripik, tepung, es krim juga..onggok atau limbah etanol untuk es krim. (Selain memenuhi permintaan pasar untuk bahan baku dalam produksi) perusahaan juga mengupayakan memproduksi bahan bakar ramah lingkungan yang bisa dimanfaatkan masyarakat luas nantinya, intinya sih kesitu..saat ini memang digalakkan untuk memproduksi biopremium, dalam arti campuran bioetanol dan premium. Dari segi pasarnya sendiri, mungkin karena masih mahal jadi kita masih riset aja Mba. Paling yang pakai adalah para relasi Pak Adi karena memang harganya yang masih mahal, kalau diturunin (harganya) kayaknya nggak mungkin.”

Pentingnya menjamin ketersediaan bahan baku bagi produksi bioetanol sangat disadari oleh perusahaan. Akses terhadap pasar bioetanol yang diperoleh perusahaan *dimaintain* antara lain oleh bahan baku yang selalu tersedia. Oleh karena itu, perusahaan melakukan beberapa strategi untuk memperoleh akses lahan demi tercapainya keberlangsungan penyediaan bahan baku singkong.

Menyewa sepertinya menjadi satu-satunya strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh akses terhadap lahan di lokasi Cipanas dan Pacet (Cianjur). Sebelum itu, Pak Heru melakukan pencarian lahan di sekitar dua wilayah tersebut dan tahun 2010 menjadi awal kegiatan perusahaan mencari lahan di lokasi-lokasi ini. Untuk kebutuhan sewa lahan tersebut PT. EKM membebankan Rp. 1.500.000 rupiah kepada para investornya sehingga biaya penanaman hingga panen (ditambah sewa lahan) totalnya menjadi Rp. 26.000.000.

Khusus di dua kecamatan di Kabupaten Cianjur yang menjadi fokus penelitian, Lia (staf PT. EKM) mengatakan bahwa pimpinan perusahaan mempercayakan masalah pembukaan lahan kepada Pak Heru. Keputusan perusahaan menanam singkong di wilayah (kabupaten) ini pun dilatarbelakangi oleh pertemuan yang terjadi antara Pak Adi dan Pak Heru.

Ketika penulis datang untuk *fieldwork* yang pertama, Pak Heru sebagai salah satu informan kunci sempat berbagi cerita tentang awal pertemuannya dengan Pak Adi. Ketika itu, Pak Heru dikenalkan oleh seorang rekan kenalan Pak Adi. Kemudian Pak Adi menawarkan kerja sama mengembangkan Program BBS melalui penanaman singkong. Menurutnya, saat itu Pak Adi juga berbagi

pengalaman tentang kegagalan panen ditahun pertama (di daerah Sukabumi). Kerugian yang cukup besar diderita oleh perusahaan menurut Pak Heru disebabkan oleh ketidakdisiplinan para pekerja di perkebunannya tersebut. Ia pun menegaskan bahwa kebanyakan petani baru akan bekerja apabila diawasi oleh orang yang berpengaruh.

Pertemuan antara Pak Adi dan Pak Heru kemudian menghasilkan kerja sama. Pak Heru dianggap mampu mendukung usaha PT. EKM untuk meningkatkan produksi singkong terutama dalam upaya pencarian lahan. Sebagai orang yang cukup disegani di daerah Cipanas, Pak Heru memiliki kemampuan untuk “memperoleh” lahan dengan cara menyewa atau bekerja sama dengan pemilik lahan. Pengetahuannya tentang keberadaan “lahan-lahan tidur” atau lahan yang sebenarnya masih aktif menghasilkan tetapi tidak dikelola oleh pemiliknya pun diakui oleh PT. EKM. Dengan demikian, sejak pertemuan itu, Pak Heru menjadi orang yang dipercaya oleh PT. EKM untuk menyediakan lahan di wilayah ini.

Ada dua wilayah yang dipercayakan kepada Pak Heru, yaitu di Cipanas dan Tenjo/Jasinga (Tangerang). Pak Heru kebetulan berasal dari wilayah tersebut dan memiliki aset berupa lahan pribadi. Dari lahan yang dimilikinya tersebut, sekitar 100 hektar ia sewakan kepada PT. EKM untuk ditanami singkong. Hasilnya pun sangat memuaskan. Hal itu diakui pula oleh pihak PT. EKM ketika penulis mencoba menanyakan tentang pemenuhan bahan baku bioetanol dari lokasi tersebut melalui wawancara berikut.

“Kalau di Tenjo malah besar-besar hasilnya. Di Tenjo awal nanam untuk investor makanya di sana *sold out* karena kebanyakan investor mintanya di sana meskipun kita juga buka di Cipanas tetapi karena investor sudah tahu hasilnya besar..”
(wawancara dengan Lia tanggal 14 April 2012).

Penanaman di Cipanas (dan sekitarnya) sendiri hampir bersamaan dengan di Tenjo, hanya berselang beberapa bulan. Luas lahan yang berhasil ditanami hingga saat ini sekitar 268 hektar atau kurang lebih 70% dari 382 hektar total luas lahan. Untuk proses penanaman hingga pasca panen, perusahaan mempercayakan seluruhnya kepada Pak Heru, mulai dari penyediaan bibit hingga tenaga kerja yang dipekerjakan. Hanya pupuk yang tetap difasilitasi oleh perusahaan. Hal ini

didukung oleh hasil wawancara yang penulis lakukan dengan Pak Heru pada tanggal 7 September 2011. Ia menyatakan bahwa bibit singkong yang ditanam di Cipanas merupakan hasil kreativitasnya dalam melakukan *penyetekkan* (antara singkong lokal dan singkong kayu yang menghasilkan singkong *mukebat*). Bibit-bibit tersebut mampu menghasilkan umbi seberat 15-20 kilogram per batang.

Besarnya kepercayaan yang diberikan oleh perusahaan kepada Pak Heru dalam menjalankan usaha ini membuat Pak Heru menyadari bahwa ia tidak mungkin bekerja sendiri. Ia pun meminta bantuan beberapa rekan kerja (anak buah) nya untuk bekerja sebagai pengawas di beberapa titik lokasi perkebunan. Meskipun sempat mengalami pergantian pengawas, kini ada 5 orang yang dipercayakan Pak Heru untuk menjalankan tugas tersebut, yaitu Pak Asep (lokasi milik Sampalan), Pak Joko (lokasi Barudawa 2), Pak Husni (lokasi Kota Bunga), Pak Roni (lokasi Mariwati), dan Pak Nana (lokasi Cikole).

Bersama para pengawas lapangan inilah Pak Heru mencari dan mengumpulkan informasi tentang lahan-lahan yang dapat ditanami singkong melalui relasi pertemanan atau perkenalan. Pak Asep sendiri mengakui bahwa Pak Heru memiliki banyak kenalan (tidak hanya di wilayah Cipanas) sehingga ia dapat mengakses informasi tentang lokasi-lokasi lahan yang potensial untuk ditanami singkong. Melalui mereka pula (teman atau kenalan) Pak Heru bertemu dengan pihak-pihak yang mengklaim dirinya sebagai pemilik lahan di lokasi-lokasi yang telah disebutkan.

Untuk melihat bagaimana akses tersebut diperoleh, penulis mengacu pada hasil pengamatan di 2 lokasi yang difokuskan, yaitu Sampalan dan Barudawa 2 namun sebelum perusahaan menyewa lahan di kedua lokasi tersebut, perusahaan melakukan kontrak sewa lahan dengan pihak Pak Ben (alm.) dan para penggarap di lokasi Mariwati (Kecamatan Cipanas) dengan luas yang mencapai sekitar 60 hektar. Seperti telah penulis singgung di bab sebelumnya, kontrak yang pada awalnya dilakukan selama satu musim kemudian diperpanjang oleh perusahaan sehingga perusahaan masih mempertahankan akses penanaman di lokasi tersebut.

Selain Mariwati, lokasi yang diakses perusahaan dengan cara menyewa lahan garapan adalah Kota Bunga. Pembukaan lahan oleh PT. EKM pada tahun 2010 di lokasi Kota Bunga (Desa Sukanagalih, Kecamatan Pacet) menjadi awal

kontrak sewa lahan dengan para penggarap. Ketika itu, Pak Heru menyewa lahan garapan dari beberapa penggarap dengan luas sekitar 60 hektar. Kemampuan finansial yang dimiliki perusahaan menjadi salah satu hal yang memungkinkan untuk menyewa lahan garapan seluas itu. Meskipun diakui oleh Pak Heru bahwa untuk menyewa lahan garapan di lokasi ini, perusahaan melakukannya secara bertahap (tidak sekaligus).

Lokasi ketiga yang juga memungkinkan perusahaan untuk dapat memperoleh akses untuk menanam singkong adalah Cikole (di Kecamatan Cipanas). Seperti di kedua lokasi yang telah dideskripsikan, Cikole juga dimanfaatkan oleh banyak penggarap karena status lahannya adalah milik negara (lahan bekas perkebunan). Hal tersebut dipertegas dengan penjelasan Pak Nana (pengawas lapangan) yang terungkap ketika penelitian lapangan bulan Januari 2012. Ia mengatakan bahwa lahan di Cikole juga tidak “steril” dari kehadiran para penggarap namun Pak Nana mengatakan bahwa hal tersebut bukan penghalang bagi perusahaan untuk dapat memperoleh akses menanam singkong di sana.

“(Para penggarap) radiusnya jauh dari lapangan tembak yang masih dipakai..kalau pendekatan ke penggarap nggak terpatok waktu. Meskipun yang menggarap itu tanahnya di tengah-tengah, kan yang penting ada batasnya, nggak masalah.” (wawancara tanggal 26 Januari 2012).

PT. EKM (melalui Pak Nana) yang berkepentingan untuk menanam singkong di lokasi tersebut kemudian melakukan pendekatan kepada setiap penggarap agar bersedia menyewakan lahannya karena tidak seluruh lahan garapan dimanfaatkan terus-menerus oleh penggarap. Ia mengakui bahwa prosesnya tidak selalu mulus karena pada musim penghujan (ketika penulis melakukan penelitian lapangan), biasanya penggarap baru atau sedang menanam palawija sehingga tidak akan “menyerahkan” garapannya, tetapi ketika musim kemarau datang biasanya mereka akan menyewakan garapannya karena membutuhkan uang. Apabila penggarap bersedia bekerja di kebun singkong yang dikelola PT. EKM, maka akan diberikan ijin untuk menanam secara tumpang sari di lahan yang disewakan tersebut. Dengan demikian, mereka tidak kehilangan akses sepenuhnya terhadap lahan tersebut.

Lokasi berikutnya yaitu Sampalan, yang merupakan lahan milik perorangan atau individu (seperti di lokasi Mariwati), di mana PT. EKM harus berupaya lebih keras untuk memperoleh akses di lokasi ini karena lahan ini lebih “bergejolak”. Seperti telah dinarasikan pada bab sebelumnya bahwa lahan ini telah menjadi hak milik seorang pengusaha bernama Pak Iw sejak tahun 1996. Semenjak itu pula sang pemilik lahan mempercayakan beberapa orang warga masyarakat yang tinggal di sekitar lahan untuk memelihara dan mengelola.



Gambar 4. 1. Salah satu titik penanaman di lokasi Sampalan (sumber: dokumentasi penelitian).

Lahan yang dapat dikatakan tidak diproduktifkan sejak tahun 1999 atau menjelang tahun 2000 tersebut kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang kepercayaan sang pemilik lahan untuk disewakan kepada para penggarap. Salah seorang kepercayaan Pak Iw bernama Pak Komar yang berhasil penulis wawancarai mengaku bahwa ia sendiri baru 4 tahun terakhir ditugaskan menjadi pengawas lahan oleh Pak Iw. Hal itu terjadi karena ayah mertuanya yang bernama Pak Panaheli yang telah menjadi pengawas lahan tersebut selama 23 tahun, meninggal dunia.

“Ini dari orang tua saya, udah 23 tahun. Diterusin ke saya..karena Bapak meninggal..saya yang gantiin. Memang sekarang dibagi 2 dengan Pak Kohar, dia baru 5 bulanan. (Tugas saya) cuma ngawasin aja..saya mah di bawah (baca: lahan persawahan), kalau Pak Kohar yang di atas (yang sedang ditanami singkong oleh PT. EKM).” (wawancara tanggal 25 Februari 2012).

Informasi tentang status lokasi ini juga penulis peroleh dari mantan orang yang berpengaruh di Desa Sukanagalih bernama Pak H. Dedi. Ketika masih menjabat kepala desa, H. Dedi berkontribusi dalam proses pembebasan lahan yang semula dimiliki oleh masyarakat desa kepada Pak Iw. Ia pun menceritakan tentang prosedur kepemilikan lahan tersebut.

“Jadi gini intinya. Status kepemilikannya, jadi kita kalau ingin tahu status kepemilikannya harus tau di lapangan, yang sebelah mana gitu karena disana juga bukan cuma satu orang, pemiliknya yang blok mana..kalo Sampalan itu kan pemiliknya Iw sama CS (kelompok) lah gitu ya banyak juga. Kalo bicara Pak Iw saya tau persis. Kalo Pak Iw prosesnya diselesaikan oleh saya memang. Waktu itu 3 tahun saya ngurus itu perdata sampai ke Mahkamah Agung saya ngurus sendiri waktu itu jadi saya tau betul kalo Pak Iw sendiri.. Tanah desa di rishlah ke Pak Iw CS. Alhamdulillah 3 tahun kita selesai disana milik Pak Iw. Penggantiannya kita disana seluas 18,5 hektar di Cianjur. Sebetulnya saya ngelanjutkan. Jadi pengrislah itu bukan saya, Abah (mantan kades) dulu. Cuma belum selesai, ya kita selesaikan.” (wawancara tanggal 27 Februari 2012).

Sementara itu, ketika pertama kali akan membuka lahan di lokasi ini, pihak PT. EKM melalui Pak Heru melakukan pertemuan dengan sang pemilik lahan. Dalam pertemuan tersebut, PT. EKM menawarkan keuntungan sebesar 10% dari setiap hektar lahan singkong yang ditanami kepada Pak Iw. Pihak Pak Iw sendiri bermaksud untuk memproduktifkan kembali lahan yang sangat luas tersebut namun dengan mempertimbangkan kehadiran para penggarap yang menggantungkan hidup pada lahan miliknya, Pak Iw meminta perusahaan hanya menanam pada 25 hektar lahan tersebut.

Di sisi lain, PT. EKM mencoba mengajukan negosiasi dengan mengatakan bahwa investasi singkong semakin berkembang sehingga membutuhkan lahan yang semakin luas pula. Ketika itu menurut Pak Asep, pihak Pak Iw tidak langsung menyetujui dan mengatakan untuk memikirkan tawaran tersebut. Hingga suatu hari, utusan Pak Iw yang bernama Pak Ib mendatangi Pak Heru kembali dan mengatakan bahwa PT. EKM diijinkan untuk membuka seluruh lahan Pak Iw.

Untuk itu, pihak Pak Iw sebagai pemilik lahan melakukan sosialisasi kepada orang-orang yang dipercayakannya. Dari cerita Pak Asep yang sempat penulis rekam tanggal 29 Februari 2012 terungkap bahwa rencana kerja sama antara perusahaan (PT. EKM) dan pemilik lahan (Pak Iw dan rekan-rekan) yang

semula hanya seluas 25 hektar kemudian menjadi seluruhnya atas permintaan Pak Iw sendiri. Sosialisasi itupun dilakukan dengan mengumpulkan orang-orang kepercayaan Pak Iw.

“Pernah (bertemu). Waktu itu Pak Iw datang terus dikumpulin (orang-orang kepercayaannya seperti Pak Komar dan Pak Kohar yang dipercayakan menjaga lahan sampalan) sama Pak Iw. Komar, Kohar, Pak Iw, Pak Heru, di situ di gudang, dikumpulin. “Saya mau tanam singkong disini” kata Pak Iw (kepada orang-orang kepercayaannya tersebut). Mau saya tanamin semua, kata Pak Iw. Seharusnya mereka (orang-orang kepercayaannya) ngerti.”

Pembicaraan antara perusahaan dan pemilik lahan kemudian menghasilkan kerja sama. Proses pembukaan lahan pun dimulai. Di lokasi ini, Pak Asep yang dipercaya untuk menjadi pengawas lapangan dibantu oleh Mang Paul (paman Pak Heru) sebagai teknisi yang bertugas memperbaiki mesin-mesin yang digunakan untuk membuka lahan (seperti traktor kecil) dan H. Tatang yang bertugas menjadi mandor. Sementara para pekerjanya adalah petani-petani yang berasal dari desa-desa di sekitar lokasi ditambah dengan sejumlah petani dari Cianjur Selatan (yang dibawa H. Tatang).

Hari demi hari perusahaan terus membuka lahan di lokasi ini hingga suatu saat datang seorang pria yang mengaku orang kepercayaan Pak Iw mengajukan ketidaksetujuannya terhadap tindakan perusahaan. Hal ini menjadi satu dari beberapa tantangan yang harus dihadapi oleh Pak Asep sebagai pengawas. Ia pun meminta orang tersebut untuk menemuinya di lokasi dan mengajaknya bicara meskipun pada akhirnya tidak menemui kesepakatan karena orang tersebut mempertahankan perjanjian yang dibuat oleh Pak Iw dan pihak perusahaan menurut versi yang ia pegang.

“Tapi kan itu yang *complaint* itu si Komar 25 hektar. Saya jelasin, kalo Pak Adi (pimpinan) masalah kontrak tidak tahu-menahu, yang tau tuh Pak Heru. Kalo Uud nggak percaya, hayo saya tarik ke rumah Pak Heru, kata saya. Diam langsung, gemetar langsung si Komar gak berkutik lagi. ‘Kamu jangan *complaint* ke saya, saya disini cuma pengawas lapangan, pekerja, bukan ngurusin masalah lahan. Kalo kamu mau *complaint* masalah lahan, ayo saya tarik kerumah Pak Heru. Mau jam berapa pun ayo siap’, kata saya. Langsung gemetar kan si Komar ini, katanya ‘saya punya kontrak, Pak dari Pak Iw 25 hektar’.” (tanggal 29 Februari 2012).

Ketika penulis menanyakan soal perjanjian tersebut kepada Pak Komar, salah seorang kepercayaan Pak Iw yang sempat beradu argumen dengan Pak Asep, ia mengatakan bahwa perusahaan telah melanggar perjanjian yang telah dibuat. Ia sempat menunjukkan kepada penulis surat perjanjian yang ditandatangani oleh Pak Adi (Direktur PT. EKM) dan Pak Iw (pemilik lahan) meskipun penulis tidak dapat memastikan keaslian surat tersebut. Di dalam surat tersebut disepakati bahwa perusahaan akan menanam di lahan seluas 25 hektar milik Pak Iw selama satu musim (satu tahun).

Sementara itu, pihak perusahaan yang diwakili Pak Asep sebagai pengawas lapangan bersikeras bahwa pihak pemilik lahan telah memperbaharui pengajuan kerja sama melalui Pak Ib, rekan Pak Iw, yang mendatangi Pak Heru sehingga perusahaan dapat mengakses seluruh lahan yang dimiliki Pak Iw untuk ditanami singkong. Dengan demikian, pihaknya terus membuka lahan meskipun sebenarnya belum sampai 25 persen dari keseluruhan lahan berhasil dibuka. Pak Asep sendiri mengakui bahwa proses untuk membuka lahan seluas itu membutuhkan waktu, tenaga, dan biaya yang tidak sedikit. Ditambah lagi kondisi lahan yang berbukit-bukit dengan kemiringan yang cukup curam menjadi tantangan lain bagi para pekerjanya.

Namun keberatan yang diajukan oleh orang kepercayaan Pak Iw seperti Pak Komar menunjukkan bahwa ia (mewakili rekan-rekannya yang lain) khawatir akan terbatasnya akses yang mereka miliki terhadap lahan tersebut. Bagi Pak Komar sendiri, akses bagi penggarap pun diperoleh setelah Pak Iw memberikan izin kepada mereka untuk mengelola lahannya. Dari para penggarap yang jumlahnya sekitar 30 orang, ia mendapat bagi hasil berupa sejumlah uang apabila mereka panen. Sekalipun ia mengakui bahwa sebenarnya Pak Iw sendiri mengajukan syarat 30% bagi hasil kepada para penggarap, tetapi menurutnya hal tersebut sangat sulit diperoleh mengingat panen di lokasi kebun tidak selalu berhasil.

“..nggak tau di sini sih ngontrak kaga, nyewa kaga..tergantung yang nggarap aja, mau ngasi diterima..kalau disewain takutnya ada yang beli gitu. Ya..kalau penggarap suka ada yang ngasih..tapi ga dipaksain..semampunya. Memang sih nentuin 30% dari kebon-kebon itu, tapi kan susah..dari dulu juga yang ngebon nggak ada yang berhasil, pada hancur..yaa..waktu panen kena angin, hancur..kalau

nanam cuma bisa sampe bulan ke-4, kalau bulan ke-5 atau ke-6 habis sama angin.” (wawancara tanggal 25 Februari 2012).

Beberapa keberatan yang disampaikan dan perbedaan versi tentang perjanjian atau kesepakatan yang dibuat menunjukkan bahwa Sampalan merupakan lokasi (selain Barudawa 2 yang akan didekripsikan selanjutnya) yang memberikan tantangan cukup besar bagi Pak Asep. Pengalaman sebelumnya menjadi pengawas di lokasi Barudawa 2 memberinya bekal untuk menghadapi tantangan tersebut, termasuk ketika menghadapi orang-orang kepercayaan Pak Iw. Namun untuk menjaga nama baik perusahaan dan dirinya sebagai bagian dari masyarakat, Pak Asep memilih untuk menghindari konflik terbuka dengan mereka.

“(Orang-orang kepercayaan Pak Iw) kalau saya datang itu langsung pergi, seolah-olah nggak mau ngobrol. Terserah sih, (buat saya) nggak penting juga. Cuma kalau kamu mata-matain saya, kompor-komporin penggarap soal tanah, salah, saya bilang gitu. Jadi dulu tuh indikasinya dia takut, takut jabatannya (termasuk akses terhadap lahan) digeser di sini. Dia bisa bikin rumah, si Kohar rumahnya bagus-bagus dari hasil panen kok. Dia sewakan ke penggarap. Semua itu dibilang dari Komar. Kalo sini Kohar, kalau itu (menunjuk salah satu sisi lahan) Asep, tapi belum tau saya orangnya yang mana. Ini 16 hektar. Pak Iw kan orangnya cuek, maksudnya tidak tahu “medan”.” (tanggal 29 Februari 2012).

Selain orang-orang kepercayaan pemilik lahan, pihak lain yang harus dihadapi perusahaan terkait dengan upaya memperoleh akses lahan adalah para penggarap yang sudah membuka lahan jauh sebelum perusahaan datang ke lokasi ini. Oleh karena itu, menurut Pak Asep tugas yang tidak hanya mengawasi kegiatan penanaman hingga panen, tetapi juga mempertahankan akses perusahaan terhadap lahan menjadi semakin berat. Ia seringkali merasakan dilema ketika berhadapan dengan penggarap. Di satu sisi, perusahaan memberikannya wewenang untuk “mengusir” penggarap (karena memegang legitimasi yang diberikan oleh pemilik lahan), tetapi di sisi lain rasa kemanusiaan tidak bisa diabaikan begitu saja. Selain itu, nama baik perusahaan menurut Pak Asep akan rusak apabila terjadi pengusiran penggarap secara paksa.

Salah satu dilema yang Pak Asep rasakan sempat diceritakannya kepada penulis ketika menghadapi seorang penggarap senior (sudah sekitar 3 tahun

terakhir ia menggarap di lokasi Pak Iw) bernama Pak Wahyu, yang menolak bekerja sama dengan PT. EKM karena merasa sudah diberikan hak langsung dari pemilik lahan. Menurut cerita Pak Asep, Pak Wahyu menolak untuk “menyerahkan” lahan garapannya karena pernah berjasa kepada pemilik lahan sehingga lahan –seluas kurang lebih 6.000 meter persegi- yang “diberikan” kepadanya merupakan cara Pak Iw membalas jasanya dahulu. Ia bahkan meyakinkan Pak Asep bahwa ia baru akan “pergi” apabila Pak Iw sendiri yang mengusirnya.

Selain beberapa cerita tentang orang-orang kepercayaan Pak Iw dan para penggarap, perolehan akses lahan di lokasi oleh perusahaan juga diwarnai oleh cerita yang lain. Pak Asep mengutarakan kebingungannya terhadap pihak pemilik lahan yang berubah pikiran. Hal itu terjadi setelah pihak Pak Iw mengajukan perjanjian kerja sama yang baru dengan meminta PT. EKM hanya membuka lahan seluas 30 hektar (dari sekitar 96 hektar total lahan yang sebelumnya mereka minta dikelola perusahaan).

Ketika pengajuan tersebut, pihak Pak Iw memberikan alasan bahwa ia tidak ingin mengusir para penggarap yang sudah lama (lebih dari setahun menggarap) karena dianggap berjasa saat proses pembebasan (pembelian lahan dari masyarakat oleh Pak Iw) dahulu. Meskipun demikian, pengajuan kerja sama yang baru ini pun menurut Pak Asep belum mendapat persetujuan dari perusahaan (diwakili Pak Heru) sehingga ia mengasumsikan bahwa PT. EKM masih memegang perkataan Pak Iw yang memperbolehkan seluruh lahannya ditanami singkong.

Bagaimanapun tantangan yang dihadapi, perusahaan tetap berusaha untuk memperoleh akses di lahan di lokasi ini. Kehadiran para penggarap juga tidak dapat diabaikan dan mengharuskan perusahaan berpikir tentang strategi mendekati mereka. Sementara itu, strategi yang juga dilakukan oleh perusahaan saat ini adalah “membuka” lahan-lahan yang tidak digarap oleh siapapun. Lahan-lahan tersebut oleh para informan diberi istilah *gerung*, artinya lahan yang banyak ditumbuhi rerumputan liar akibat tidak diolah (dan dirawat) oleh siapapun. Meski sebelumnya pernah dimanfaatkan atau dikelola oleh seseorang namun setelah lama ditinggalkan, maka lahan tersebut menjadi terlantar.



Gambar 4. 2. Salah satu lahan *gerung* yang menjadi target “pembukaan” lahan selanjutnya (sumber: dokumentasi penelitian).

Barudawa 2 adalah lokasi kedua yang menjadi fokus dalam penelitian. Selain mengikuti kegiatan di lokasi sampalan, penulis juga melakukan pengamatan di lokasi ini. Untuk mencapai lokasi, penulis biasanya menumpang motor Pak Asep saat ia dan Pak Joko (pengawas lokasi ini) melakukan koordinasi terkait dengan tugas yang mereka jalankan. Seperti ketika perjalanan hari ini, Pak Asep berbagi cerita kepada penulis tentang awal “pertemuan”nya dengan lokasi ini.

Sekitar tahun 2010 lalu, Pak Heru dibantu oleh Pak Asep dan 2 orang rekannya melakukan survey (berkeliling) untuk mengumpulkan informasi tentang status lahan di lokasi ini. Ketika itu, Pak Heru menilai bahwa lahan ini potensial untuk ditanami singkong. Lahan yang cukup luas, diperkirakan sekitar 60 hektar, tanah yang gembur, dan letak yang strategis menjadi pertimbangan Pak Heru untuk menindaklanjuti pencarian informasi dengan mendatangi pihak yang mengelola lahan ini.

Dari informasi yang berhasil Pak Heru kumpulkan, ia mendatangi sebuah organisasi yang disebut KUD oleh warga masyarakat. Di kantor KUD, Pak Heru bertemu dengan para pengurus KUD dan menyampaikan kepada mereka bahwa PT. EKM membutuhkan lahan untuk ditanami singkong. Ibarat gayung bersambut, pengurus KUD yang menurut Pak Robi ketika itu diwakili oleh

beberapa orang anggota KUD, menawarkan kerja sama kepada Pak Heru dan memastikan bahwa pihak Pak Heru dapat menanam singkong di lahan tersebut.

“Kalau nggak salah..dulu yang ngenalin saya ke Pak Heru itu rekan-rekan penggarap ya..Haji Nandang..karena Pak Heru pengen usaha dengan PT. EKM, ada wadah lah di sini, jadi orang-orang di sana minta tolong mungkin dulu tanah Pak Pro diperuntukkan buat kandang ayam, jadi Haji Nandang ngenalin saya dengan Pak Heru, termasuk dengan bos-bosnya, Pak Adibrata dan Pak Bam..ya jadilah itu kerja sama dengan usaha singkong. Jadi punya penggarap yang ada di sana disewakan lahannya ke pihak Pak Bam yang diwakili Pak Heru..sekian tahun sekian tahun..Pak Heru pengen “mainnya” simpel simpel, jadi minta wadahnya KUD. Tapi yang nyewakannya anggota itu..ya, rekan-rekan banyak di sana, ada H. Yusuf.” (wawancara dengan Pak Robi tanggal 18 April 2012).

Perjanjian pun dibuat. Pak Heru setuju menyewa lahan dengan biaya sekitar Rp. 37 juta dengan cara mencicil pembayarannya. Informasi ini penulis peroleh dari salah seorang informan kunci namun ketika penulis mencoba mengkonfirmasi kepada Pak Robi selaku sekretaris KUD, ia tidak memberi jawaban pasti. Kendati demikian, menurut Pak Asep hingga selesai pembayaran dan program peAsepman berlanjut, tidak ditemui masalah atau kendala terkait dengan lahan.

“Kontraknya kalau nggak salah 2 tahun..saya lupa lagi sih (seperti menghindari pertanyaan ini)..dua kali, pada waktu itu penggarap..sebelah sana sudah beres..ya mungkin penggarap sebelah sininya pengen menyewakan karena kebutuhan dari pihak singkong nanamnya banyak, ada lagi penambahan. ada yang 10 (hektar)..lupa saya..udah lama sih..kebetulan Haji Nandang ngga nyerahin sama saya (lagi-lagi seperti menghindar)..sebagian itu, malam-malam bulan puasa, kalau ngga salah dini hari menjelang subuh. Singkongnya sampai sekarang saya nggak tahu..” (wawancara dengan Pak Robi tanggal 18 April 2012).

Ketika itu, pihak pengurus KUD mengatakan bahwa lahan-lahan yang disewakan adalah milik penggarap sehingga KUD hanya memfasilitasi. Kerja sama itupun berjalan baik. Perusahaan membuka lahan dan menanam singkong seperti di Mariwati dan Kota Bunga hingga suatu hari, salah seorang pengawas (termasuk Pak Asep) didatangi oleh beberapa orang dengan membawa parang yang *complaint* soal lahan. Hal ini tentu saja mengagetkan para pengawas ketika itu. Mereka kemudian melaporkan kejadian itu kepada Pak Heru.

Setelah itu, Pak Heru meminta para pengawas untuk tetap melakukan aktivitas seperti biasa karena perusahaan telah melakukan kerja sama dengan pihak pengelola lahan. Tidak lama setelah kedatangan “tamu tak diundang” itu, datang lagi seorang pria bernama Pak Sofyan, yang mengaku sebagai pengurus sebuah yayasan (bernama MR). Ia meminta bertemu dengan Pak Heru untuk menyampaikan keberatan organisasinya atas kegiatan “pembukaan” lahan yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Inilah awal pertemuan pihak perusahaan dan yayasan, yang mengklaim dirinya sebagai pemilik lahan di lokasi ini.

Pak Sofyan selaku perwakilan yayasan ketika itu menyatakan keberatannya dengan alasan bahwa lahan yang ditanami tersebut adalah milik yayasan. Ia pun menunjukkan bukti dokumentasi kepemilikan lahan berupa AJB yang ditandatangani oleh yayasan dan pihak penjual lahan (yang dikatakan oleh Pak Sofyan sebagai kerabat Pak Pro). Sejak peristiwa itu, pihak perusahaan (Pak Asep dan Pak Heru) merasa ditipu oleh pihak pengelola KUD, kendati Pak Heru ketika itu memutuskan untuk tidak menuntut pihak KUD karena ingin program penanaman singkong (BBS) ini berjalan kondusif dan damai.

“Kalau sengketa itu yang jelas kan kalau saya sebagai pekerja hanya memegang data yang ada. Kalau disini kan AJB, kalau AJB kan masih dibawah sertifikat. Jadi yayasan punya AJB itu jelas yang *booking* kan pemerintah, ada tanda tangan desa, kecamatan, itu yang kita pegang. Adapun sengketa itu kan biarkan urusan mereka. Kita juga sebagai pekerja lapangan kan buat apa nyari itu juga. Tugas kita untuk nanam ya ngapain ngurusin kesana-sana nambahin kerjaan.”
(wawancara dengan Pak Sofyan tanggal 28 Februari 2012).

Wawancara yang penulis lakukan dengan Pak Dedi, mantan orang berpengaruh di Sukanagalih juga memperkuat keterangan yang diberikan oleh Pak Sofyan. Sebagai pejabat desa yang mengetahui proses kepemilikan lahan oleh yayasan, Pak Dedi memiliki persepsi yang agak berbeda dengan Pak H. Ujang, Kaur Desa, tentang status HGU di lokasi tersebut.

“Kalau Barudawa 2 itu kan kemarin pernah sengketa, itu diklaim oleh KTMPN yang dari Pro, U26 Ciloto itu..lalu muncul kemarin ada dari yayasan (xxx), jadi blok yang Barudawa itu. Untuk (lahan di lokasi) KUD itu, tadi sudah saya sampaikan seperti itu tadi..karena KTMPN punya U26 Ciloto artinya HGU. Dia punya sertifikat HGU nomer 26 Ciloto, lokasi berada di Sukanagalih. Kemudian kemarin kan muncul lagi yayasan (xxx) itu, ya kan gitu intinya. Jadi itu

diklaim (oleh) dua-duanya, masing-masing mengklaim, akhirnya naik (banding) ke pengadilan itu kemarin. Cuma sempat kemarin ke Pengadilan Tata Usaha Negara itu yang digugat LPN. (Yayasan) kalah kemarin. Dia (yayasan) sih mengaku beli dari RHS tahun 1995 itu di bawah tangan Pak Haji Ta kan, dia mengeluarkan surat keterangan tidak sengketa itu ya kita cek kan ke pengadilan. Kalau tanah sudah sengketa sudah ada perkaranya kan. Nah kita cek, ahli warisnya ada dan sebagainya. Namun saya pernah nanya 'kok kamu punya tanah ini dari mana?' katanya 'ini dari bapak saya', saya tanya 'siapa kamu?' 'RHS'. 'masih ada?', 'udah meninggal pak'. 'dimana meninggalnya? Mana surat kematiannya?' 'ada'. Saya pergi ke pamannya untuk buktikan." (wawancara tanggal 27 Februari 2012).

Terkait klaim atas lahan yang diajukan oleh pihak yayasan, penulis merujuk pada konsep akses legal yang disebutkan oleh Ribot dan Peluso (2003). Dalam pembahasan mengenai akses legal, Ribot dan Peluso menyebutkan bahwa *rights-based means of access* mengimplikasikan keterlibatan komunitas, negara, atau pemerintah yang menguatkan pengakuan/klaim. Hak-hak kepemilikan berdasar hukum termasuk akses melalui pembuatan akte dari harta yang dimiliki sebagai ijin sah dan lisensi. Konvensi atau kesepakatan biasanya tidak disertai dengan kekerasan atau paksaan meskipun terkadang disertai pula dengan tindakan seperti itu. Untuk memperolehnya, orang akan mendatangi pemegang hak (*rights holders*) untuk memperoleh atau memelihara akses, terkadang dengan membayar atau menukar jasa apabila menginginkan keuntungan dari sumber daya yang ada.

Akibat *multiple claims* yang dimunculkan beberapa pihak, perusahaan dihadapkan pada kenyataan bahwa untuk memperoleh lahan di lokasi ini ternyata tidak semudah di 3 lokasi lainnya (Mariwati, Kota Bunga, dan Cikole). Sekalipun ketika menghadapi pihak yayasan yang keberatan soal lahan, Pak Asep mengatakan bahwa pihak perusahaan sebelumnya tidak mengetahui soal status kepemilikan oleh yayasan karena telah diyakinkan oleh pihak pengurus KUD. Di sisi lain ketika menghadapi yayasan, pihak perusahaan meminta mereka (pihak yayasan) sendiri yang mengajukan keberatan kepada pihak KUD meskipun hingga saat ini tidak ada gugatan yang dilayangkan oleh yayasan kepada mereka, paling tidak itu menurut pengamatan Pak Asep.

Gugatan oleh pihak yayasan (melalui Pak Sofyan) kemudian ditindaklanjuti oleh perusahaan dengan melakukan pendekatan kepada pihak

yayasan (terutama para karyawan yang tinggal di sekitar lokasi lahan). Pak Asep mengatakan bahwa Program BBS mencari lahan hanya untuk ditanami singkong dan bukan untuk dikuasai sehingga pihaknya lebih memilih lahan-lahan dengan status yang “jelas dan aman”. Perusahaan pun kemudian menawarkan kerja sama dengan pihak yayasan dan saat itu pula perusahaan mengetahui bahwa lahan di lokasi ini hanya seluas 66 hektar (tidak seluas yang disebutkan oleh pihak pengurus KUD).

Proses “pembukaan” lahan dilanjutkan dan tantangan berikutnya datang dari para penggarap (seperti di lokasi sampalan) yang meminta ganti rugi atas lahan yang sudah mereka “buka” atau bersihkan dari rumput-rumput tinggi (*gerung*). Penggarap berargumen bahwa mereka telah menghabiskan banyak biaya untuk membuka lahan sehingga patut untuk diberikan kompensasi. Hal ini sebenarnya tidak disetujui Pak Asep karena menurutnya para penggarap tidak memiliki ijin resmi (ilegal) dalam mengelola lahan, namun ia tidak punya pilihan karena perusahaan harus memperoleh akses lahan.

Munculnya istilah “lahan garapan” kemudian penulis tanyakan kepada pihak BPN Cianjur karena fenomena ini tidak hanya ditemukan di kawasan Cianjur dan Jawa Barat, tetapi juga di beberapa wilayah lain di Pulau Jawa. Ketiadaan lahan yang menyebabkan seorang petani menjadi buruh atau penggarap di lahan orang lain terkait erat dengan banyaknya lahan yang bersifat *absentee*. Meskipun kepemilikan lahan di luar kecamatan melanggar Undang-undang, tetapi Pak Gundham mengakui bahwa hal itu banyak terjadi terutama di wilayah Kabupaten Cianjur, di mana banyak lahan yang dibeli para pemodal besar untuk dijadikan rumah-rumah peristirahatan.

“Sekarang kan gampang diakalin, datang aja ke desa, bikin KTP di situ. Nah sekarang sejak e-KTP repot nih, musti satu. Kalau pertanian nggak boleh, harus setempat, berdomisili di situ. Dalam satu kecamatan atau berbatasan..di luar kecamatan tapi masih nempel lah..kalau dia jauh di mana, nggak boleh.” (wawancara dengan Pak Gundham tanggal 24 April 2012).

Studi yang dilakukan Loffler (1996: 24) terhadap desa-desa di Jawa menunjukkan bahwa kondisi perekonomian kaum urban yang lebih baik membawa mereka membeli lahan-lahan di luar wilayah (kecamatan lain) sebagai

bentuk investasi, spekulasi, atau peristirahatan saat mereka liburan. Kaum urban elit yang memiliki modal tersebut memiliki informasi dan pengetahuan tentang prospek lahan di masa yang akan datang. Selain itu, kelompok ini juga memiliki kemampuan untuk mengurus proses registrasi yang bersifat kompleks dengan cara yang cepat. Biasanya mereka yang tidak sempat mengurus masalah administrasi ini akan menggunakan jasa petugas kantor desa, seperti yang dijelaskan oleh Pak H. Ujang dan Pak Supena di kantor desa.

“Ada petugasnya (di kantor desa yang akan mengurus), yang dibutuhkan surat kuasa (dari pihak yang ingin membeli lahan). Langsung dari sini, ke Pak Lurah juga bisa. Nanti diurus sama dia tinggal tahu beresnya. Berdasarkan surat kuasa, nggak perlu menghadap ke Pak Camat enggak ke BPN juga enggak. Kalau masalah penandatanganan *mah* dari awal kan udah ditandatangani. Ada persyaratan gini tanda tangan. Untuk pengurusan nanti yang ngundang kesana ada surat kuasa menghadap. Selain surat kuasa menghadap, juga mengambil, mengambil buktinya nanti. Mengurus, menghadap dan mengambil surat. Ada yang sepotong cuma mengurus tapi diambil oleh pemiliknya nggak enak saya juga. Saya yang babak belur, sudah diambil langsung, kalau sudah selesai diambil sendiri. Ongkos saya mundar mandir saya yang ngeganti. Kira-kira kasarnya begitu lah. Ya pekerjaan sehari-harinya begitu. Mundar-mandir ke Cianjur, ke Pratama, ke Kecamatan. Ya istilahnya kan pelayanan, melayani masyarakat. Kalo ibu kan gitu menyita waktu berapa bisa setengah bulan. Mondar-mandir gitu, capek, ongkos juga berapa. Kalau dihitung dari persentase angka PPAT mah.. biaya itu kan gak berapa, tapi kalo sebagaimana aturan gitu kan kapan selesainya. Orangnya kan taunya bersih” (tanggal 29 Februari 2012).

Oleh karena itu, seperti halnya sampalan yang pemiliknya tidak berada di wilayah di mana lahan itu berada, lokasi Barudawa 2 juga memiliki problema yang tidak kalah pelik. Status lahannya yang masih sengketa (antara pihak Pak Pro dan yayasan) membuat para penggarap menganggap bahwa lahan itu adalah lahan berstatus HGU yang telah dikembalikan kepada negara sehingga masyarakat berhak untuk mengelolanya. Anggapan itu menunjukkan seolah-olah status kepemilikan oleh yayasan tidak diakui oleh masyarakat (penggarap) sekalipun secara *de facto* mereka mengakui keberadaan yayasan di lokasi ini (ditandai oleh pembangunan gapura sebagai pintu masuk ke lokasi dan beberapa *bedeng* yang ditinggali oleh para karyawan yayasan dan keluarganya).

Sementara pihak yayasan yang diwakili oleh Pak Sofyan mengakui bahwa sebelum yayasan “masuk” ke lokasi dan mempertahankan akses terhadap lahan ini, penggarap sudah banyak. Semenjak lahan seluas 66 hektar tersebut diklaim oleh yayasan, setiap penggarap yang ingin mengelola lahan harus meminta izin pengurus yayasan terlebih dahulu. Meskipun tidak mengakuinya sebagai penyewaan, tetapi Pak Sofyan mengatakan bahwa pihaknya mencatat setiap nama penggarap yang masuk ke lokasi tersebut.

“Semua sudah ada datanya. Jadi kalau nggak salah belum lama ini itu didata ulang. Penggarap hanya menggarap..ada semua ya jamannya Pak Ipal ya koordinatornya. Kalau yayasan tidak menyewakan. Jadi tetep yayasan tidak menyewakan jadi dia hanya numpang saja. Ketika dipakai sama yayasan, dia akan pergi dengan sendirinya tanpa kompensasi sedikit pun, perjanjiannya seperti itu. Ada semua (bukti hitam di atas putih atau perjanjiannya). Kalau nggak salah numpuk segini (menunjukkan dengan gerakan tangan). Ya nanti di situ kita lihat, mana penggarap asli mana penggarap yang ngaku-ngaku. Kalo dilihat dari datanya si ini kok ada nama penggarap tapi nggak pernah garap disini, gitu. Jadi kan itu yang tau persis kan kita yang di lapangan, penggarap benar atau tidak, penggarap ngaku-ngaku atau tidak. Yang jelas kalau ngaku-ngaku dia kalau mau garap kan nggak bisa. Jadi tujuannya dia itu ngebohong saya rasa dia pengen menggarap di lokasi kita. Yang jelas sih sebelum mereka buka lahan otomatis kan kita halangin dulu. Kita perlihatkan ini punya yayasan ini datanya. Jadi dia belum sempet ke lokasi ya sudah kita *heading*. Atau seumpama sudah kebablasan, kita kasih pengertian. Intinya itu.” (tanggal 28 Februari 2012).

Menghadapi berbagai tantangan yang muncul sejak awal (pembuatan perjanjian baru dengan yayasan) membuat perusahaan harus mempersiapkan uang tambahan demi memperoleh akses lahan di lokasi ini. Dalam beberapa pembicaraan antara penulis dan para pengawas (Pak Asep, Pak Joko, dan Pak Nana), uang menjadi materi yang paling dibutuhkan terutama ketika berhadapan dengan para penggarap, meskipun tidak semua penggarap meminta kompensasi. Seperti yang dihadapi oleh Pak Joko yang bertugas menjadi pengawas dalam setahun terakhir di lokasi ini, uang menjadi syarat yang diajukan penggarap untuk mau bekerja sama dengan perusahaan.

Luas lahan yang boleh digarap juga menjadi pertanyaan penulis kepada para pihak pengelola lahan yang mengklaim, baik di lokasi sampalan milik Pak Iw

maupun di Barudawa 2 ini. Apabila Pak Komar mengakui bahwa tidak ada pembatasan waktu untuk menggarap dan luas lahan yang diberikan kepada penggarap, maka penjelasan Pak Sofyan tidak jauh berbeda.

“Kalau semua sih satu kali panen. Adapun nanti ketika dia sudah panen kan nanti dia ngomong dengan sendirinya gimana boleh tidak untuk nanem lagi. Jadi kita tidak ngebatasin berapa-berapanya. Kalau luas kita liat juga. Sekarang ini kan kalau dibilang luas kan untuk penggarap asli kan..kalau asli penggarap kan saya rasa untuk luas kan modalnya nggak punya ya kalau petani asli itu. Mangkanya yang kita perbolehkan kan termasuk petani asli, dan orang-orang yang ijin kan otomatis kan. Berapa sih..dua ribu meter (persegi) paling luas ya..lima ribu tapi rata-rata dua ribu meter. Jarang yang luas kalo petani asli. Data yang terakhir itu nggak ada ya yang tiga ribu (meter persegi) ya. Kalo ukur sih tidak, tapi kan karena kita biasa di kebun kan tau kira-kiranya berapa. Yang jelas sih dari pusat kan pernah kita serahkan datanya, data penggarap, ini penggarap musiman, ini penggarap yang betul-betul nyari nafkah disitu. Itu kalo nggak salah sih sudah saya serahkan ke koordinator. Nah tinggal dari koordinator nyampe gak ke pusatnya, kan gitu.” (tanggal 28 Februari 2012).

Semakin luas lahan yang digarap, semakin besar pula kompensasi atau ganti rugi yang diajukan penggarap kepada perusahaan, tetapi pemberian kompensasi (termasuk tanaman yang akan dipanen) tersebut tidak kemudian menghilangkan akses penggarap. Perusahaan tetap menunggu hingga penggarap memanen tanamannya. Untuk jenis sayur-mayur, masa tanam yang cukup singkat (sekitar 60 hingga 100 hari) tidak menjadi penghalang bagi singkong. Pak Asep bahkan mengatakan bahwa upaya yang dilakukan oleh perusahaan sebenarnya adalah “mengusir” penggarap secara perlahan-lahan.

Hal inipun disadari oleh penggarap sehingga ganti rugi yang mereka ajukan pun terkadang dinilai terlalu besar (tidak sesuai dengan luas lahan) oleh para pengawas seperti Pak Asep dan Pak Joko. Contohnya adalah Pak Kumis, seorang penggarap yang meminta kompensasi cukup tinggi dan penulis sempat mengikuti proses negosiasi antara dirinya dan kedua pengawas (akan dibahas di subbab selanjutnya). Untuk mengurangi biaya kompensasi yang tinggi itu, para pengawas akan langsung mendatangi penggarap yang meminta kompensasi dan menghitung (dengan perkiraan) luas lahan dan tanaman yang harus dibayarkan.

Seperti lahan di lokasi Sampalan yang tidak dapat dimiliki oleh pihak PT. EKM (karena berstatus lahan individu), lahan di Barudawa 2 yang diklaim oleh yayasan pun demikian. Oleh karena itu, PT. EKM hanya bisa menyewa lahan melalui perjanjian dengan pihak pemilik dan pengelola lahan. Berdasarkan informasi dari Pak Asep yang merupakan orang kepercayaan Pak Heru, perusahaan menawarkan pembagian keuntungan sebesar 10 persen dari hasil panen per hektar lahan. Ia juga menambahkan bahwa selain memperoleh hasil dari lahan-lahan tersebut, pemilik lahan juga dapat “mengamankan” lahannya dari para penggarap yang tidak meminta ijin terlebih dahulu.

Strategi yang juga dilakukan PT. EKM untuk memperoleh lahan adalah mengajak penggarap untuk bekerja di lahan yang ditanami singkong. Seperti yang dilakukan di lokasi Cikole, Pak Nana (pengawas) menawarkan hal itu sebagai bentuk kerja sama. Dengan cara ini penggarap diharapkan dapat terus merawat tanamannya sambil merawat singkong yang dimiliki PT. EKM. Upaya ini pun dilakukan oleh Pak Asep maupun Pak Joko kepada para penggarap yang mereka hadapi, tetapi agak berbeda dengan lokasi Cikole, para penggarap di Sampalan dan Barudawa 2 lebih memilih menunggu panen sayuran yang mereka tanam kemudian meninggalkan lahan garapannya.

IV. 2. Mekanisme Mengontrol Akses

Setelah memperoleh akses, maka PT. EKM juga harus mengontrol dan memelihara aksesnya terhadap lahan agar penanaman dapat dilakukan secara berkelanjutan. Seperti dikatakan oleh Ribot dan Peluso (2003: 154) bahwa beberapa orang dan institusi (bertugas) mengendalikan akses terhadap sumber daya, sementara yang lain harus mempertahankan akses mereka melalui pihak-pihak yang memiliki *control*. Perhatian pada hubungan yang berbeda ini merupakan salah satu jalan untuk melihat *dynamic analytic*. Analisis akses membantu kita memahami *mengapa* beberapa orang atau institusi memperoleh keuntungan dari sumber daya, memiliki hak ataupun tidak terhadap sumber daya tersebut. Inilah yang menjadi perbedaan utama antara analisis akses dan properti.

IV. 2. 1. Menempatkan Pengawas di Kebon Singkong

Mengingat lahan yang ditanami singkong cukup luas dan tersebar di beberapa lokasi, maka cara yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengontrol akses adalah menempatkan pengawas untuk memantau kegiatan yang berlangsung di perkebunan setiap hari. Untuk itu, Pak Heru menempatkan masing-masing orang kepercayaan (anak buahnya) di 5 lokasi penanaman singkong. Di seluruh lokasi tersebut kegiatan berlangsung setiap hari kecuali Jumat, mulai pukul 07.00 hingga 16.00 WIB. Pekerja (petani) diberikan waktu istirahat pada pukul 12.00 selama 30 menit. Petani mendapat upah sebesar Rp. 35.000,- per hari dan dibayarkan setiap hari Kamis (jadwal tutup buku per minggunya) setelah pengawas lapangan memberikan laporan kepada perusahaan.

Pengamatan yang penulis lakukan di lokasi sampalan atau milik Pak Iw, misalnya, para petani telah berdatangan sejak pagi hari. Para pekerja bukan hanya para petani yang berasal dari sekitar lokasi (yang disebut dengan petani lokal oleh Pak Asep), tetapi juga para petani yang berasal dari Cianjur Selatan (yang disebut petani selatan). Jumlahnya 50 orang dan sebagian besar (39 orang) adalah petani yang tinggal di sekitar lokasi. Untuk mencapai kebun singkong, mereka berjalan kaki dari rumahnya masing-masing. Jarak yang ditempuh sekitar 1 hingga 4 kilometer dan biasanya melalui jalan-jalan memotong melalui perkampungan.

Selama berada di lapangan, penulis memperoleh informasi dari Pak Asep sebagai pengawas di lokasi tersebut bahwa dari jumlah 50 orang petani yang bekerja, 30 orang diantaranya adalah laki-laki dengan usia antara 18 hingga 60 tahun. Para petani ini rata-rata telah bekerja sejak awal perusahaan membuka lahan di lokasi ini. Begitu pula dengan petani perempuan yang berjumlah 20 orang, rata-rata sudah bekerja di lokasi ini sejak awal perusahaan membuka lahan (tahun 2010 silam). Tidak jauh berbeda dengan petani laki-laki, para petani perempuan rata-rata berusia 20 hingga 55 tahun. Kebanyakan dari mereka juga telah menikah (ada pula suami-istri petani yang bekerja di lokasi ini).

Beberapa minggu pengamatan di lokasi, sedang berlangsung pembukaan lahan dan penanaman. Untuk itu, perusahaan tidak hanya membutuhkan pekerja yang bisa mencangkul, tetapi juga yang dapat mengoperasikan traktor besar maupun kecil. Oleh karena itu, ketika tiba di lokasi, para petani langsung bekerja

sesuai dengan keahlian masing-masing. Dua orang membat rumput dengan menggunakan mesin pembat, satu orang menggunakan traktor untuk membajak tanah, sebagian besar lainnya mencangkul (memperdalam lubang tempat menanam atau *nyoblak*), dan memupuk.

Semua pekerjaan tersebut dilakukan oleh petani laki-laki. Sementara para petani perempuan lebih banyak berperan ketika proses perawatan. Mereka bertugas membersihkan rumput-rumput yang tumbuh di sekitar tanaman singkong. Seperti telah penulis singgung bahwa untuk memperoleh hasil yang maksimal (sesuai target panen), singkong harus dirawat. Pada usia memasuki minggu ke-7 atau ke-8 perawatan harus mulai dilakukan hingga singkong berusia 6 bulan.

Selama proses pembukaan hingga panen, seorang pengawas lapangan bertanggung jawab untuk mengawasi kegiatan yang berlangsung untuk memastikan setiap tahap dapat diselesaikan tepat waktu. Untuk membuka lahan seluas satu hektar misalnya, Pak Asep mengatakan kepada penulis bahwa hal itu tergantung pada kontur lahan, jumlah petani yang bekerja, dan alat yang tersedia. Ia menambahkan pula bahwa untuk membajak lahan yang miring dan curam, pekerja hanya dapat menggunakan traktor kecil (*hand tractor*) sedangkan traktor besar akan efektif bila digunakan di lahan yang datar.



Gambar 4. 3. Proses pembukaan lahan dengan menggunakan traktor (dokumentasi penelitian).

Kegiatan membuka lahan, menanam, dan memupuk dapat dilakukan secara bersamaan. Setelah tanah dibajak dengan traktor, tanah kemudian dicangkul lagi untuk memperoleh kedalaman yang lebih baik untuk menanam, kemudian diberi pupuk organik, dan ditanami bibit singkong. Dalam satu hektar lahan, PT. EKM menargetkan sebanyak 10.000 batang bibit yang ditanam. Jarak antar bibit sekitar 1 meter. Jarak tersebut dianggap cukup ideal untuk pertumbuhan umbi dan diharapkan setiap batang dapat menghasilkan minimal 12 kilogram umbi.

Target hasil yang besar tersebut menjadi pertimbangan bagi PT. EKM untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap aktivitas di perkebunan singkong. Pengalaman Pak Asep sebagai pengawas dan kemampuannya menghadapi berbagai tantangan yang dihadapi perusahaan di lokasi Barudawa 2 pada tahun pertama (2010) menjadikannya sebagai seorang pengawas yang paling diandalkan oleh Pak Heru (selaku manajer lapangan), atasannya. Pak Asep pun kemudian ditugaskan menjadi pengawas di lokasi Sampalan pada awal tahun 2011, sementara Pak Joko, rekan Pak Heru yang lain, ditawarkan pekerjaan menjadi pengawas lapangan menggantikan Pak Asep.

Pak Asep (dan para pengawas yang lain) tidak hanya mencatat kehadiran atau absen setiap petani yang bekerja di lokasi yang di"pegang"nya, tetapi juga berkeliling lokasi untuk memastikan bahwa semua proses berjalan sesuai dengan rencana PT. EKM. Seperti telah disebutkan oleh penulis bahwa ada pembagian kerja bagi para petani, maka mengawasi jalannya pembukaan lahan, pemupukan, penanaman bibit, hingga pemanenan juga menjadi tugas pengawas di lokasi. Setiap aktivitas yang berlangsung di lokasi kemudian dicatat oleh pengawas kemudian dilaporkan kepada Pak Heru selaku manajer lapangan ketika rapat koordinasi.

Kendali (*control*) seperti didefinisikan oleh Ribot dan Peluso (2003: 158) "...refers to the checking and direction of action, the function or power of directing and regulating free action" merupakan bagian dari upaya perusahaan menunjukkan kepada pihak lain bahwa perusahaan memiliki akses terhadap lahan. Perusahaan "menggunakan" Pak Heru dan beberapa anak buahnya untuk melakukan kendali atau menengahi/memediasi akses pihak lain. Dengan

demikian, pihak-pihak lain (seperti penggarap atau pengelola lahan) yang sebelumnya memiliki akses menjadi kehilangan akses terhadap lahan, meskipun prosesnya berlangsung secara bertahap.

IV. 2. 2. Koordinasi antara Manajer dan Para Pengawas Lapangan

Kendali atau kontrol terhadap akses lahan juga dilakukan Pak Heru dengan cara melakukan koordinasi dengan para pengawas lapangan yang merupakan orang-orang kepercayaannya di lapangan. Pertemuan seperti itu menurut Pak Heru cukup penting dilakukan untuk memelihara komunikasi dengan para pengawas selain laporan yang setiap sore dikirimkan oleh para pengawas. Meskipun secara ideal koordinasi itu dilakukan setiap minggu, namun karena kesibukan Pak Heru beberapa bulan terakhir, pertemuan dilakukan apabila Pak Heru sedang berada di Cipanas.

Selama penelitian lapangan, penulis sempat mengikuti pertemuan yang biasanya dilakukan di kediaman Pak Heru tersebut. Ketika itu, pertemuan membahas tentang perkembangan penanaman di setiap lokasi. Masing-masing pengawas, yang telah datang sekitar 15 menit sebelumnya, telah mempersiapkan bahan laporan yang kemudian “dipresentasikan” kepada Pak Heru dan rekan-rekan lainnya. Pertemuan juga membahas kesulitan atau kendala-kendala yang dirasakan setiap pengawas di lokasi.

Dari beberapa cerita pengawas yang penulis simak ketika pertemuan, kendala yang dikemukakan oleh para pengawas sebagian besar terkait dengan para penggarap yang masih belum bersedia bekerja sama. Penyebabnya terutama belum disepakatinya jumlah kompensasi oleh pihak perusahaan. Menurut para pengawas, kompensasi yang diajukan terkadang tidak sesuai dengan luas lahan yang diragap. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pak Heru meminta para pengawas untuk terus melakukan pendekatan dan bernegosiasi dengan penggarap sehingga lahan dapat “dibebaskan”.

Bahan diskusi lainnya terkait dengan produktivitas petani yang bekerja di *kebon-kebon* singkong. Seperti telah penulis singgung bahwa para pengawas berkewajiban untuk membuat laporan kehadiran setiap petani di lokasi yang diawasinya. Dari laporan tersebut akan terlihat petani-petani yang disiplin dan

kurang disiplin masuk kerja. Penilaian juga berupa catatan pengamatan pengawas tentang kinerja petani selama berada di lokasi sepanjang hari. Setiap hari kamis petang seluruh laporan dari para pengawas selama satu minggu akan digabungkan untuk kemudian dilaporkan oleh Pak Heru selaku manajer lapangan kepada Pak Adi (pimpinan perusahaan).

Masih terkait dengan aktivitas di lokasi, pertemuan juga membahas tentang rencana perawatan singkong yang harus segera dilakukan mengingat di lokasi Sampalan misalnya, usia penanaman memasuki bulan ketiga. Hal itu perlu dibicarakan dengan Pak Heru karena untuk melakukan perawatan, PT. EKM membutuhkan pekerja tambahan yaitu petani-petani perempuan untuk membersihkan rumput-rumput liar yang mengganggu pertumbuhan umbi. Selain itu juga dibicarakan jumlah petani perempuan yang dibutuhkan sehingga pengawas (Pak Asep) dapat meminta para petani yang sudah bekerja dengan PT. EKM sebelumnya.

Rapat juga membahas tentang upaya yang dilakukan oleh PT. EKM untuk memelihara akses terutama dengan pemilik lahan (seperti Pak Iw) dan pengelola lahan (pihak yayasan). Menurut Pak Heru, yang juga disepakati oleh para pengawas, menjalin komunikasi dengan pihak-pihak yang diajak kerja sama oleh PT. EKM menjadi hal yang juga penting dilakukan agar hubungan atau relasi diantara mereka tetap baik. Keberadaan Pak Iw yang cukup jauh (di Jakarta) hanya memungkinkan pihak PT. EKM atau Pak Heru untuk berkomunikasi melalui telepon seluler. Sementara pihak yayasan yang berada di lokasi Barudawa 2 (melalui Pak Sofyan dan rekan-rekannya), komunikasi tersebut dapat dilakukan dengan tatap muka.

Melalui koordinasi seperti ini, Pak Heru dapat selalu meng-*up date* setiap informasi sehingga perkembangan yang terjadi di lokasi dapat segera diketahuinya. Selain itu, informasi tentang lokasi-lokasi lahan yang potensial dimanfaatkan oleh PT. EKM juga muncul dalam diskusi ini. Kebutuhan PT. EKM untuk menjamin ketersediaan bahan baku juga menjadi hal penting lain yang perlu dipenuhi oleh Pak Heru dan para pengawas. Dengan demikian, kerja sama antar PT. EKM dan pihak Pak Heru (dan tim) juga bisa berkelanjutan.

IV. 3. Mekanisme Memelihara Akses

IV. 3. 1. Menjaga Relasi dengan Pemilik dan Pengelola Lahan

Sementara itu, strategi yang dilakukan perusahaan untuk memelihara akses (*access maintenance*) adalah melakukan komunikasi secara teratur dengan pihak Pak Iw (melalui Pak Ib), pemilik lahan di lokasi sampalan. Pak Heru mengakui bahwa kesempatan untuk bertemu langsung dengan Pak Iw sangat sedikit mengingat keduanya sama-sama sibuk dengan bisnis masing-masing, sehingga sebisa mungkin informasi penting yang menyangkut kerja sama diantara PT. EKM dan Pak Iw dapat disampaikan melalui telepon.

Hal yang biasanya dibicarakan oleh Pak Heru ketika menghubungi Pak Iw adalah perkembangan pembukaan dan penanaman lahan di lokasi Sampalan yang dimiliki oleh Pak Iw. Seperti telah penulis singgung bahwa pihak Pak Iw meminta Pak Heru untuk menanam seluruh lahannya dengan singkong supaya ia dapat merasakan hasil dari lahan yang dimilikinya tersebut. Hal itu muncul dalam pembicaraan antara Pak Ib dan PT. EKM (Pak Heru) sebagai respon atas kekecewaan pihak Pak Iw karena selama ini tidak pernah menerima hasil apapun dari pemanfaatan lahannya tersebut. Oleh karena itu, Pak Heru berupaya meyakinkan Pak Iw bahwa penanaman singkong di lahan miliknya akan berhasil melalui informasi tentang aktivitas di *kebon* singkong.

Pak Heru dan Pak Asep mengakui bahwa pemeliharaan akses di lokasi sampalan terkendala oleh para penggarap yang telah memanfaatkan lahan sebelum PT. EKM datang. Telah penulis narasikan sebelumnya bahwa ada diantara penggarap yang merasa telah memperoleh ijin dari pemilik lahan sehingga aksesnya tidak akan diganggu oleh pihak lain. Bagi Pak Heru dan terutama Pak yang setiap hari harus menghadapi penggarap di lokasi, hal ini bukan perkara yang mudah. Menjaga hubungan baik dengan pemilik lahan diyakini oleh PT. EKM dapat membantu dalam memelihara akses.

Selain pemilik lahan di Sampalan, PT. EKM juga mendekati pihak pengurus yayasan di lokasi Barudawa 2. Seperti telah penulis singgung bahwa saat membuka lahan di lokasi Barudawa 2, perusahaan mendapat keluhan dari seorang pengurus yayasan. Klaim atas lahan seluas kurang lebih 66 hektar tersebut memberikan konsekuensi tambahan. Perusahaan yang semula tidak

memperkiraan hal tersebut kemudian melakukan strategi yang sama ketika menghadapi penggarap, yaitu melakukan negosiasi dengan pihak yayasan. Seperti yang penulis amati ketika penelitian lapangan bulan Januari-Februari lalu.

Hal menarik yang penulis ikuti adalah ketika Pak Asep membawa sekotak benda yang ternyata adalah bungkusan telepon selular bermerk *blackberry*. Pak Asep mengatakan bahwa benda itu adalah cinderamata yang akan diberikan kepada Pak Pu (koordinasi yang merupakan atasan Pak Sofyan). Diakui pula oleh Pak Asep bahwa cinderamata, yang diserahkan melalui Pak Sofyan, tersebut akan berindikasi pada tindakan menyogok pihak yayasan karena perusahaan berkepentingan untuk menanam singkong secara berkelanjutan di wilayah yang diklaim oleh yayasan. Meskipun demikian, penulis tidak berwenang untuk mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan Pak Asep menyalahi aturan, dan kenyataannya pihak yayasan melalui Pak Sofyan justru (terang-terangan) meminta cinderamata lagi untuk diberikan kepada Pak Pu (setelah sebelumnya ia sudah menerima cinderamata tersebut).

Praktik-praktik seperti ini bagi penulis perlu dipahami sebagai kegiatan dalam konteks bisnis antara si pemilik modal dan pemilik lahan. Bagi Pak Asep, hal itu perlu dilakukan agar program menanam singkongnya lancar. Bagi pihak yayasan sendiri, pemberian itu (sepertinya) tidak dianggap sogokan karena mereka tidak merasa meminta sesuatu dari PT. EKM. Tanpa bermaksud memojokkan pihak-pihak tertentu, menurut penulis data ini cukup menggambarkan betapa relasi sosial yang terjalin diantara para aktor sangat tergantung bagaimana masing-masing pihak “memahami” keinginannya sehingga negosiasi dapat terjadi.

Hal inipun penulis maknai sebagai upaya PT. EKM untuk menjaga hubungan baik dengan pengelola yayasan sebagai pihak yang diajak bekerja sama. Selain itu, Pak Asep juga mengatakan bahwa komunikasi dengan pengelola yayasan terutama Pak Sofyan dan Pak Pu (atasannya) dilakukan dengan cukup intensif, terutama ketika muncul tindakan-tindakan yang mengindikasikan penguasaan lahan yang dilakukan oleh penggarap di lokasi ini. Bagaimanapun, kepentingan perusahaan untuk mempertahankan aksesnya pada lahan juga

dimanfaatkan oleh yayasan untuk mempertahankan aset yang sangat bernilai (berupa lahan) tersebut.

IV. 3. 2. Merawat Singkong Secara Intensif

Cara lain untuk memelihara akses di lokasi ini adalah dengan mengintensifkan kegiatan penanaman dan perawatan singkong. Tidak lama setelah ditanam, singkong harus mendapat perawatan serius dan intensif dengan cara dibersihkan sekitar tempat hidupnya dari rerumputan liar yang sangat cepat tumbuh. Selama sekitar 5 bulan (sejak bulan ke-2 hingga ke-6), lahan terus dirawat sehingga tidak dapat diakses oleh pihak lain. Ketika tanaman singkong semakin tinggi, kemungkinan pihak lain untuk memanfaatkan lahan tersebut menjadi semakin kecil sehingga sambil melakukan perawatan, perusahaan dapat melakukan proses pembukaan lahan di blok yang lain (masih di lokasi yang sama).

Seperti telah disinggung oleh penulis bahwa perawatan singkong dilakukan oleh para petani perempuan karena pekerjaan *ngoyos* (membersihkan rumput-rumput liar) ini dianggap cukup mudah dan dapat dilakukan oleh kaum perempuan. Berbeda dengan para bapak (tani), para ibu yang datang ke lokasi diberikan waktu pulang lebih awal, yaitu pukul 15.30 karena harus memasak untuk keluarganya di rumah, namun bukan berarti kedisiplinan dan kinerja tidak diperhatikan oleh PT. EKM. Setiap kehadiran tetap dicatat oleh pengawas, Pak Asep misalnya, untuk dilaporkan kepada Pak Heru dan PT. EKM.



Gambar 4. 4. Perawatan singkong di lokasi sampalan yang dilakukan para ibu (sumber: dokumentasi penelitian).

Penulis mengamati bahwa para petani perempuan ini membawa alat sederhana yang digunakan untuk membersihkan rumput. Mereka juga menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangannya dari sinar matahari dan memudahkan mencabut rumput-rumput tersebut. Penulis juga memperhatikan bahwa para ibu ini bekerja secara berkelompok (berdekatan satu sama lain) sehingga sesekali terdengar obrolan dan canda tawa disela kerja mereka. Hal ini juga diakui oleh Pak Asep yang juga memperhatikan “gaya bekerja” para petani yang bekerja di lokasi ini. Baginya selama itu tidak mengganggu proses kerja secara keseluruhan, ia tidak akan mempermasalahkan hal itu.

Tidak berbeda dengan para petani laki-laki, para ibu yang tugasnya melakukan perawatan ini datang pukul 07.00 WIB. Salah seorang dari mereka yang bernama Ibu Nurhayati (33 tahun), yang sempat penulis ajak *ngobrol* mengatakan bahwa ia biasanya datang ke lokasi setelah menyiapkan keperluan untuk anak-anaknya di rumah. Ibu Nurhayati yang tinggal di Kampung Cibeureum, Desa Sukanagalih mengakui bahwa jarak yang tidak terlalu jauh (kira-kira kurang dari 3 kilometer) dari rumah ke lokasi juga memberinya peluang untuk mengurus anak-anaknya terlebih dahulu. Ia sendiri merasa beruntung karena masih ada orang tua yang tinggal dengannya sehingga ia bisa menitipkan anak-anaknya.

Ibu Nurhayati dan para lainnya memilih untuk bekerja di lokasi sampalan karena letaknya yang tidak terlalu jauh dengan rumahnya. Ia bercerita kepada penulis tentang awal mula ia bekerja untuk PT. EKM. Sekitar dua bulan yang lalu, ia mendatangi Pak Asep yang sedang mengawasi kebon singkong di lokasi ini. Ia mengatakan kepada Pak Asep bahwa ia membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ketika itu, di kebon singkong sedang berlangsung pembukaan dan penanaman, sehingga ketika itu Pak Asep memintanya untuk kembali lagi beberapa minggu kemudian ketika singkong memasuki masa perawatan. Selain itu, Pak Asep juga mengatakan bahwa untuk perawatan singkong, perusahaan membutuhkan sekitar 20 orang tenaga kerja perempuan. Oleh karena itu, Bu Nurhayati meneruskan informasi tersebut kepada para ibu lain (teman-temannya).

Untuk melakukan perawatan singkong, para ibu atau tenaga kerja perempuan tersebut mendapat bayaran sebesar Rp. 20.000,- perhari dan seperti para petani laki-laki, mereka pun dibayarkan setiap hari Kamis (selama 6 hari). Menurut Pak Asep, perusahaan juga tidak “menutup mata” apabila ada pekerjanya yang mengalami kesulitan keuangan dan meminjam uang perusahaan (kasbon). Mereka membayarnya dengan cara meminta Pak Asep untuk langsung memotong uang gaji yang mereka terima setiap minggunya. Sekalipun demikian, perusahaan tetap mempertimbangkan kinerja para petani yang bekerja di lokasi *kebon* dan membatasi jumlah pinjaman yang diberikan kepada mereka.

Sejak awal pertemuan penulis dengan Pak Asep, ia menekankan bahwa perawatan terhadap singkong merupakan hal yang sangat penting mengingat target yang harus dicapai perusahaan sangat tinggi. Dengan kata lain, memperoleh panen hingga ratusan ton per hektar bukanlah hal yang mudah sehingga selain menggunakan bibit unggul dan pupuk organik yang berkualitas, membersihkan lahan dari tumbuhnya rumput-rumput di sekitar tanaman singkong juga sangat mempengaruhi pertumbuhan umbi. Pekerjaan ini menurut pengamatan penulis dan informasi dari Pak Asep, membutuhkan ketelatenan dan kehati-hatian sehingga dilakukan secara manual. Meskipun dapat dilakukan dengan menggunakan mesin pembabat rumput, tetapi hal itu beresiko terhadap umbi dan merangsang pertumbuhan rumput baru dalam waktu dekat.

Oleh karena itu, menempatkan pengawas dan melakukan koordinasi sebagai bentuk pengawasan (*control*) yang dilakukan PT. EKM, dan menjaga hubungan baik dengan pihak pemilik lahan serta melakukan perawatan singkong sebagai tindakan pemeliharaan (*maintenance*), menjadi saling melengkapi. Menurut Ribot dan Peluso (2003: 158-159) *control* dan *maintenance* merupakan posisi sosial yang secara temporal terkristalisasi di sekitar makna sebuah akses. Keduanya merupakan hubungan-hubungan yang pokok diantara para aktor yang terlibat dalam penyisihan, pengelolaan, atau pemanfaatan sumber daya. Pada saat yang bersamaan, makna-makna dan nilai-nilai sumber daya kemudian dikontestasikan oleh mereka yang mengendalikan dan memelihara akses.

BAB V

KESIMPULAN

Penelitian ini dimulai dari perhatian penulis pada isu energi terbarukan, khususnya *biofuel*, yang wacananya semakin sering digaungkan dalam beberapa tahun terakhir. Dari *biofuel* yang beraneka ragam tersebut, penulis memfokuskan pada masalah pengembangan bioetanol di sebuah lokasi. Salah satu masalah yang terkait dengan upaya pengembangan produksi bioetanol yang menarik untuk peneliti kaji adalah isu akses lahan pada sebuah perusahaan bernama PT. EKM yang mencoba memanfaatkan potensi sumber daya tertentu.

Sumber daya yang dimanfaatkan oleh PT. EKM untuk mengembangkan produksi bioetanol adalah ubi kayu atau singkong. Tumbuhan yang sudah sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama di pedesaan ini mudah ditemui di lahan-lahan milik masyarakat. Mampu hidup di lahan kritis dan mudah ditanam menjadi kelebihan yang dimiliki oleh tumbuhan ini. Oleh karena itu, tidak heran apabila sejak muncul tren penggunaan singkong sebagai bahan bakar nabati beberapa tahun silam, tumbuhan ini pun menarik minat perusahaan untuk mengembangkannya menjadi produk-produk bahan bakar yang dinilai lebih ramah terhadap lingkungan.

Sejak empat tahun terakhir (sejak 2008), PT. EKM memanfaatkan sumber daya (lahan) yang tersedia khususnya di kawasan Cipanas (Cianjur) dan sekitarnya untuk ditanami singkong. Sebagian besar lahan tersebut adalah milik negara yang dimanfaatkan anggota masyarakat sekitar untuk digarap. Selain itu, ada pula lahan-lahan milik pribadi atau organisasi yang belum termanfaatkan seluruhnya (meskipun sebagian juga dimanfaatkan penggarap).

Pada lahan-lahan itulah, PT. EKM melakukan upaya dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku untuk memproduksi bioetanol namun berdasarkan temuan lapangan yang penulis lakukan, prosesnya tidak selalu sederhana. Para aktor, bukan hanya perusahaan dan individu-individu di dalamnya, pun muncul dengan kepentingan-kepentingan terhadap lahan dan

saling berelasi satu sama lain dalam kontestasi maupun negosiasi. Dari relasi inilah penulis memahami bagaimana konsep akses “bekerja”.

Akses terhadap lahan dalam beberapa kasus yang pernah dikaji para peneliti antropologi seringkali berasosiasi dengan upaya penguasaan yang dilakukan dengan kekerasan atau pemaksaan. Kendati tidak seluruhnya dilakukan dengan cara-cara demikian, namun “akses” yang menurut Ribot dan Peluso (2003) merupakan *a bundle of powers* menjadi pendekatan yang mampu menjelaskan mengapa kasus-kasus akses lahan diwarnai oleh relasi antara dua pihak atau lebih yang sifatnya tidak setara. Dalam akses pula terdapat mekanisme perolehan, pengendalian, dan pemeliharaan yang saling melengkapi sehingga memberikan pemahaman mengapa aktor A dapat memiliki akses sementara aktor-aktor yang lain tidak.

Dalam kasus perkebunan singkong milik PT. EKM di Cianjur yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian, penulis memperoleh temuan bahwa mekanisme untuk memperoleh, mengendalikan, dan memelihara akses yang dilakukan oleh perusahaan diperkuat oleh akses perusahaan terhadap modal, pasar (termasuk tenaga kerja), pengetahuan, teknologi, dan relasi-relasi sosial. Dengan modal yang dimiliki, perusahaan dapat mengakses lahan dengan cara menyewa. Aksesnya terhadap pasar juga memudahkan perusahaan untuk menjual produk yang dihasilkannya. Dengan pengetahuan, inovasi (bibit dan pupuk) dihasilkan dan pemanfaatan lahan dioptimalkan dengan penggunaan teknologi berupa alat (traktor). Sementara akses melalui negosiasi relasi-relasi sosial yang lain dari pertemanan, kepercayaan, atau pertukaran membentuk uraian pada jejaring akses.

Relasi antaraktor terjalin karena hubungan pertemanan dan kepentingan. Dengan relasi inilah informasi yang dimiliki oleh seorang (aktor) disebarkan kepada aktor-aktor yang lain, seperti informasi tentang Pak Heru yang mampu “menguasai” lahan di Cipanas diperoleh Pak Adi melalui rekannya. Selain itu, lokasi lahan yang potensial untuk diakses oleh PT. EKM diperoleh Pak Heru melalui informasi dari Pak Al (koleganya). Dengan demikian, merujuk pada pendekatan aktor menurut Mosse (2005) bahwa terjadi “*flows of information*” yang menjadi dasar bagi tindakan yang dilakukan aktor-aktor tersebut.

Selain kerja sama atau kesepakatan, relasi para aktor juga diwarnai dengan kontestasi. Orang-orang kepercayaan Pak Iw (pemilik lahan) atau para penggarap menunjukkan bahwa mereka memiliki akses terhadap lahan (yang bukan miliknya) dan berusaha mempertahankan akses tersebut dari perusahaan yang bekerja sama dengan pemilik lahan. Akibatnya terjadi pertarungan kepentingan diantara para aktor tersebut. PT. EKM yang telah bekerja sama dengan pemilik lahan tidak dengan mudah dapat membuka lahan karena tidak hanya menghadapi penggarap, tetapi juga para pengelola yang merasa aksesnya terancam. Dinamika ini juga menggambarkan bagaimana para aktor saling berbeda pendapat dan memunculkan fragmentasi maupun berkolaborasi dan melakukan kompromi.

Relasi yang terjalin diantara para aktor juga memunculkan jejaring yang saling mengaitkan satu dengan yang lain, yang sarat dengan kekuasaan (*power*). Seperti disebutkan oleh Ribot (1998) dan Ribot dan Peluso (2003) bahwa akses merupakan kemampuan untuk mengambil manfaat dari sesuatu dan kemampuan merujuk pada kekuasaan, di mana orang dapat mempengaruhi apa yang dilakukan (praktik) dan ide-ide orang lain dan kekuasaan selalu muncul dari, meskipun tidak selalu melekat pada orang (*people*). Temuan lapangan juga menunjukkan hal menarik, yaitu *power* tidak hanya dimiliki oleh perusahaan atau pemilik lahan sebagai pemegang legitimasi atas lahan, tetapi juga oleh para penggarap.

Terkait dengan isu energi terbarukan khususnya pengembangan bioetanol, tesis ini juga ingin menunjukkan bahwa akses terhadap lahan merupakan salah satu isu yang penting untuk dikaji karena terkait dengan upaya perusahaan menjaga keamanan (*security*) dan keberlangsungan tersedianya bahan baku. Seperti telah disebutkan dalam sebuah hasil penelitian (Murdiyatmo, 2006) bahwa pengembangan bioetanol masih terkendala penyediaan bahan baku, salah satunya akibat perolehan lahan meskipun lahan-lahan tidak produktif banyak dijumpai di beberapa propinsi. Dengan demikian, kajian ini diharapkan mampu memberikan analisis tentang mekanisme akses lahan dalam konteks pengembangan bioetanol di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel dan Buku:

- Bennett, John W. 1980. "Human Ecology as Human Behavior: A Normative Anthropology of Resource Use and Abuse" dalam Altman, I., et.al., (eds). *Human Behavior and Environment: Advances in Theory and Research*. New York: Plenum Press.
- Biezeveld, Renske. 2004. Discourse Shopping in a Dispute over Land in Rural Indonesia. *Ethnology*, 43(2), pp. 137-154. USA: The University of Pittsburg.
- Blasco, Paloma Gay y dan Huon Wardle. 2007. "Comparison: The Ethnographic Outlook" dalam *How to Read Ethnography*. London and New York: Routledge.
- Blowers, Andrew. 1997. "Environmental Policy: Ecological Modernisation or The Risk Society?". *Urban Studies*, 34(5-6): 845-871
- Castañeda, Quetzil E. 2006. "The Invisible Theatre of Ethnography: Performative Principles of Fieldwork". *Anthropological Quarterly*, 79(1): 75-104.
- Dale, Pamela, Kristen Himelein, Denis Nikitin, and Angie Bexley. 2006. The Lay of the Land: Land Access and Dispute Resolution in Timor-Leste. Briefing Note Volume 5, Issue 3. Justice for the Poor Timor-Leste reports can be accessed at www.worldbank.org/justiceforthe poor.
- Ferguson, James. 1996. *The Anti-Politics Machine: "Development", Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho*. Minneapolis: The University of Minnesota Press.
- Fetterman, David M. 1989. *Ethnography Step by Step*. Newbury Park: Sage Publications.
- Forte, Maximilian C. 1998. "Globalization and World-Systems Analysis: Toward New Paradigms of a Geo-Historical Social Anthropology (A Research Review)." *Review* (Fernand Braudel Center), 21(1): 29-99.
- Ghimire, Krishna B. 1997. Land-Use Options for Rural Development. *Development in Practice*, 7(4): 420-424. Taylor & Francis, Ltd. on behalf of Oxfam GB. <http://www.jstor.org/stable/4029009>.
- Goodman, Gordon T. 1987. "Biomass Energy in Developing Countries: Problems and Challenges." *Ambio*, 16(2/3): 111-119.

- Hall, Derek, Philip Hirsh, dan Tania Murray Li. 2011. *Powers of Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia*. Singapore: NUS Press.
- Have, Paul Ten. 2004. "Qualitative Methods in Social Research" in *Understanding Qualitative Research and Ethnomethodology*. London: Sage Publications.
- Henning, Annete. 2005. "Climate Change and Energy Use: The Role for Anthropological Research." *Anthropology Today*, 21(3): 8-12.
- Ho, Robert. 1970. Land Ownership and Economic Prospects of Malayan Peasants. *Modern Asian Studies*, 4(1): 83-92. Cambridge University Press. <http://www.jstor.org/stable/311754>.
- Huggins, Chris dan Johan Pottier. 2005. Land Tenure, Land Reform and Conflict in Sub-Saharan Africa: Towards a Research Agenda. www.iss.co.za/pubs/Books/GroundUp/Conclu.pdf. Hal. 383-392.
- Jackson, Michael D. 2008. "Between Biography and Ethnography". *Harvard Theological Review*, 101(3-4): 377-397.
- Klatt, W. 1972. Agrarian Issues in Asia: Land As a Source of Conflict. *International Affairs* (Royal Institute of International Affairs 1944-), Vol. 48, No. 2(Apr., 1972), pp. 226-241. Blackwell Publishing on behalf of the Royal Institute of International Affairs. <http://www.jstor.org/stable/2613439>.
- Kottak, C.P. 1999. "The New Ecological Anthropology". *American Anthropologist*, 101 (1): 23-35. USA: American Anthropological Association.
- Li, Tania Murray. 2002. "Local Histories, Global Markets: Cocoa and Class in Upland Sulawesi." *Development and Change*, 33(3): 415-437.
- Li, Tania Murray. 2007. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. London: Duke University Press.
- Löffler, Ulrich. 1996. Land Tenure Developments in Indonesia. Sector Project "The Importance of Land Tenure in Development Cooperation". Deutsche Gesellschaft für Technical Zusammenarbeit (GTZ).
- Lowe, Celia. 2000. "Global Markets, Local Injustice in Southeast Asian Seas: The Live Fish Trade and Local Fishers in the Togeian Islands of Sulawesi" dalam *People, Plants, and Justice: The Politics of Nature Conservation*. Charles Zerner (Ed). New York: Columbia University Press. Hal 234-258.

- Lucas, Heru dan Carol Warren. 2003. *The State, the People, and Their Mediators: The Struggle over Agrarian Law Reform in Post-New Order Indonesia. Indonesia*, 76, pp. 87-126. USA: Cornell University.
- Mauro, Salvatore Engel-Di. 2009. "Seeing the local in the global: Political ecologies, world-systems, and the question of scale." *Geoforum*, 40: 116-125.
- McGrath, David G. 1987. "The Role of Biomass in Shifting Cultivation." *Human Ecology*, 15(2): 221-242.
- McTaggart, W. Donald. 1982. "Land-Use in Sukabumi, West Java: Persistence and Change". *Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde*, Deel 138, 2de/3de Afl. (1982), pp. 295-316. KITLV, Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies. <http://www.jstor.org/stable/27863434>.
- Mafianos, Nonos. 2006. Dampak Pembangunan Fasilitas Pariwisata Terhadap Perubahan Struktur Agraria, Kelembagaan, dan Peluang Usaha di Perdesaan (Kasus di Sekitar Kawasan Pariwisata Kota Bunga, Desa Sukanagalih. Skripsi Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat. Institut Pertanian Bogor.
- Mosse, David. 2005. *Cultivating Development: an Ethnography of Aid Policy and Practice*. London: Pluto Press.
- Nash, June. 2001. "Globalization and the Cultivation of Peripheral Vision." *Anthropology Today*, 17(4): 15-22.
- Owen, Steve dan Jeff Boyer. 2006. "Energy, Environment, and Sustainable Industry in the Appalachian Mountains, United States." *Mountain Research and Development*, 26(2): 115-118.
- Pasang, Haskarlianus. 2011. "Kemiskinan Energi dan Perubahan Iklim." *Analisis CSIS*, 40(1):100-114.
- Paulson, Susan, Lisa L Gezon, and Michael Watts. 2003. "Locating The Political in Political Ecology: an Introduction". *Human Organization*, 62 (3): 205-217.
- Payer, Cheryl. 1979. "The World Bank and the Small Farmers". *Journal of Peace Research*, 16(4): 293-312. Sage Publications, Ltd. <http://www.jstor.org/stable/424331>.
- Peacock, James L. 1986. "Method" in *The Anthropological Lens. Harsh Light, Soft Focus*. Cambridge: Cambridge University Press.

- Pelto, P.J. dan G. H. Pelto. 1970. *Anthropological Research. The Structure of Inquiry* (2nd Edition). Cambridge: Cambridge University Press. Hal 1-37.
- Peluso, Nancy Lee dan Peter Vandergeest. 2001. "Genealogies of The Political Forest and Customary Rights in Indonesia, Malaysia, and Thailand". *The Journal of Asian Studies*, 60(3): 761-812.
- Peluso, Nancy Lee. 1995. "Whose Woods are These? Counter-Mapping Forest Territories in Kalimantan, Indonesia". *Antipode*, 27(4): 383-406. Cambridge: Blackwell Publishers.
- Peters, Pauline E. 2007. *Challenges in Land Tenure and Land Reform in Africa: An Anthropological Perspective*. CID Working Paper No. 141. Cambridge: Harvard University.
- Quan, Julian. 2006. *Land access in the 21st century: Issues, trends, linkages and policy options*. LSP Working Paper 24. Access to Natural Resources Sub-Programme. Natural Resources Institute. UK: University of Greenwich.
- Ribot, Jesse C. 1998. "Theorizing Access: Forest Profits along Senegal's Charcoal Commodity Chain". *Development and Change* (29): 307-341.
- Ribot, Jesse C. dan Nancy Lee Peluso. 2003. "A Theory of Access". *Rural Sociology*, 68(2): 153-181.
- Russi, Daniela. 2007. "Biofuels: Solution for Energy Crisis?." *Economic and Political Weekly*, 42(19): 1664-1667.
- Shore, Cris dan Susan Wright. 1997. *Anthropology of Policy: Critical Perspectives on Governance and Power*. London: Routledge.
- Stanley R., Bull dan Lynn Billman. 2000. "Renewable Energy: Ready to Meet Its Promise?". *The Washington Quarterly*, 23(1): 229-244. USA: The MIT Press.
- Toulmin, Camilla, dkk. 2011. *Land Tenure and International Investments in Agriculture. A Report by The High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition*. Rome: Committee on World Food Security High Level Panel of Experts on Food Security and Nutrition.
- Tsing, Anna. 1999. *Notes on Culture and Natural Resource Management*. Berkeley: Institute of International Studies.
- Walsh, Martin T. dan Sharon P. Harvey. 1997. *Understanding and Engaging Local Knowledge and Practice: Practical Approaches to Natural Resources Research and Development*. UK: National Resources Institute, University of Greenwich.

Wilkins, Gill. 2002. *Technology Transfer for Renewable Energy: Overcoming Barriers in Developing Countries*. London: The Royal Institute of International Affairs.

Wolf, Eric R. 2001. "On Fieldwork and Theory" dalam *Pathways of Power: Building an Anthropology of The Modern World*. Berkeley: University of California Press.

Zazali, Ahmad dan Hary Oktavian. 2008. Konflik Sumber Daya Alam, Ancaman Keberlanjutan (Catatan Kritis Akhir Tahun 2008). Scale Up (Sustainable Social Development Partnership). Hal 1-7.

Artikel dan Berita Online:

Arifenie, Fitri Nur. 2011. "Impor Singkong Berkurang, Produksi Singkong Mulai Digeber." Berita hari Senin, 26 September 2011 dalam <http://industri.kontan.co.id/news/impor-singkong-berkurang-produksi-singkong-mulai-digeber-1>.

Arifenie, Fitri Nur. 2011. "Permintaan Singkong Naik Hampir 30%." Berita hari Kamis, 08 September 2011 dalam <http://industri.kontan.co.id/news/permintaan-singkong-naik-hampir-30-1>.

Badan Pusat Statistik. 2012. Luas Panen-Produktivitas-Produksi Ubi Kayu Provinsi Jawa Barat dalam http://www.bps.go.id/tnmn_pgn.php?eng=0.

Bisnis UKM. 2012. "Bioetanol Singkong, Menguntungkan dan Ramah Lingkungan." Berita tanggal 6 Februari 2012 dalam <http://bisnisukm.com/bioetanol-singkong-menguntungkan-dan-ramah-lingkungan.html>.

Budiarto, Tri. 2012. Food vs Fuel: Analisis Kepentingan Pangan dan Energi dalam <http://ekonomi.kompasiana.com/agrobisnis/2012/02/29/food-vs-fue>.

Duryatmo, Sardi. 2012. "Bensin Singkong dari Halaman Rumah." Berita tanggal 4 Mei 2012 dalam http://lampungbarat.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=1193&Itemid=142.

Hasniawati, Amailia Putri. 2010. "Jepang Minati Bioetanol dari Singkong." Berita hari Senin, 31 Mei 2010 dalam <http://industri.kontan.co.id/news/jepang-minati-bioetanol-dari-singkong-1>.

Komarayati, Sri dan Gusmailina. 2010. *Prospek Bioetanol sebagai Pengganti Minyak Tanah*. Hasil Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan, Institut Pertanian Bogor.

Murdiyatmo, Untung. 2006. "Pengembangan Industri Ethanol: Prospek, Kendala, dan Tantangan." Workshop Nasional Bisnis Biodiesel dan Bioethanol di Indonesia tanggal 21 November 2006.

Yuswanto. 2010. Bioetanol dari Singkong: Semanis Gethuk yang Sehebat Bensin. Dapat diunduh di <http://yuswanto.student.umm.ac.id/2010/01/29/32/>.

----- . 2012. "Pabrik Bioetanol Berbahan Baku Singkong Diresmikan." Berita tanggal 9 Maret 2012 dalam <http://singkonggajah.wordpress.com/2012/03/09/pabrik-bioetanol-berbahan-baku-singkong-diresmikan/>.



LAMPIRAN

INVESTASI AMAN DENGAN KEUNTUNGAN BESAR MARI BERGABUNG DENGAN YANG SUDAH UNTUNG



Gubernur Jawa Tengah menguji kendaraan berbahan bakar singkong



Bio-Etanol



Tepung Singkong (moca)



Pupuk Cair



Pakan Ternak

Kami group usaha yang bergerak dibidang :

1. Bioetanol
2. Bioetanol bahan bakar :
3. Biopremium dan Biokerosin (minyak kompor)
4. Tapioka
5. Terigu Singkong (moca)
6. Gaplek, ongkok & singkong segar

Mengajak bergabung dengan mereka yang sudah untung :

Investasi Penanaman Singkong
PAKET PENANAMAN Rp. 26.000.000,-/hektar

Dana digunakan untuk : Sewa lahan, Pengadaan bibit, Pengolahan tanah, Pemupukan, Penyiraman, Perawatan, Pengamanan panen.

1. Investor akan panen 120 ton - 250 ton / Ha
2. Hasil panen perusahaan bayar harga singkong Rp. 400/kg
3. Jika terjadi resiko apapun (kenarau panjang, penyakit, pencurian hasil panen) investor tetap akan mendapat jaminan hasil minimal 120 ton/ha (jaminan resiko aman dan menguntungkan karena resiko diambil alih oleh perusahaan)
4. Perjanjian notaris tiap hektar diberi nama masing-masing Investor.
5. Lokasi penanaman di Cianjur dan Bogor
6. Waktu penanaman sampai panen 12 bulan, penanganan intensive, varietas unggul, pemupukan 2 kali sebulan, penyalangan keamananan.
7. Kelebihan panen dari jumlah minimal jaminan hasil 120 ton dibagi dua dengan perusahaan.

CONTOH PENDAPATAN INVESTOR

Jika dalam 1 Ha panen 250 ton (250.000 kg) pendapatan investor adalah :

- a. Jaminan minimal 120.000 kg x Rp. 400 = Rp. 48.000.000 (80%)
- b. Sisa kelebihan jaminan minimal masing-masing milk investor 50% dan milk perusahaan 50%
= (250.000 kg - 120.000 kg) x 50% x Rp. 400/kg
= Rp. 26.000.000 (100 %)
- c. Maka total keuntungan diterima investor :
Rp. 48.000.000 + Rp. 26.000.000 = Rp. 74.000.000 (180%)

PROMO PAKET PENANAMAN

1. Minimal penanaman 1 hektar Rp. 26.000.000,-
2. Ambil paket 25 Hektar dalam 1 kali masa tanam berhadiah motor tanpa diundi
3. Ambil paket 50 Ha dalam 1 kali masa tanam berhadiah mobil Avanza tanpa diundi
4. Ambil paket 100 Ha dalam 1 kali masa tanam berhadiah rumah/apartemen/kiyung nova (salam satu) tanpa diundi

SEGERA BERGABUNG DENGAN MEREKA YANG SUDAH UNTUNG

Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi : Energi Karya Mandiri
Jl. May. Jend. HE. Sukma Km. 2 Gang Ayu No. 19 Clawi
Bogor 16720
Telp. 0251-8242520 Fax. 0251-8241908 (Tini & Lia)

Hubungi :
Tini : 0813 1067 8972
Lia : 0812 8809 1622

Lahan Kebun Singkong PT. EKM

Panen Singkong PT. EKM

Singkong Hasil Panen PT. EKM

Pabrik Bioetanol, PT. EKM

Ekspedisi BBS
Jakarta-Surabaya-Jakarta



BIO-ENERGI
ENERGI KARYA MADANI